

LAPORAN INDIVIDU
KEGIATAN PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT)
SMK KARYA RINI YHI KOWANI YOGYAKARTA

Disusun Sebagai Pertanggung jawaban
Pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT)
Tahun Akademik 2017/2018

Dosen Pembimbing Lapangan : Anang Priyanto, S.H. ,M.Hum



Disusun oleh:

Lina Nur Savangah

NIM 14401244006

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2017

LEMBAR PENGESAHAN

Pengesahan laporan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMK KARYA RINI
YHI KOWANI YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Lina Nur Savangah
NIM : 14401244006
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial

Telah melaksanakan kegiatan PLT di di SMK KARYA RINI YHI KOWANI
YOGYAKARTA dari tanggal 16 September sampai dengan 18 November 2017. Hasil
kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini.

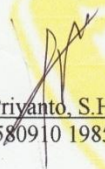
Laporan PLT ini telah disetujui dan disahkan pada:


Hari :
Tanggal :

Sleman, November 2017

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pembimbing

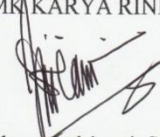

Anang Priyanto, S.H.,M.Hum
NIP. 19580910 198503 1 003


Dartono, S.Pd
NIP.

Mengetahui,


Kepala Sekolah
SMK KARYA RINI

Suyatmin, SE.M.M.Par
NIP.

Koordinator PLT
SMK KARYA RINI

Rahaya Indriyani, S.Pd
NIP. 19590308 198602 2 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat taufik hidayah serta inayahnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan laporan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) ini secara lancar dan diberikan banyak kemudahan. Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa kependidikan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi keahlian yang diperlukan dalam pembelajaran di sekolah sebagai pendidik profesional.

Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) ini dilaksanakan di SMK KARYA RINI YHI KOWANI sejak tanggal 16 September hingga 18 November 2017. Pada akhirnya penulis menyusun laporan guna mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan selama 2 bulan di SMK KARYARINI YHI KOWANI. Laporan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) ini tidak terlepas dari kerjasama, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta,
2. TIM pembina PLT dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) beserta staff, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sebagai bekal terjun ke Sekolah.
3. Dr. Widiastuti, S.Pd., M.Pd., Selaku Dosen Pamong yang telah membantu dan memberikan pengarahan dalam melaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMK KARYA RINI YHI KOWANI.
4. Anang Priyanto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang selalu membantu dan memberikan bimbingan saran yang bermanfaat bagi penulis dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan Terbimbing (PLT) dan penyusunan Laporan.

5. Suyatmin, SE.M.M.Par selaku Kepala SMK KARYA RINI YHI KOWANI yang telah memberikan izin kepada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta untuk melaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT).
6. Dartono, S.Pd, selaku guru pembimbing di SMK KARYA RINI YHI KOWANI yang selalu membantu dan memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam melaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dari awal hingga akhir.
7. Seluruh guru dan karyawan yang telah memberikan bimbingan selama Praktik Lapangan Terbimbing (PLT).
8. Seluruh siswa SMK KARYARINI YHI KOWANI pada umumnya dan pada khususnya untuk siswa kelas X Tata Busana, X Perhotelan 1 dan XI Perhotelan 2 yang luar biasa. Lewat keceriaan kalian penulis belajar arti memberi dan memahami.
9. Teman-teman seperjuangan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMK KARYARINI YHI KOWANI yang telah menciptakan kebersamaan layaknya keluarga.
10. Orang tua yang senantiasa mengikhlaskan, memberi motivasi, dan mendoakan kelancaran dari setiap langkah perjalanan penulis di perkuliahan ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan telah membantu pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) UNY 2017 ini hingga selesainya penyusunan laporan ini.

Semoga Allah SWT mencatat amal baik dan membalas dengan pahala yang setimpal atas semua yang telah diberikan. Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun penulis terima guna perbaikan selanjutnya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Analisi Situasi	1
B. Perumusan Program Dan Rancangan Kegiatan PLT	5
BAB II. PERSIAPAN PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL.....	
A. Persiapan.....	
1. Pembekalan Praktik Lapangan Terbimbing Pembekalan Jurusan	9
2. Observasi	10
3. Pembekalan Mikro.....	11
4. Persiapan Mengajar	11
B. Persiapan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT)	
1. Persiapan Kegiatan Praktik Mengajar	12
2. Umpan Balik Pembimbing.....	14
3. Pendampingan Guru Mengajar.....	14
4. Bimbingan PLT	15
5. Penyusunan Laporan Individu.....	15
C. Analisis Pelaksanaan Dan Refleksi	
1. Pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT)	15
2. Refleksi	16
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	17
B. Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Observasi Kondisi Sekolah
- Lampiran 2 : Lembar Observasi Kelas dan Peserta Didik
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan PLT
- Lampiran 4 : Matrik Program Kerja
- Lampiran 5 : Laporan Mingguan Pelaksanaan
- Lampiran 6 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
- Lampiran 7 : Media Pembelajaran
- Lampiran 8 : Daftar Hadir
- Lampiran 9 : Daftar Nilai
- Lampiran 10 : Dokumentasi
- Lampiran 11 : Rekapitulasi Dana

LAPORAN KEGIATAN
PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING
SMK KARYA RINI KOWANI YOGYAKARTA

Oleh:

Lina Nur Savangah

14401244006

Abstrak

Sebagai salah satu Universitas dengan latar belakang pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta memiliki tugas sebagai pencetak tenaga kependidikan yang handal dan profesional untuk dunia pendidikan. Melalui program-program mata kuliah kependidikan yang dilaksanakan baik, teori, praktik maupun Lapangan diharapkan mampu memberi bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada para mahasiswa tentang proses Belajar Mengajar. Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa kependidikan guna mengupayakan suatu keterampilan kependidikan yang diperoleh di kampus, untuk kemudian berusaha mengembangkan inovasi pembelajaran di lokasi PLT.

Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dan praktik persekolahan. Adapun tujuan dari Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) ini diantaranya untuk melatih para mahasiswa calon guru untuk dapat belajar menjadi guru yang profesional di bidangnya. Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) yang dilakukan di SMK KARYA RINI KOWANI YOGYAKARTA meliputi kegiatan pembelajaran di kelas dan praktik persekolahan. Kegiatan praktik pembelajaran di kelas bertujuan agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar mengajar di dalam kelas. Sementara kegiatan praktik disekolah bertujuan agar mahasiswa mampu mengenal manajemen sekolah dan melakukan kegiatan lain di luar pembelajaran formal.

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan praktik mengajar sebanyak 9 kali pertemuan, maka didapatkan hasil bahwa siswa SMK KARYA RINI YHI KOWANI YOGYAKARTA rata-rata mempunyai rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal

yang mendukung dalam pembelajaran. Siswa juga berperan aktif dalam setiap pembelajaran, seperti mampu mengutarakan pendapatnya sendiri terkait dengan materi pembelajaran, mampu melakukan kegiatan diskusi dengan aktif. Dalam rangka mewujudkan output yang baik dari segi IQ, EQ, dan SQ, pihak sekolah menjalankan peranannya sebagai lembaga pendidikan secara profesional seperti konsolidasi kegiatan belajar mengajar, menjalin hubungan antar personal, saling menghargai, melengkapi sarana dan prasarana dan tertib administrasi.

Secara keseluruhan hasil program kerja Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) terlaksana dengan baik, meskipun masih ada kekurangan. Harapannya, semua pengalaman ini semoga dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik dan dapat dijadikan bekal dalam pengabdian diri dalam masyarakat di masa yang akan datang.

Kata kunci: *PLT, Pembelajaran*

BAB I

PENDAHULUAN

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru atau pendidik atau tenaga kependidikan. Standar kompetensi PLT dirumuskan dengan mengacu dalam konteks kehidupan guru sebagai anggota masyarakat yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

A. Analisis Situasi

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta merupakan Sekolah Menengah Kejuruan berstatus Swasta yang bernaung di bawah Yayasan Hari Ibu KOWANI. Sekolah ini memiliki 2 bidang studi keahlian yaitu Tata Busana dan Perhotelan. Sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini berlokasi di Jl. Laksda Adi Sucipto 86, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Telp : (0274) 581171.

Lokasi SMK Karya Rini ini berbatasan dengan jalan raya. Walaupun berbatasan dengan jalan raya tetapi polusi dan kebisingan kota tidak mengganggu kenyamanan sekolah. Karena jalan masuk menuju SMK difungsikan sebagai gedung pertemuan dan Wisma yang secara langsung dapat digunakan oleh para siswa SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta untuk pembelajaran praktik. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa PLT-UNY, maka diperoleh analisis situasi SMK Karya Rini sebagai berikut:

1. Program Keahlian

Sampai saat ini SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta memiliki 2 program keahlian yaitu :

a. Program Keahlian Tata Busana

Program keahlian Tata Busana terdiri dari kelas X, XI, XII. Yang setiap angkatannya (*grade*) terdiri dari satu kelas. Jadi keseluruhan kelas Tata Busana ada 3 kelas, yaitu kelas X Tata Busana, XI Tata Busana, dan XII Tata Busana.

b. Program Keahlian Perhotelan

Program Keahlian Perhotelan terdiri dari kelas X, XI, XII. Yang setiap angkatannya (*grade*) terdiri dari dua kelas. Jadi keseluruhan kelas Akomodasi Perhotelan yaitu 6 kelas, yaitu kelas X Perhotelan 1 dan X Perhotelan 2, XI Perhotelan 1 dan XI Perhotelan 2, dan XII Perhotelan 1 dan XII Perhotelan 2.

2. Potensi Guru dan Karyawan

Jumlah Guru dan Karyawan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Rini YHI KOWANI terdiri dari 29 orang guru dan 7 orang karyawan.

3. Lokasi Sekolah

SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta terletak di Jl. Laksda Adi Sucipto 86 Depok, Catur Tunggal Yogyakarta. Telp (0274) 581171. Lokasi dikelilingi oleh gedung pertemuan, museum dan wisma yang sama-sama bernaung dibawah Yayasan Hari Ibu KOWANI.

4. Kondisi Fisik Sekolah

Kondisi fisik SMK Karya Rini relatif baik. Keadaan lingkungan sekolah dapat dikatakan bersih dan tertata. Namun masih kurangnya penghijauan di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan karena lokasi sekolah yang di kelilingi oleh gedung-gedung lain serta terbatasnya lahan.

Komponen Sekolah terdiri dari :

1. Nama Sekolah : SMK Karya Rini YHI KOWANI
Yogyakarta
2. Nomor Induk Sekolah : 332040207002
3. Status Sekolah : Swasta
4. Akreditasi : A

Keadaan gedung sekolah

1. Luas Bangunan : $787 m^2$
2. Lain-lain : $132 m^2$
3. Total Luas Keseluruhan : $919 m^2$
4. Status Kepemilikan : Yayasan

5. Alamat Sekolah : Jl. Laksda Adi Sucipto 86, .Depok, Catur
Tunggal, Yogyakarta. Telp : (0274).581171
6. Nama Kepala Sekolah : Suyatmin, SE.M. MPar
7. Tahun Berdiri : 1970
8. Kurikulum : KTSP dan Kurikulum 2013
9. Tiap Jam Pelajaran : 45 Menit

Adapun fasilitas fisik sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Ruang Kepala Sekolah
- b. Ruang Wakil Kepala Sekolah
- c. Ruang Tata Usaha
- d. Ruang Guru
- e. Ruang OSIS
- f. Ruang Teori Meliputi X Busana, XI Busana, XII Busana, X AP 1, XI AP 1, XII AP 1, X AP 2, XI AP 2, XII AP 2.
- g. Laboratorium
 1. Lab. Tata Busana,
 2. Lab. Tata Hidang,
 3. Lab. Dapur (Produksi),
 4. Lab. FO,
 5. Lab. *House Keeping*,
 6. Laboratorium Komputer,
- h. Perpustakaan,
- i. Ruang BP,
- j. Mushola,
- k. Tempat Parkir,
- l. Ruang UKS,
- m. Ruang Serba Guna,
- n. Lapangan Upacara,
- o. Kamar Mandi,
- p. Gudang

- q. Fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar
- r. Modul Belajar
- s. Media Pembelajaran
- t. Buku Paket
- u. LCD
- v. Komputer
- w. Peralatan Praktik Olahraga

Peralatan Praktek yang Tersedia

1. Bidang Studi Keahlian Tata Busana
 - Mesin Jahit,
 - Mesin Obras,
 - Manaquin,
2. Bidang Studi Keahlian Perhotelan
 - Peralatan Tata Hidang
 - Peralatan Dapur
 - Pesawat telepon untuk Praktik
 - Mesin Ketik Manual
 - Kalkulator
 - Peralatan komunikasi

Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Lapangan
2. Bola (tenis meja, tenis, dsb.)
3. Raket
4. Net
5. Matras

Menurut hasil observasi, sarana dan prasarana diatas kondisinya cukup baik dan menunjang terselenggaranya kegiatan pembelajaran. Walaupun ada beberapa fasilitas yang perlu sedikit dilakukan perbaikan dan perlu penambahan beberapa perlengkapan pendukung untuk keadaan fisik sekolah maupun media dalam pembelajaran di sekolah.

B.Perumusan Program Dan Rancangan Kegiatan PLT

Praktik Lapangan Terbimbing mempunyai sasaran masyarakat sekolah, baik dalam kegiatan yang terkait dengan pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. Program PLT diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar, memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya. Pelaksanaan PLT melibatkan unsur-unsur seperti Dosen Pamong PLT, Guru Pembimbing, Kepala Sekolah, Koordinator PLT sekolah, para mahasiswa praktikan, seluruh siswa-siswi di sekolah, dan seluruh komponen sekolah. Program PLT dilakukan secara terintegrasi dan saling mendukung untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional. Program-program yang dikembangkan dalam kegiatan PLT difokuskan pada sekolah. mencakup civitas sekolah antara lain Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, dan Siswa. Pelaksanaan PLT dimulai pada tanggal 16 September 2017 sampai dengan 18 November 2017. Adapun rancangan Praktik Lapangan Terbimbing ini meliputi:

1. Tahapan Persiapan

a. Kegiatan Pengajaran Terbatas (*Micro Teaching*)

Mikro Teaching merupakan mata kuliah dengan bobot 1 SKS. Mikro Teaching adalah latihan mengajar yang dilakukan mahasiswa di kelas dibawah bimbingan Dosen Pembimbing. Dalam melaksanakan perkuliahan, mahasiswa diberikan materi tentang bagaimana mengajar yang baik disertai praktik untuk mengajar dengan peserta yang diajar adalah teman sekelompok. Keterampilan yang diajarkan dan dituntut untuk memiliki dalam pelaksanaan mata kuliah ini berupa keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan persiapan menjadi seorang calon guru / pendidik.

b.Pembekalan PLT

Pembekalan PLT merupakan strategi pemberian pemahaman kepada mahasiswa tentang PLT sebelum diterjunkan di lapangan (sekolah, lembaga). Dengan pemahaman yang baik, diharapkan mahasiswa dapat

mengimplementasikan ilmunya ke sasaran PLT. Selain itu, mahasiswa dapat memahami betul mekanisme pelaksanaan PLT. Selanjutnya, mahasiswa dapat melaksanakan PLT dengan benar dari perencanaan, pelaksanaan refleksi dan evaluasi program kegiatan PLT.

2. Observasi Sekolah

a. Observasi Kondisi Sekolah

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang dinamika kehidupan sekolah terutama yang berkaitan dengan situasi dan kondisi ditempat PLT. Adapun yang menjadi sasaran observasi adalah :

- 1) Potensi guru, karyawan dan siswa.
- 2) Hubungan sosial antara kepala sekolah, dengan guru, karyawan dan siswa.
- 3) Hubungan sosial antara sekolah dan siswa.
- 4) Kegiatan siswa pada jam pelajaran dan diluar pelajaran dengan waktu yang telah diprogram.

b. Observasi Proses Belajar Mengajar

1) Perangkat pembelajaran

Sebelum Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, terlebih dahulu menyiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran dan perhitungan minggu efektif. Dalam hal ini mahasiswa PLT oleh guru pembimbing sekolah diminta untuk menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, media, dan tugas harian yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik.

2) Proses Pembelajaran

Tahap ini Mahasiswa mengamati proses KBM yang berlangsung dilapangan atau di kelas, adapun yang harus diamati dalam proses pembelajaran antara lain :

- a) Membuka Pelajaran
- b) Penyajian materi
- c) Metode pembelajaran

- d) Penggunaan bahasa
 - e) Penggunaan waktu
 - f) Gerak
 - g) Cara memotivasi siswa
 - h) Teknik bertanya dan menanggapi pertanyaan
 - i) Teknik penguasaan kelas
 - j) Penggunaan media pemberlajaran
 - k) Bentuk dan cara evaluasi
 - l) Menutup pelajaran
- 3) Perilaku Siswa

Mengamati perilaku siswa yang sedang mengikuti KBM dalam hal ini perilaku siswa dapat diamati pada waktu siswa didalam dan diluar kelas.

3. Praktik Mengajar

Praktik mengajar sesuai dengan jadwal program studi masing –masing yang dimulai pada tanggal 16 September – 18 November 2017. Praktik mengajar merupakan kegiatan pokok dari PLT. Praktek mengajar merupakan kegiatan untuk melatih mahasiswa agar menjadi guru yang profesional. Mahasiswa diharapkan menggunakan seluruh kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki.

Praktik Mengajar meliputi:

- 1) Pembuatan KKM, Silabus, RPP dan Media Pembelajaran
 - 2) Praktik Mengajar di Kelas
 - 3) Pendampingan Guru Mengajar
 - 4) Evaluasi dan Koreksi
 - 5) Administrasi Guru
 - 6) Bimbingan PLT, dan
 - 7) Penyusunan Laporan
4. Praktik Persekolahan

Berbagai macam kegiatan dilaksanakan oleh Mahasiswa selama melaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing adalah pendampingan Upacara Bendera, Pramuka dan sebagainya

5. Konsultasi Pembuatan Laporan kepada Dosen Pembimbing dan Guru Pembimbing

6. Penyusunan Laporan

Setelah kegiatan PLT selesai, mahasiswa wajib membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban selama kegiatan PLT beserta lampiran-lampirannya

7. Penarikan dan Pelepasan PPL

Kegiatan penarikan dan pelepasan PLT dilaksanakan tanggal 18 November 2017 yang sekaligus sebagai tanda berakhirnya kegiatan PLT di SMK Karya Rini YHI Kowani yang dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa PLT, Dosen Pamong, Koordinator PLT, Guru pembimbing lapangan.

BAB II

PERSIAPAN PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL

A. Persiapan

Sebagai peserta PLT harus memenuhi syarat-syarat sebagai peserta PLT yaitu :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas negeri Yogyakarta Program S1-kependidikan pada semester diselenggarakan PLT.
2. Telah menempuh minimal 110 SKS dengan IPK minimal 2,00
3. Mencantumkan mata kuliah PLT dalam KRS
4. Telah lulus mata pelajaran Mikro dengan nilai minimal B
5. Mahasiswa yang hamil, pada saat keberangkatan dan usia kehamilan tidak lebih dari lima bulan atau 20 minggu.

Visi dari program ini adalah pembentukan calon guru / tenaga kependidikan yang profesional. Melaksanakan kegiatan PLT di sekolah, mahasiswa melakukan kegiatan yang mendukung persiapan PTL baik yang bersifat terstruktur mampu mandiri. Persiapan fisik maupun mental dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang bagaimana kondisi praktik di lapangan dan permasalahan yang mungkin muncul pada waktu pelaksanaan PLT. Adapun persiapan yang dilakukan oleh mahasiswa pratikan PLT UNY 2017 adalah:

1. Pembekalan Praktik Lapangan Terbimbing

Pembekalan Jurusan

Pembekalan ini dilakukan oleh Koordinator PLT jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan PLT. Setelah mengikuti pembekalan, mahasiswa di pecah menjadi kelompok kecil sesuai pemilihan tempat PLT dengan pembagian Dosen Pembimbing Lapangan. Pelaksanaan pembekalan ini menjadi lebih efektif karena diikuti oleh anggota kelompok kecil PLT.

2. Observasi

a.Observasi Lingkungan Sekolah SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta

Observasi lingkungan sekolah di SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta bertujuan agar mahasiswa pratikan lebih mengetahui kondisi fisik dan non fisik sekolah yang akan menjadi tempat pelaksanaan program PLT. Selain itu, mahasiswa pratikan menjadi lebih paham tentang karakteristik perangkat dan elemen yang ada di sekolah tersebut. Observasi lingkungan sekolah ini sangat mendukung dalam proses PLT, sehingga mahasiswa praktikan bisa mengetahui kekurangan dan dapat menentukan pembenahan apa yang seharusnya dilakukan.

Observasi dilakukan pada tanggal 24 Februari 2017, observasi dilakukan ruang guru, TU, perpustakaan, ruang pelaksanaan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), Laboratorium, dan elemen-elemen lain yang berada di SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta.

b.Observasi Kegiatan Mengajar di SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta

Observasi kegiatan belajar mengajar (KBM) bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang situasi dan kondisi pembelajaran dikelas. Ada beberapa hal yang mahasiswa pratikan dapatkan yaitu bagaimana proses pembelajaran, seperti teknik penguasaan materi,penguasaan kelas pada saat pembelajaran teori, metode pembelajaran, cara memotivasi siswa, penggunaan media dan lain sebagainya. Observasi kelas dilakukan secara berkelompok sesuai dengan bidang studinya masing-masing.. Teknis pelaksanaannya adalah mahasiswa pratikan masuk kelas yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) tersebut. Dari observasi KBM tersebut mahasiswa pratikan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan bekal dalam PLT.

c.Observasi Kondisi Sekolah di SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta

Kegiatan observasi meliputi :

- a. Observasi perangkat proses belajar mengajar yang terdiri dari Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penilaian dan media pembelajaran
- b. Observasi penampilan guru dikelas yang meliputi cara membuka pelajaran, penyajian materi, metode pembelajaran yang digunakan, penggunaan bahasa, penggunaan waktu, gerak, cara memotivasi siswa, teknik bertanya, teknik penguasaan kelas, penggunaan media, bentuk dan cara belajar pelajaran.
- c. Observasi perilaku pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran.
- d. Observasi sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

3. Pembekalan Mikro

Sebelum menjalani PLT di sekolah, setiap mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah pengajaran mikro yang merupakan salah satu pra syarat mengikuti mata kuliah PLT. Pengajaran mikro pada tahun 2017 dilaksanakan disemester 7.

4. Persiapan Mengajar

Persiapan mengajar dilakukan sebelum praktik mengajar. Persiapan tersebut memuat:

- a. Menentukan dan mempelajari materi yang akan disampaikan
- b. Menentukan metode belajar yang tepat yaitu dengan system ceramah, diskusi, presentasi, Tanya jawab, demonstrasi, pre test dan post test.
- c. Menyusun materi pelajaran.
- d. Membuat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), Silabus, RPP, dan Modul dan kisi-kisi pertanyaan test.
- e. Konsultasi persiapan mengajar kepada guru pembimbing

B. Pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT)

1. Persiapan Kegiatan Praktik Mengajar

Konsultasi kepada guru pembimbing mengenai :

a. Pembuatan Silabus

Pembuatan silabus dilakukan untuk mempermudah mahasiswa dalam membuat RPP. Dalam pembuatan silabus, mahasiswa mengacu pada Kurikulum 2013. Kompetensi Inti (KI) sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas:

- a) Kompetensi Inti (KI) sikap spiritual;
- b) Kompetensi Inti (KI) sikap sosial;
- c) Kompetensi Inti (KI) pengetahuan; dan
- d) Kompetensi Inti (KI) keterampilan.

Kompetensi Inti (KI) selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Kompetensi Dasar dan ruang lingkup materi yang bersifat spesifik untuk setiap mata pelajaran. Selain untuk pengembangan Kompetensi Dasar (KD) Kompetensi Inti juga merupakan rujukan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP.

b. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pembuatan RPP dilakukan untuk mempermudah mahasiswa dalam proses mengajar di kelas yaitu dari membuka pelajaran, mengisi dan menutup pelajaran di kelas. Komponen RPP meliputi :

- 1) Standar kompetensi ini berdasarkan pada tujuan dari pokok pembahasan yang telah ditentukan dalam GBPP.
- 2) Kompetensi dasar disusun berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang ada dalam GBPP. Kompetensi dasar ini merupakan yang diharapkan akan terjadi perubahan tingkah laku siswa setelah pelaksanaan proses belajar mengajar.
- 3) Materi pokok berisi tentang yang akan diajarkan.
- 4) Alokasi waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi.
- 5) Tujuan pembelajaran merupakan harapan keberhasilan dalam penyampaian pembelajaran.
- 6) Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan dalam penyampaian pembelajaran

- 7) Indikator merupakan harapan dari tujuan pembelajaran dari materipokok.
- 8) Kegiatan belajar mengajar berisi tentang pendekatan, metode yang digunakan dan uraian kegiatan pokok untuk setiap materi pokok.
- 9) Media pembelajaran, dengan tujuan mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan
- 10) Uraian materi berisi materi pembelajaran yang sedang diajarkan secara singkat dan logis dengan contoh yang realistik.
- 11) Instrument penilaian adalah alat penilaian yang merupakan jenis penilaian.
- 12) Referensi berisi informasi tentang pustaka bahan yang digunakan dalam pembelajaran

c. Praktik Mengajar di Kelas

Setelah serangkaian persiapan pembelajaran dikelas dilaksanakan, maka mahasiswa dapat melakukan praktik mengajar di dalam kelas. Program praktik mengajar dikelas dilakukan dengan tujuan agar pratikan dapat menyampaikan materi yang telah direncanakan kepada peserta didik. Dalam Kesempatan ini Mahasiswa mengajar dikelas X Tata Busana, X Perhotelan 1 dan XI Perhotelan 2, Secara keseluruhan, praktik mengajar sebanyak 9 kali pertemuan yang rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Secara garis besar, kegiatan pembelajaran dalam setiap kali pertemuan memuat kegiatan sebagai berikut :

1) Pembukaan

Kegiatan pembuka meliputi membuka pelajaran dengan salam, absensi siswa, mengingatkan materi yang pada pertemuan sebelumnya dan mengkaitkan hal-hal berhubungan dengan materi yang akan disampaikan.

2) Pelaksanaan Pembelajaran

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu menjelaskan materi yang telah direncanakan dalam RPP kepada peserta didik. Menggunakan media pembelajaran berupa *powerpoint*, *video* dan beberapa media lainnya. *Powerpoint* digunakan karena media ini memuat tulisan, gambar, sehingga maksud yang ingin disampaikan mahasiswa pratikan dapat diterima oleh peserta didik.

Sedangkan *video* digunakan agar peserta didik dapat lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Metode yang digunakan mahasiswa pratikan yaitu Diskusi, Tanya jawab dan ceramah.

3) Menyimpulkan Materi Pembelajaran

Menyimpulkan materi dilakukan agar siswa dapat mengingat kembali pokok materi yang telah disampaikan.

4) Memberi Evaluasi

Untuk mengukur seberapa tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan evaluasi berupa *post test* maupun pekerjaan rumah (PR). Didalamnya pelaksanaannya kegiatan evaluasi yang sering dilakukan adalah memberikan Pekerjaan Rumah (PR).

5) Menutup Pelajaran

Kegiatan yang dilakukan saat menutup pelajaran meliputi berdoa jika jam tersebut merupakan jam pelajaran terakhir dan salam.

2. Umpan Balik Pembimbing

Umpan balik dari guru pembimbing dilakukan setiap proses pembelajaran berakhir, hal ini dimaksudkan agar pada proses pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik dan untuk sejauh mana perkembangan pratikan dalam pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing.

3. Pendampingan Guru Mengajar

Pada saat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, Mahasiswa didampingi oleh guru pembimbing. Guru pembimbing PLT sepenuhnya memberi tanggung jawab kelas kepada mahasiswa.

4. Bimbingan PLT

Bimbingan PLT dilaksanakan sebelum mengajar yang meliputi pembuatan Silabus, KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), Materi Ajar, Media Pembelajaran dan laporan PLT Individu. Kemudian mahasiswa pratikan melakukan revisi untuk kemudian diberikan kepada Guru Pembimbing PLT untuk dinilai.

5. Penyusunan Laporan Individu

Penyusunan laporan dilakukan dengan cara mengkonsultasikan dengan guru pembimbing sehingga tersusun laporan yang maksimal dan berkualitas. Adapun hasil yang dimaksud adalah hasil laporan beserta jadwal kegiatan mengajar, Silabus, KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), RPP, Materi Ajar, Media Pembelajaran dan perangkat lain.

C. Analisis Pelaksanaan dan Refleksi

1. Pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT)

Secara umum dalam pelaksanaan PLT tidak mengalami hambatan yang berat justru mendapatkan pengalaman yang berharga dan dapat belajar menjadi tenaga pendidik yang profesional dibidangnya. Semua itu tak luput atas bimbingan Bapak Dartono S.Pd serta arahan dari seluruh civitas akademika SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta. walaupun begitu tetap ada Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PLT sebagai berikut :

a. Hambatan dari siswa

Kemampuan guru dalam menguasai materi dan metode penyampaian salah satu hal yang penting proses pembelajaran yang mana diharapkan agar terjadi transfer ilmu dan keterampilan dari guru untuk siswa. Semua itu tidak akan terlaksana dan berjalan lancar apabila siswa kurang merespon dan serius terhadap program mengajar yang didapatkan. Dalam hal ini, sebelum guru mengajar harus mengingatkan siswa apa tujuan mereka datang ke sekolah. Di dalam pembelajaran yang dilakukan mahasiswa praktikan tentu ada beberapa peserta didik yang kurang berpartisipasi di dalam pembelajaran. Namun hal tersebut merupakan tantangan yang harus di hadapi dan diselesaikan oleh mahasiswa praktikan.

b. Hambatan dari sekolah

Penyampaian materi akan lebih menarik apabila didukung dengan media yang memadai, seperti materi atau buku yang digunakan. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang diberikan oleh sekolah merupakan faktor yang penting dalam

proses belajar mengajar di dalam kelas, namun di SMK KARYA RINI ini sarana dan prasarana seperti buku masih kurang memadai.

2. Refleksi

Dengan melihat beberapa permasalahan diatas, pratikan mencoba memecahkan masalah dengan :

- a. Memberikan materi dengan media bahan yang menarik perhatian peserta didik sehingga menimbulkan minat belajar peserta didik.
- b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya sebelum atau setelah materi selesai.
- c. Memaksimalkan media pembelajaran yang ada dengan media pembelajaran lainnya seperti pemberian *powerpoint*, Video dan media pembelajaran lainnya.

Dari hasil pelaksanaan PLT di SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, mahasiswa pratikan memperoleh pengalaman antar lain :

- a. Selama di sekolah, mahasiswa memperoleh gambaran nyata tentang dunia pendidikan yang sebelumnya hanya diketahui dari teori-teori yang didapat pada saat kuliah.
- b. Selama kegiatan PLT berlangsung, mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh pada masa kuliah.
- c. Mahasiswa dapat langsung berhadapan dan berinteraksi dengan peserta didik dalam kelas pada saat pembelajaran.
- d. Kegiatan PLT memberikan bekal yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai calon pendidik.
- e. Mahasiswa dapat mengetahui masalah-masalah apa saja yang dapat terjadi di dalam kelas dan dapat menyelesaikannya selama proses pembelajaran.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Praktek Lapangan Terbimbing (PLT) di SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta banyak memberi manfaat serta pengalaman bagi mahasiswa, dalam hal pembelajaran di kelas baik dalam penyampaian materi, metode, media, dan pengelolaan kelas. Dengan pelaksanaan kegiatan PLT mahasiswa dituntut secara fisik maupun mental dalam mempersiapkan diri untuk mengajar di kelas. Pelaksanaan PLT inilah yang akan menjadikan mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik yang profesional dan memperoleh pengalaman yang nyata disekolah.

Berdasarkan hasil secara keseluruhan kegiatan selama melaksanakan PLT observasi serta data-data yang telah terkumpul dari hasil Praktik Lapangan Terbimbing (PLT), maka mahasiswa pratikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta sebagai calon pendidik.
2. Dengan adanya Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) akan membantu mahasiswa dalam mengenal situasi dan kondisi lingkungan kependidikan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.
3. Melalui Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) mahasiswa akan mengenal dan membentuk sikap-sikap yang harus dimiliki seorang tenaga pendidik yang baik serta dapat merasakan bagaimana suka dan dukanya menjadi seorang pengajar.
4. Dengan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara langsung dan kegiatan persekolahan yang menunjang proses belajar mengajar serta menerapkan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pendidik.

5. Dengan adanya Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) memberikan kesempatan bagi mahasiswa pratikan untuk menerapkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan yang dipelajari di perguruan tinggi yang melaksanakan praktik mengajar di sekolah.
6. Untuk menjadi seorang pendidik yang baik dan berhasil tidak hanya dengan menguasai materi dan keterampilan saja tetapi juga ada faktor lain yang mendukung seperti : persiapan mengajar, sikap percaya diri tampil di depan kelas, dan penguasaan kelas.
7. Mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mengetahui secara langsung kegiatan persekolahan yang sebenarnya, kegiatan belajar mengajar dan dapat mengenal berbagai karakter atau kepribadian siswa serta bagaimana menjalin kerjasama yang saling menguntungkan baik dengan kepala sekolah, guru, karyawan, dan para siswa SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta.

B. SARAN

1. Bagi Sekolah

- a. Kerjasama antara guru yang satu dengan yang lain dalam satu mata pelajaran lebih ditingkatkan sehingga PLT tidak mengalami kebingungan dalam menyampaikan materi pada peserta didik.
- b. Pemberian pembimbing pada saat mahasiswa obeservasi, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan materi yang akan diajarkan
- c. Referensi buku perpustakaan diperlengkap dengan yang baru sehingga dapat menarik peserta didik untuk membaca di perpustakaan.

2. Bagi Universitas

- a. Materi yang di kampus hendaknya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa SMK, sesuai dengan kurikulum yang berlaku sehingga pratikan dapat menjalankan PLT dengan optimal.
- b. Koordinasi bimbingan dan pengarahan agar lebih diintensifkan dan fokus pada masalah-masalah real yang dihadapi mahasiswa PLT dilapangan

3. Bagi mahasiswa

- a. Mahasiswa PLT hendaknya membina komunikasi yang baik dengan warga sekolah baik guru, karyawan dan peserta didik.
- b. Mahasiswa pratikan hendaknya mencari referensi buku ditempat lain. Sehingga materi yang diajarkan lebih lengkap.
- c. Mahasiswa pratikan dalam penyampaian materi dengan kalimat yang dapat dimengerti oleh peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- LPM. 2004. Panduan Kuliah Kerja Nyata. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- UPPL.1997. Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan. Yogyakarta : IKIP Yogyakarta
- UPPL.1997. Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan. Yogyakarta : UPPL Universitas Negeri Yogyakarta
- UPPL. 2010. Panduan KKN-PPL. Yogyakarta : UPPL Universitas Negeri Yogyakarta
- UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

LAMPIRAN



LEMBAR OBSERVASI
KONDISI SEKOLAH

NPma.2
Untuk
Mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH	: SMK Karya Rini YHI KOWANI	NAMA MAHASISWA	Lina Nur Savangah
ALAMAT SEKOLAH	: JL. Laksda Adi Sucipto 86 Depok, Caturtunggal, Depok, Sleman	NOMOR MHS FAK/JUR/PRODI	14401244006 ILMUSOSIAL/PKNH/ PKN

No	Aspek Yang Diamati	Diskripsi Hasil Pengamatan	Keterangan
1.	Kondisi Fisik Sekolah	SMK Karya Rini YHI KOWANI adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang terletak di kota Yogyakarta. Gedung sekolah terletak berdampingan bersama dengan gedung pertemuan, wisma dan museum yang semuanya berada di bawah naungan Yayasan Hari Ibu KOWANI. SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta mempunyai daya tampung 9 kelas yang terbagi untuk 6 jurusan Perhotelan dan 3 Tata Busana.	Gedung sekolah cukup terawat, dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam Kegiatan Belajar Mengajar.
2.	Potensi Siswa	Ada tiga macam potensi siswa yang ditonjolkan di	

		sekolah ini yaitu keterampilan dalam bidang tata busana, tata boga dan perhotelan.	
3.	Potensi Guru	Guru di SMK Karya Rini YHI Kowani berjumlah 29 orang. Sebagian besar guru di SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta sudah memenuhi standar kualifikasi guru yaitu berupa lulusan S1, walaupun masih ada beberapa guru yang merupakan lulusan Diploma.	Secara keseluruhan para guru yang mengajar sudah sesuai dengan bidang yang diampu. Beberapa guru dalam proses mengajukan sertifikasi.
4.	Potensi karyawan	Karyawan berjumlah 7 orang yang menempatkan posisinya sesuai dengan bidang kerja sehingga administrasi berjalan dengan baik	
5.	Fasilitas KBM Media	Media pembelajaran yang digunakan untuk jurusan busana terdiri dari: A. Tata Busana 1. Didalam Kelas - Papan tulis (black board) - LCD dan proyektor - Manaqun yang diletakan di dalam kelas 2. Diluar Kelas	Media yang sudah terpenuhi cukup lengkap dan baik hanya saja untuk lahan dapur kurang efektif karena disatukan dengan ruang <i>house keeping</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - Manaquen yang diletakkan dilab. busana. - Lab.busana di lantai satu terdapat mesin jahit, mesin juki (mesin industry) berjumlah sekitar kurang lebih 33 buah, mesin obras, manaquen, alat-alat pressing dan hunger. - Lab.busana dilantai 3 terdapat kurang lebih 34 mesin jahit manual dan mesin obras. <p>B. Perhotelan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jurusan Perhotelan terdapat dapur untuk praktik, terdapat ruang tata hidang, dan housekeeping serta ruang <i>Front office</i> 	
6.	Perpustakaan	Perpustakaan di SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta cukup baik. Buku-buku yang tersedia di perpustakaan SMK didapat dari dinas, buku kejuruan dari sumbangan. Buku yang ada di	Kondisi ruangan perpustakaan sudah baik, hanya saja siswa tidak diperbolehkan meminjam buku untuk dibawa pulang namun hanya boleh meminjam

		perpustakaan cukup lengkap dan beragam.	untuk dibaca saat di perpustakaan pada jam kosong atau jam istirahat. Letak perpustakaan berada di lantai 2
7.	Laboratorium	1. Di SMK Karya Rini terdapat laboratorium bidang keahlian tata busana yang terdiri dari tiga ruangan. Dua ruangan di lantai satu menggunakan mesin juki lengkap dengan meja potong, meja setrika beserta setrikanya, dan mesin bordir. Satu ruangan di lantai tiga menggunakan mesin manual, lengkap dengan beberapa mesin border dan seterika. Ketiga lab.busana tersedia manaquen (dressform) yang siap dipakai oleh peserta didik SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta. Persediaan mesin jahit disesuaikan dengan banyaknya peserta	Secara keseluruhan ketersediaan alat penunjang kegiatan pembelajaran di laboraturium Tata Busana maupun Perhotelan dalam kondisi baik. sehingga dapat mendukung Kegiatan Belajar Mengajar Peserta Didik.

		<p>didik setiap kelas (rata-rata siswa 30-34) sehingga setiap peserta didik dapat menggunakan 1 mesin jahit untuk mengerjakan tugas praktikan</p> <p>2. Laboratorium</p> <p>Laboratorium bidang Keahlian Perhotelan sudah cukup memenuhi kriteria, namun ada beberapa fasilitas yang kurang memadai seperti Lab. Produksi (dapur) yang masih disatukan Lab. housekeeping atau laundry maka ketika akan diadakan praktik harus ditentukan terlebih dahulu jadwalnya sehingga tidak bertabrakan</p> <p>penggunaannya Untuk alat praktik sudah cukup memenuhi kebutuhan praktik. Seperti Lab. tata hidang memiliki fasilitas yang baik, walaupun Lab. tata hidang menjadi satu dengan Lab. <i>front office</i>, namun selama ini pembelajaran tetap</p>	
--	--	--	--

		<p>berjalan secara kondusif.</p> <p>3. Laboratorium Komputer di SMK KARYA RINI dapat dikatakan dalam kondisi baik, sehingga dapat digunakan untuk menunjang Kegiatan pembelajaran dan memenuhi jumlah peserta didik pada setiap kelasnya.</p>	
8.	Bimbingan Konseling	<p>Bimbingan konseling diampu oleh satu guru. Ruang BK berada di lantai 3 dalam satu ruangan dengan ruang osis. BK mempunyai program tahunan, semesteran, bulanan, harian dan kunjungan rumah. guru BK melakukan pembinaan kepada peserta didik jika memperoleh laporan dari guru wali kelas atau guru bidang studi lain tentang peserta didik, dan melakukan pembinaan didalam kelas. Namun guru BK juga menerima peserta didik di luar kelas yang ingin bercerita tentang permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi atau</p>	<p>Fasilitas yang terapat pada ruang BK sudah lengkap. Selain itu juga terdapat ruang tamu, suasana di ruang BK juga cukup baik, namun ruang BK dirasa kurang mendapat privasi karena menyatu dengan ruang osis yang hanya dibatasi oleh sekat yang terbuat dari kayu.</p>

		nasehat dengan guru BK	
9.	Bimbingan Belajar	Bimbingan belajar ditunjukkan pada siswa kelas XII sebagai sarana pendalaman materi ujian akhir.	Bimbingan belajar juga difungsikan sebagai konsultasi dalam kesulitan belajar terutama kelas XII dalam menghadapi UNBK.
10.	Ekstrakurikuler	Ekstrakurikuler yang ada di SMK Karya Rini YHI KOWANI ada beberapa, namun yang wajib diikuti oleh siswa kelas X dan XI adalah Pramuka. Selain itu ada juga ekstrakurikuler lain seperti conversation dan modeling	Ekstrakurikuler yang ada di sekolah menjadi sarana peserta didik untuk mengembangkan bakat.
11.	Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)	Untuk OSIS di SMK Karya Rini kurang berjalan dengan baik. walaupun sudah dipilih pengurusnya dan sudah ada Guru Pembina. Dalam hal ini OSIS kurang berperan dalam membuat program-program yang di tujukan untuk siswa-siswi SMK Karya Rini.	di dalam ruang OSIS terdapat meja dan kursi yang biasanya digunakan untuk rapat dan juga ada papan struktur Organisasi OSIS.
12.	Organisasi dan Fasilitas UKS	UKS di sekolah ini sudah mempunyai ruang khusus, yang terdiri dari 2 tempat tidur, kotak obat, timbangan berat badan pengukur tinggi	Fasilitas UKS sangat memadai, dengan adanya dokter yang menjaga UKS setiap hari kamis sehingga

		<p>badan, tes mata. Setiap hari Kamis diadakan pemeriksaan oleh dokter, pengadaan dokter ini atas kerjasama sekolah dengan Komite. Walaupun mempunyai ruang khusus tetapi ruangan ini cukup sempit karena berada dalam satu ruangan dengan ruang Guru. Ruangan-ruangan ini hanya dibatasi dengan penyekat saja.</p>	<p>kesehatan seluruh peserta didik, guru, maupun karyawan di sekolah terjaga.</p>
13.	Administrasi	<p>Administrasi data dan info terkait dengan peserta didik sudah lengkap.</p>	<p>Kurangnya sarana dan prasarana dalam bidang Administrasi seperti loket pembayaran SPP siswa.</p>
14.	Karya Tulis Ilmiah Remaja	<p>Karya Tulis Ilmiah Remaja di SMK Karya Rini sudah ada, tetapi belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum adanya pembimbing tetap</p>	
15.	Karya Ilmiah Guru	<p>Karya tulis ilmiah guru sudah ada dan berjalan dengan maksimal, itu terlihat dari sebagian besar guru ikut berpartisipasi dalam menulis karya tulis ilmiah baik dalam tingkat kota, provinsi, maupun nasional.</p>	<p>Pembuatan karya tulis ilmiah guru merupakan salah satu program kerja di SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta yang diadakan oleh dinas maupun dana tersendiri</p>

			dari pihak sekolah.
16.	Kesehatan Lingkungan	Keadaan lingkungan di sekitar sekolah tersebut cukup sehat, sudah terdapat beberapa tempat sampah dan TPS (tempat pembuangan sampah). Selain itu juga kebersihan kamar mandi (WC) sudah baik.	Penghijauan disekitar lingkungan sekolah cukup baik. Namun karena ketersediaan lahan yang kurang sehingga penghijauan dilakukan kurang maksimal, walaupun begitu kondisi sekolah sudah cukup nyaman
17.	Fasilitas Olahraga	untuk fasilitas Olahraga seperti lapangan Sepak Bola, lapangan bola voli serta lapangan bola basket belum tersedia di SMK Karya Rini. Hal ini disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas. Namun untuk fasilitas penunjang lainnya sudah tersedia dan dalam kondisi yang cukup baik.	
18.	Tempat Ibadah	Di sekolah tersebut belum terdapat tempat Ibadah (mushola), namun selama ini kegiatan Ibadah bagi yang muslim dapat dilakukan di ruang serba guna yang difungsikan juga sebagai mushola.	untuk fasilitas ibadahnya sudah baik, terdapat beberapa mukena dan sajadah. Selain itu juga suasana tempat ibadah nyaman.

Sleman, November 2017

Koordinator PPL



Rakhayu Endriyani, S.Pd
NP 19590308 198602 2 004

Mahasiswa Praktik Lapangan
Terbimbing



Lina Nur Savangah
NIM 14401244006



LEMBAR OBSERVASI
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN
OBSERVASI PESERTA DIDIK

Universitas Negeri Yogyakarta

NPma.1
Untuk
Mahasiswa

NAMA MHS	LINA NUR SAVANGAH	WAKTU	09.00-11.00 WIB
NO. MHS	14401241065	TEMPAT PRAKTIK	SMK KARYA RINI YHI KOWANI
TGL OBSERVASI	16 MARET 2017	FAK/JUR/PRODI	ILMU SOSIAL/PKNH/PKN

NO	Aspek Yang Diamati	Diskripsi Hasil Pengamatan
A.	Pengamatan Pelatihan / Pembelajaran	
1.	Kurikulum	Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri atas tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus. Kurikulum yang dilaksanakan SMK Karya Rini YHI KOWANI Yogyakarta sudah sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Untuk tahun ajaran 2017/2018 telah berlaku kurikulum baru untuk kelas X dan kelas XI yaitu kurikulum 2013, dan kelas XII masih menggunakan kurikulum KTSP.
2.	Silabus	Rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan

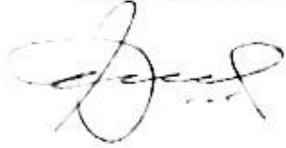
		sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam materi/pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.
3.	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	Rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. RPP disusun untuk satu Kompetensi Dasar (KD).
B. Proses Pelatihan / Pembelajaran		
1.	Membuka pelajaran	Dalam proses membuka pelajaran guru mengawali dengan salam. Disini guru juga sangat berperan aktif dalam mengulas kembali materi-materi yang telah diberikan sebelumnya,
2.	Penyajian Materi	Penyajian Materi terstruktur sesuai dengan RPP.
3.	Metode Pembelajaran	Metode yang digunakan yaitu metode diskusi dan Presentasi.
4.	Penggunaan Bahasa	Dalam proses KBM guru lebih baik dalam penggunaan bahasa. Mudah dipahami dan jelas. Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi adalah Bahasa Indonesia.
5.	Penggunaan Waktu	Waktu sangat efektif digunakan dalam pembelajaran
6.	Gerak	Siswa berperan aktif dan selalu terjadi komunikasi yang baik antar guru dan siswa
7.	Cara Memotivasi	Siswa Siswa sangat termotivasi dari media pembelajaran yang digunakan dan siswa diberi tanggung jawab masing-masing dalam setiap

		penugasan sehingga antusias dalam proses KBM.
8.	Teknik Bergaya	Guru menyampaikan ilustrasi dengan memberikan umpan/clue agar siswa dapat merespon pertanyaan tersebut.
9.	Teknik Penguasaan Kelas	Kelas terkondisikan dengan baik dari awal pembukaan pelajaran.
10.	Penggunaan Media	Dalam penggunaan media untuk KBM teori sudah cukup. Seperti power
11.	Bentuk dan Cara Evaluasi	Cara evaluasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa dan sesekali melihat hasil pekerjaan siswa.
12.	Menutup Mata	Pelajaran Dengan memberi tugas dan evaluasi sebentar tentang materi yang telah disampaikan sebelumnya.
C.	Perilaku Peserta Didik (Diklat)	
1.	Perilaku siswa dalam kelas	<ul style="list-style-type: none"> -Siswa sangat aktif dalam kelas melakukan pekerjaannya dengan baik - Terkadang siswa kurang memperhatikan guru karena asik mengerjakan tugas mereka masing masing, sehingga beberapa materi kurang tersampaikan.
2.	Perilaku siswa diluar kelas	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa senang bergaul dengan\ siapapun, tidak ada perbedaan antara kelas X, XI, dan XII. - Kurang ramah terhadap teman yang berbeda jurusan - Siswa sangat ramah, mudah untuk diajak ngobrol.

Sleman ,

2017

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran



Dartono, S.Pd
NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan
Terbimbing



Lina Nur Savangah
NIM 14401244006



KARTU BIMBINGAN PLT

PUSAT PENGEMBANGAN PPL DAN PKL

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP) UNY

TAHUN 2017

F04

UNTUK MAHASISWA

Nama Sekolah / Lembaga : SMK KARYA RINI YHI KOWANI
 Alamat Sekolah : Jl. Lakda Adisucipto no 86 Yogyakarta Fax./ Telp. Sekolah : 581171
 Nama DPL PLT : ~~Dr. Rendi Husein, S.Pd~~ Anang Priyanto, S.H. M.Hum.
 Prodi / Fakultas DPL PLT : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum / Universitas Negeri Yogyakarta / ilmu sosial
 Jumlah Mahasiswa PLT : 2 orang

No	Tgl. Kehadiran	Jml Mhs	Materi Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan DPL PLT
1	26 Oktober	2	Monitoring		
2	1 November 2017	2	monitoring		
3	9 November 2017	2	Pelaksanaan pembelajaran		
4	13 November 2017	2	Laporan		

PERHATIAN :
 * Kartu bimbingan PLT ini dibawa oleh mhs PLT (1 kartu utk 1 prodi).
 * Kartu bimbingan PLT ini harap diisi materi bimbingan dan dimintakan tanda tangan dari DPL PLT setiap kali bimbingan di lokasi.
 * Kartu bimbingan PLT ini segera dikembalikan ke PP PPL & PKL UNY paling lambat 3 (tiga) hari setelah penarikan mhs PLT untuk keperluan administrasi.

Mengetahui,
 Kepala PP PPL DAN PKL,

Dr. Sulis Triyono, M.Pd
 NIP. 19580506 198601 1 001



Mengetahui,
 Kepala Sekolah / Lembaga

Sulpanin S.E.M.M.Pd

Ketua Kelompok PLT

R. Zulcham S.



MATRIK PELAKSANAAN PLT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2017

NAMA SEKOLAH : SMK KARYA RINI YHI KOWANI NAMA MAHASISWA : Lina Nur Savangah
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Laksada Adisucipto No 86 NIM : 14401244006
GURU PEMBIMBING : Dartono, S.Pd FAK/JUR/PRODI : FIS/PKN/PKNH
NAMA DOSEN PEMBIMBING : Anang Priyanto, S.H., M.Hum

NO	PROGRAM KEGIATAN PLT	JUMLAH JAM PER MINGGU								JUMLAH JAM
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
I	PEMBUATAN PROGRAM PLT									
	Observasi		8							8
	Menyusun Matriks Program PLT		3	3						6
II	ADMINISTRASI PEMBELAJARAN/GURU									
	a. Membuat Kisi-Kisi Soal Ulangan		1	1	1	1				4
	b. Membuat Soal Ulangan		1	1	1	1				4
III	PEMBELAJARAN KOKURIKULER (Kegiatan Mengajar Terbimbing)									
	1. PERSIAPAN									
	a. Konsultasi		3	2	2	2	2	2	2	15
	b. Mengumpulkan Materi			2	4	4	4	4		20
	c. Membuat RPP			4	4	4	4	4		20
	d. Menyiapkan/Membuat Media			4	4	4	4	4		20
	2. MENGAJAR TERBIMBING									
	a. Praktik Mengajar di Kelas			6	6	6	6	6	6	36
	b. Team Teaching			6	6	6	6	6	6	36
	c. Penilaian dan Evaluasi			3	3	3	3	3	3	18
IV	PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER (Kegiatan Non Mengajar)									
	1. Pendampingan Pramuka						2	2	2	6
V	KEGIATAN SEKOLAH									
	1. Sholat Dzuhur Berjamaah		1	1	1	1	1	1	1	8
	2. Upacara atau Apel		1			1		1	1	5
	3. Upacara Bendera Hari Sumpah Pemuda					2				2
	4. Upacara Bendera Hari Kesaktian Pancasila			2						2
	5. Piket Sekolah			2	2	2	2	2	2	12
	6. Piket Salaman dan Kegiatan Literasi		3	3	3	3	3	3	3	21
	7. Pengajian (ESQ)					1	1	1	1	4
	8. Sholat Jumat Berjamaah						1	1	1	3
VI	TAMBAHAN									
	a. Ulangan Tengah Semester			30						30
VII	INSIDENTAL									
	a. Kunjungan Dosen Pamong						2			2
	b. Kunjungan DPL						2			2

VIII		PEMBUATAN LAPORAN PPL													
		1. Persiapan								3					3
		2. Pelaksanaan									1				1
		3. Evaluasi										2			2
JUMLAH JAM PER MINGGU			19	40	35		38	42	44	41	30				287

Sleman, November 2017



Dosen Pembimbing Lapangan

Anang Priyanto, SH., M.Hum
NIP. 19580910 198503 1 003

Mahasiswa

Lina Nur Savangah
NIM. 14401241065



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

CATATAN HARIAN PLT

TAHUN:2017

NAMA MAHASISWA : Lina Nur Savangah

NAMA SEKOLAH : SMK Karya Rini YHI KOWANI

NO. MAHASISWA : 14401244006

ALAMAT SEKOLAH : Jl. Laksda Adisucipto No. 86 Sleman, DIY

FAK/JUR/PR.STUDI : FIS/PKNH/Pendidikan Kewarganegaraan

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
1.	Sabtu, 16 September 2017	10.00 - 13.00	Penyerahan PLT	Sebanyak 12 mahasiswa PLT mengikuti kegiatan penyerahan oleh DPL kepada pihak sekolah, yang diwakili oleh kepala sekolah dan diterima baik oleh pihak sekolah.	

2.	Senin, 18 September 2017	06.30 – 06.45	Piket Bersalaman	12 Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan guru piket di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi.	
		06.45- 07.00	Persiapan Upacara atau apel pagi	Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan apel pembinaan atau upacara.	
		07.00 – 07.30	Upacara atau Apel Pagi	Kegiatan upacara berlangsung dengan khidmat dan lancar, diikuti oleh seluruh siswa, guru, karyawan, serta 12 mahasiswa PLT UNY.	
3.	Selasa, 19 September	06.30 – 06.45	Piket Salaman	12 Mahasiswa PLT	

	2017			menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di Kelas	Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		09.00 – 10.00	Observasi dan mengikuti pembelajaran	Konsultasi administrasi mengajar diikuti oleh 1 mahasiswa PLT dan 1 orang guru	
4.	Rabu, 20 September	06.30 - 06.45	Piket Bersalaman	Mahasiswa PLT menyambut	

	2017			<p>kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi</p>	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di Kelas	<p>Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.</p>	
		07.00 – 09.00	Administrasi Kelas	<p>Mengurus Administrasi Kelas, Dibantu oleh 2 orang Tata Usaha</p>	
		09.00 – 11.00	Observasi	<p>Mengikuti pengarahan dan 1 orang guru pembimbing untuk kegiatan mengajar di kelas</p>	

5.	Jum'at, 22 September 2017	06.30 – 06.45	Piket Bersalaman	Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di Kelas	Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		07.00 – 08.30	Mendampingi Kegiatan Belajar Mengajar	Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT dan 1 orang guru PKN untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dikelas XI Akomodasi Perhotelan 2	

		10. 15- 11.45	Mendampingi pembelajaran	Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT dan 1 orang guru PKN untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dikelas XI Tata Busana	
6.	Sabtu, 23 September 2017	06.30 – 06.45	Piket Bersalaman	Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di Kelas	Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	

7.	Senin, 25 September 2017	09.00-11.00	Administrasi mengajar	Mempersiapkan Silabus dan Kompetensi dasar untuk kegiatan mengajar kelas XI
		13.00 – 15.00	Piket Harian	Diikuti oleh 2 Mahasiswa PLT untuk mengisi daftar hadir, menyapu ruangan, mematikan kipas angin dan membersihkan bascamp.
		06.30 – 06.45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi
		06.45 – 07.00	Persiapan upacara atau apel pagi	Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta kesiapan

8.	Selasa, 26 September 2017	07.00 - 08.00	Upacara atau apel pagi	peserta didik untuk mengikuti kegiatan apel pembinaan atau upacara. Kegiatan upacara berlangsung dengan khidmat dan lancar, diikuti oleh seluruh siswa, guru, karyawan, serta 12 mahasiswa PLT UNY.	
		09.00 - 12.00	Mempersiapkan Materi	Mencari materi diperpustakaan maupun di Internet yang akan disusun menjadi bahan pembelajaran untuk kelas XI	
			Kuliah	Pada hari selasa saya ijin untuk tidak datang ke sekolah di karenakan masih ada kuliah untuk semester 7.	

9.	Rabu, 27 September 2017	06.30 – 06.45	Piket Bersalaman	Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di Kelas	Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		07.00 - 09.00	Membuat media dan perangkat pembelajaran	Memperiapkan media dan perangkat pembelajaran untuk materi sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kelas XI	

10.	Kamis, 28 September 2017	09.00-12.00	Membuat RPP	Mahasiswa membuat RPP yang dipersiapkan sebelum mengajar. Materi yang disiapkan yaitu sistem pertahanan dan keamanan untuk kelas X
		13.00 – 15.00	Membuat media dan perangkat pembelajaran	Mempersiapkan media dan perangkat pembelajaran untuk materi sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kelas X
		06.30 - 06.45	Piket Bersalaman	Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi

		06.45 – 07.00	Mendampingi kegiatan Literasi di kelas	Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		07.00 – 08.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan Pembelajaran dilakukan dikelas X Tata busana dengan materi pelajaran Sistem Pertahanan dan Keamanan. Kegiatan yang dilakukan penyampaian materi, melakukan diskusi dan presentasi yang berjumlah 5 kelompok.	
		09.00 – 10.30	Bimbingan Mengajar dan Konsultasi	Kegiatan ini dilakukan dengan Guru pembimbing, yaitu	

				<p>mengevaluasi mengenai pembelajaran di dalam kelas, cara mengajar dan metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Lalu melakukan konsultasi mengenai Kegiatan Belajar Mengajar.</p> <p>Kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas X AP 1 dengan materi Sistem Pertahanan dan Keamanan. Kegiatan yang dilakukan penyampaian materi, melakukan diskusi dan presentasi yang berjumlah 7 kelompok.</p>	
11.	Jumat, 29 September	11.00 – 12.30	Kegiatan Belajar Mengajar		
		06. 30- 06.45	Piket salaman	Mahasiswa PLT menyambut	

	2017			<p>kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi</p>	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di Kelas	<p>Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.</p>	
		07.00 – 08.30	Kegiatan Belajar Mengajar	<p>Kegiatan Pembelajaran di lakukan di kelas XI Akomodasi perhotelan 2 dengan materi Sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Kegiatan yang dilakukan adalah penyampaian materi, Diskusi</p>	

		10.15 – 11.45	Pendampingan Kegiatan Belajar Mengajar	<p>dam Presentasi</p> <p>Melakukan pendampingan Kegiatan Belajar Mengajar di kelas XI Tata Busana dengan materi Sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Kegiatan yang dilakukan adalah penyampaian materi, Diskusi dan Presentasi</p>	
12.	Sabtu, 30 September 2017	06.30 - 06.45	Piket Bersalaman	Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di Kelas	Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan	

				sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		09.00 – 11.00	Input Nilai	Menilai siswa pada setiap pertemuannya, dicatat ke lembar penilaian	
		13.00- 15.00	Piket Harian	Diikuti oleh 2 Mahasiswa PLT untuk mengisi daftar hadir, menyapu ruangan, mematikan kipas angin dan membersihkan bascamp.	
13.	Minggu, 1 Oktober 2017	07.00- 08.00	Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Mahasiswa PLT mengikuti upacara peringatan hari kesaktian pancasila.	

14.	Senin, 2 Oktober 2017	07.15 - 07.30	Mempersiapkan kelas	Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.
		07.30 – 08.30	Mengawasi ujian	Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Pendidikan Agama. Siswa mengerjakan ujian dengan tertib.
		08.45 – 09.00	Mempersiapkan kelas	Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk

		09.00 – 10.00	Mengawasi ujian	<p>mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.</p> <p>Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian PPKn. Siswa mengerjakan ujian dengan tertib.</p>	
		10.15 – 10.30	Mempersiapkan kelas	<p>Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.</p>	
		10.30 – 11.30	Mengawasi ujian	<p>Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian</p>	

15.	Selasa, 3 Oktober 2017	07.15 – 07.30	Mempersiapkan kelas	tengah semester dengan materi ujian Bahasa Indonesia. Siswa mengerjakan ujian dengan tertib. Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.	
		07.30 – 08.30	Mengawasi ujian	Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Pendidikan Jasmani siswa mengerjakan ujian dengan tertib.	
		09.00 - 12.00	Takziah	Takziah di kedaiman ibu atik,	

16.	Rabu, 4 Oktober 2017	07.15 – 07.30	Mempersiapkan kelas	salah satu guru di smk karya rini. Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghibau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.	
		07.30 – 08.30	Mengawasi ujian	Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Seni Budaya, siswa mengerjakan ujian dengan tertib.	
		08.45 – 09 .00	Mempersiapkan kelas	Mahasiswa membantu guru pengawas untuk	

		09.00 – 10.00	Mengawasi ujian	<p>mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.</p> <p>Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Sejarah Indonesia, siswa mengerjakan ujian dengan tertib.</p>	
		10.15 – 10.30	Mempersiapkan kelas	<p>Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.</p>	

		10.30 – 11.30	Mengawasi ujian	Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Sim & Kom Digital, siswa mengerjakan ujian dengan tertib.	
17.	Kamis, 5 Oktober 2017	07.15 – 07.30	Mempersiapkan kelas	Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.	
		07.30 – 08.30	Mengawasi ujian	Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian IPA Terapan	

		08.45 – 09.00	Mempersiapkan kelas	<p>untuk kelas AP dan Desain Busana untuk kelas TB, siswa mengerjakan ujian dengan tertib.</p> <p>Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.</p>	
		09.00 – 10.00	Mengawasi ujian	<p>Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Kepariwisataaan untuk kelas AP dan Desain Busana untuk kelas TB siswa mengerjakan ujian dengan</p>	

18.	Jumat, 6 Oktober	10. 15 – 10.30	Mempersiapkan kelas	tertib. Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.
		10. 30 – 11.30	Mengawasi ujian	Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Pengetahuan Bahan / Busana (Custom mafe) untuk kelas TB dan Komunikasi Industri untuk kelas AP, siswa mengerjakan ujian dengan tertib.
		10.15 – 10.30		
		07.15 – 07. 30	Mempersiapkan kelas	Mahasiswa membantu guru

	2017	07.30 – 08.30	Mengawasi ujian	<p>pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghibau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.</p> <p>Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Dasar Desain / Pembuatan Busana Industri untuk kelas TB dan Sanitasi, Hygiene, dan Kes Kerja untuk kelas AP, siswa mengerjakan ujian dengan tertib.</p>	
		08.45 – 09.00	Mempersiapkan kelas	Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti	

		09.00 – 10. 00	Mengawasi ujian	<p>membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.</p> <p>Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Pembuatan Pola / Membuat Kain Batik untuk kelas TB dan Administrasi Umum untuk kelas AP, siswa mengerjakan ujian dengan tertib.</p>	
		10.15 – 10. 30	Mempersiapkan kelas	<p>Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk</p>	

		10.30 – 11. 30	Mengawasi ujian	<p>mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.</p> <p>Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Teknologi Menjahit / Menghias Busana untuk kelas TB dan Bahasa Jepang / F & B untuk kelas AP, siswa mengerjakan ujian dengan tertib.</p>	
19.	Sabtu, 7 Oktober 2017	07. 15 – 07. 30	Mempersiapkan kelas	<p>Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.</p>	

		07. 30 – 08. 30	Mengawasi ujian	Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Matematika, siswa mengerjakan ujian dengan tertib.	
		08. 45 – 09. 00	Mempersiapkan kelas	Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghimbau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.	
		09.00 – 10. 00	Mengawasi ujian	Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Bahasa Inggris,	

		10. 15 – 10. 30	Mempersiapkan kelas	siswa mengerjakan ujian dengan tertib. Mahasiswa membantu guru pengawas untuk mempersiapkan kelas seperti membacakan peraturan ujian, menghibau untuk mengumpulkan buku dan hp, serta pengecekan nomor ujian.	
		10. 30 – 11. 30	Mengawasi ujian	Mahasiswa bersama guru mengawasi jalannya ujian tengah semester dengan materi ujian Bahasa Jawa, siswa mengerjakan ujian dengan tertib.	
20.	Senin, 9 Oktober 2017	06.30- 06. 45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan	

				guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06. 45 – 07. 00	Persiapan Upacara atau Apel Pagi	Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan apel pembinaan atau upacara.	
		07. 00 – 08. 00	Upacara atau Apel Pagi	Kegiatan upacara berlangsung dengan khidmat dan lancar, diikuti oleh seluruh siswa, guru, karyawan, serta mahasiswa PLT UNY dan PPL UST, yang menjadipembina upacara adalah salah satu guru. Pembinaan berisi mengenai	

				ketertiban siswa.	
		08.00 – 10 . 00	Mempersiapkan Materi	Mencari materi di perpustakaan atau internet untuk bahan materi pelajaran kelas XI tentang lembaga kementerian dan lembaga non kementerian	
		10. 00 – 12. 00	Mempersiapkan Materi	Mencari materi di perpustakaan atau internet untuk bahan materi pelajaran kelas X tentang suprastruktur dan infrastruktur Politik	
21.	Selasa, 10 Oktober 2017	06.30 – 06. 45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	

		06. 45 – 07. 00	Mendampingi Kegiatan Literasi di Kelas	Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		08. 00 – 10. 00	Membuat RPP	Mahasiswa membuat RPP yang dipersiapkan sebelum mengajar. Materi yang disiapkan yaitu lembaga kementerian dan lembaga non kementerian untuk kelas XI	
		10. 00 – 12. 00	Membuat RPP	Mahasiswa membuat RPP yang dipersiapkan sebelum mengajar. Materi yang	

22.	Rabu, 11 Oktober 2017	06.30 – 06.45	Piket salaman	<p>disiapkan yaitu suprastruktur dan infrastruktur Politik untuk kelas X</p> <p>Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi</p>	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di Kelas	Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		08.00 – 10.00	Membuat media dan	Mempersiapkan media dan	

		10. 00- 12. 00	perangkat pembelajaran	perangkat pembelajaran dengan materi lembaga kementerian dan nonkementerian untuk kelas XI	
			Membuat media dan perangkat pembelajaran	Mempersiapkan media dan perangkat pembelajaran dengan materi lembaga kementerian dan nonkementerian untuk kelas XI	
			Membuat media dan perangkat pembelajaran	Mempersiapkan media dan perangkat pembelajaran dengan materi lembaga kementerian dan nonkementerian untuk kelas XI	

23.	Kamis, 12 Oktober 2017	06. 30 – 06. 45	Piket Bersalaman	Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06. 45 – 07. 00	Mendampingi kegiatan Literasi dikelas	Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		07. 00 – 08. 30	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan Pembelajaran dilakukan di kelas X Tata Busana dengan materi Suprastruktur dan Infrastruktur Politik. Pembelajaran dilakukan dengan diskusi dan	

		09.00 – 10.30	Bimbingan Mengajar dan Konsultasi	presentasi. Kegiatan ini dilakukan dengan Guru pembimbing, yaitu mengevaluasi mengenai pembelajaran di dalam kelas, cara mengajar dan metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Lalu melakukan konsultasi mengenai Kegiatan Belajar Mengajar.	
		13. 30 – 15. 00	Pendampingan Kegiatan Belajar Mengajar	Mendampingi Mahasiswa lain mengajar PKN di kelas X Akomodasi Perhotelan 2 dengan materi Suprastruktur dan infrastruktur Politik .Kegiatan yang dilakukan penyampaian materi, Diskusi	

24.	Jumat, 13 Oktober 2017	06.30 – 06.45	Piket Bersalaman	dan Presentasi Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di Kelas	Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		07.00 – 08.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Mahasiswa mendampingi dan membantu mahasiswa lain yang satu jurusan dalam mengajar PKN kelas X	

				<p>Akomodasi Perhotelan 2 dengan materi lembaga kementerian dan non kementerian negara. Kegiatan yang dilakukan penyampaian materi, Diskusi dan Presentasi</p> <p>Mendampingi Mahasiswa lain mengajar PKN di kelas XI Tata Busana dengan materi lembaga kementerian dan non kementerian negara. Kegiatan yang dilakukan penyampaian materi, Diskusi dan Presentasi</p>	
25.	Sabtu, 14 Oktober 2017	10. 15- 11. 45 06. 30 – 06. 45	<p>Pendampingan Kegiatan belajar Mengajar</p> <p>Piket Salaman</p>	<p>Mahasiswa PLT menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi</p>	

		06. 45 – 07. 00	Mendampingi Kegiatan Literasi di Kelas	Siswa mengikuti kegiatan literasi dengan menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		08. 00 – 10. 00	Input Nilai	Menilai siswa pada setiap pertemuannya, dicatat ke lembar penilaian untuk kelas X	
		10. 00 – 12. 00	Input Nilai	Menilai siswa pada setiap pertemuannya, dicatat ke lembar penilaian untuk kelas XI	
		13. 00 – 15. 00	Piket Harian	Diikuti oleh 2 Mahasiswa PLT untuk mengisi daftar	

				hadir, menyapu ruangan, mematikan kipas angin dan membersihkan bascamp.	
--	--	--	--	---	--



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

CATATAN HARIAN PLT

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
26.	Senin, 16 Oktober 2017	06.30 – 06.45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT dan Guru piket menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06.45- 07.00	Persiapan Upacara atau Apel pagi	Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan Apel pembinaan atau Upacara.	
		07.00 – 08.00	Upacara atau Apel Pagi	Kegiatan upacara berlangsung	

		09.00 – 11.00	Mencari Materi Pembelajaran	<p>dengan khidmat dan lancar, diikuti oleh seluruh siswa, guru, karyawan, serta mahasiswa PLT UNY dan PPL UST, yang menjadi pembina upacara adalah salah satu guru. Pembina upacara memberikan arahan mengenai kedisiplinan siswa dalam menggunakan seragam sekolah, karena masih banyak siswa yang belum menggunakan seragam dengan tepat.</p> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam membuat RPP. Kegiatan mencari materi pembelajaran dilakukan di perpustakaan baik</p>	
--	--	---------------	-----------------------------	---	--

				<p>menggunakan sumber buku paket maupun media internet.</p> <p>Dalam kegiatan ini mahasiswa menentukan indikator dan tujuan pembelajaran dari RPP yang akan dibuat. Hal ini dilakukan di awal agar dalam proses pembuatan RPP menjadi mudah</p>	
27.	Selasa, 17 Oktober 2017	12.30 – 14.00	Menentukan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran		
		06.30 – 06.45	Piket Salaman	<p>Mahasiswa PLT dan Guru piket menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi.</p>	
		08.00 – 11.00	Membuat RPP	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk membuat RPP materi yang akan di ajarkan di kelas. RPP</p>	

				<p>di buat per-pertemuan dengan materi untuk kelas X mengenai Lembaga- lembaga Negara dalam UUD NRI 1945.</p> <p>Membuat media ini di maksudkan agar pada saat mengajar dapat lebih menarik perhatian peserta didik sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik.</p>	
28.	Rabu, 18 Oktober 2017	12.30 – 14.30	Membuat Media Pembelajaran	<p>Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi</p> <p>Kegiatan ini dilakukan untuk</p>	
		06.30 – 06.45	Piket Salaman		

29.	Kamis, 19 Oktober 2017	08.30 – 11.30	Membuat RPP	membuat RPP materi yang akan di ajarkan di kelas. RPP di buat per-pertemuan dengan materi untuk kelas XI mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.
		12.30 – 14.30	Membuat media Pembelajaran	Membuat media ini di maksudkan agar pada saat mengajar dapat lebih menarik perhatian peserta didik sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik.
		06. 30 – 06. 45	Piket salaman	Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi

		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di dalam kelas	Mendampingi peserta didik dalam mengikuti kegiatan literasi yaitu menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		07.00 – 08.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas X Tata Busana dengan materi pembelajaran mengenai Lembaga-lembaga Negara dalam UUD NRI 1945.	
		09.00 – 10.30	Bimbingan Mengajar dan Konsultasi	Kegiatan ini dilakukan dengan Guru pembimbing, yaitu mengevaluasi mengenai	

				<p>pembelajaran di dalam kelas, cara mengajar dan metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Lalu melakukan konsultasi mengenai Kegiatan Belajar Mengajar.</p>	
		11.00 – 12.30	Kegiatan Belajar Mengajar	<p>Kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas X AP 1 dengan materi pembelajaran mengenai lembaga- lembaga negara dalam UUD NRI 1945.</p>	
		13.30 – 15.00	Mendampingi Kegiatan Belajar Mengajar	<p>Pendampingan Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan di kelas X AP 2, yaitu mengikuti Teman sejurusan yang mengajar mengenai materi Lembaga-lembaga Negara</p>	

30.	Jumat, 20 Oktober 2017	06.30 – 06.45	Piket Salaman	dalam UUD NRI 1945. Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di dalam kelas	Mendampingi peserta didik dalam mengikuti kegiatan literasi yaitu menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.
		07.00 – 08.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan di kelas XI AP 2. Hari ini materi pembelajaran

31.	Sabtu, 28 Oktober 2017	10.15 – 11.30	Pendampingan Kegiatan Belajar Mengajar	<p>mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.</p> <p>Pendampingan dilakukan di kelas XI Tata Busana, dengan kegiatan yang sama yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.</p>	
		06.30 – 06.45	Piket Salaman	<p>Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi.</p>	
		09.00 -11.00	Input Nilai	<p>Kegiatan menginput nilai peserta didik pada pertemuan minggu ini, untuk kemudian</p>	

		13.00 – 15.00	Piket Harian	dapat dievaluasi keberhasilan kegiatan Belajar Mengajar pada pertemuan minggu ini. Diikuti oleh 2 Mahasiswa PLT untuk mengisi daftar hadir, menyapu ruangan, mematikan kipas angin dan membersihkan bascamp	
--	--	---------------	--------------	---	--



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

CATATAN HARIAN PLT

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
32.	Senin, 23 Oktober 2017	06.30 – 06.45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT dan Guru piket menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06.45- 07.00	Persiapan Upacara atau Apel pagi	Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan Apel pembinaan atau Upacara.	
		07.00 – 08.00	Upacara atau Apel Pagi	Kegiatan upacara berlangsung dengan khidmat dan lancar,	

				<p>diikuti oleh seluruh siswa, guru, karyawan, serta mahasiswa PLT UNY dan PPL UST, yang menjadi pembina upacara adalah salah satu guru. Pembina upacara memberikan arahan mengenai kedisiplinan peserta didik mengenai waktu kedatangan ke sekolah.</p>	
		09.00 – 11.00	Mencari Materi Pembelajaran	<p>Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam membuat RPP. Kegiatan mencari materi pembelajaran dilakukan di perpustakaan baik menggunakan sumber buku paket maupun media internet.</p>	
		12.30 – 14.00	Menentukan indikator	<p>Dalam kegiatan ini mahasiswa</p>	

			pembelajaran dan tujuan pembelajaran	menentukan indikator dan tujuan pembelajaran dari RPP yang akan dibuat. Hal ini dilakukan di awal agar dalam proses pembuatan RPP menjadi mudah	
33.	Selasa, 24 Oktober 2017	06.30 – 06.45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT dan Guru piket menyambut kedatangan para siswa dan guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi.	
		08.00 – 09.30	Membuat RPP	Kegiatan ini dilakukan untuk membuat RPP materi yang akan di ajarkan di kelas. RPP di buat per-pertemuan dengan materi untuk kelas X mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik.	

		10.00 – 11.30	Membuat Kisi-Kisi	Kegiatan ini dilakukan untuk membuat kisi-kisi Ulangan Harian pada pertemuan minggu ini, khusus untuk kelas XI	
		12.30 - 14.30	Membuat Soal UH 1	Soal Ulangan Harian ini dibuat untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik mengenai Sistem Pemerintahan di Indonesia. diperuntukan untuk kelas XI baik Tata Busana maupun Akomodasi Perhotelan.	
34.	Rabu, 25 Oktober 2017	06.45 – 07.00	Piket Salaman	Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai	

		08.30 – 10.30	Membuat Media Pembelajaran	bel sekolah berbunyi Membuat media ini di maksudkan agar pada saat mengajar dapat lebih menarik perhatian peserta didik sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik.	
		12.30 – 14.30	Membuat Soal remedial dan pengayaan	Pembuatan soal remedial ini bertujuan untuk mengantisipasi pada saat Ulangan Harian ada peserta didik yang tidak memenuhi KKM	
35.	Kamis, 26 Oktober 2017	06. 30 – 06. 45	Piket salaman	Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai	

		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di dalam kelas	bel sekolah berbunyi Mendampingi peserta didik dalam mengikuti kegiatan literasi yaitu menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		07.00 – 08.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas X Tata Busana dengan materi pembelajaran mengenai Partisipasi warga negara dalam sistem politik.	
		11.00 – 12.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas X AP	

		13.30 – 15.00	Mendampingi Kegiatan Belajar Mengajar	<p>Idengan materi pembelajaran mengenai Partisipasi warga negara dalam sistem politik.</p> <p>Pendampingan Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan di kelas X AP 2, yaitu mengikuti Teman sejurusan yang mengajar mengenai materi partisipasi warga negara dalam sistem politik..</p>	
36.	Jumat, 27 Oktober 2017	06.30 – 06.45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di dalam kelas	Mendampingi peserta didik dalam mengikuti kegiatan	

				literasi yaitu menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		07.00 – 08.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan di kelas XI AP 2. Hari ini dilakukan ulangan harian untuk mengevaluasi peserta didik mengenai materi yang telah diajarkan.	
		10.15 – 11.30	Pendampingan Kegiatan Belajar Mengajar	Pendampingan dilakukan di kelas XI Tata Busana, dengan kegiatan yang sama yaitu Ulangan harian untuk mengevaluasi peserta didik mengenai materi yang telah	

		12.00 – 12.30	Kegiatan ESQ	diajarkan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan keagamaan terhadap peserta didik perempuan, sedangkan untuk peserta didik laki-laki yang beragama islam mengikuti sholat Jumat bersama.	
		13.00 – 14.00	Pendampingan Ekstrakurikuler Pramuka	Kegiatan ini pendampingan ini dilakukan dalam rangka memberikan pembinaan kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka. Hasil yang di dapat pada hari ini yaitu pembentukan sangga.	
37.	Sabtu, 28 Oktober	06.30 – 06.45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT dan Guru	

	2017			<p>Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi.</p> <p>Kegiatan menginput nilai peserta didik pada pertemuan minggu ini, untuk kemudian dapat dievaluasi keberhasilan kegiatan Belajar Mengajar pada pertemuan minggu ini.</p> <p>Diikuti oleh 2 Mahasiswa PLT untuk mengisi daftar hadir, menyapu ruangan, mematikan kipas angin dan membersihkan bascamp</p>	
		09.00 -11.00	Input Nilai		
		13. 00 – 15. 00	Piket Harian		
38.	Senin, 30 oktober	06.30 – 06.45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT dan Guru	

	2017	06.45 – 07.00	Persiapan Upacara atau Apel pagi	<p>Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi.</p> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan Apel pembinaan atau Upacara.</p>	
		07.00 – 08.30	Upacara atau Apel Pagi	<p>Kegiatan upacara berlangsung dengan khidmat dan lancar, diikuti oleh seluruh siswa, guru, karyawan, serta mahasiswa PLT UNY dan PPL UST, yang menjadi pembina upacara adalah salah satu guru. Pembina upacara memberikan amanat mengenai Sumpah Pemuda</p>	

				yang jatuh pada tanggal 28 Oktober, selain itu juga dilakukan kegiatan Pelatihan Osis masa jabatan masa jabatan 2017/2018.	
		10.00 – 11.30	Mencari Materi Pembelajaran	Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam membuat RPP. Kegiatan mencari materi pembelajaran dilakukan di perpustakaan baik menggunakan sumber buku paket maupun media internet.	
		12.30 – 14.00	Menentukan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran	Dalam kegiatan ini mahasiswa menentukan indikator dan tujuan pembelajaran dari RPP yang akan dibuat. Hal ini dilakukan di awal agar dalam proses pembuatan RPP	

39.	Selasa, 31 Oktober 2017		Ijin Kuliah	menjadi mudah	
40	Rabu, 01 November 2017		Sakit		
41.	Kamis, 02 November 2017	06. 30 – 06. 45	Piket salaman	Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di dalam kelas	Mendampingi peserta didik dalam mengikuti kegiatan literasi yaitu menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis	

				untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		07.00 – 08.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas X Tata Busana dengan kegiatan Ulangan Harian dalam rangka mengevaluasi Hasil belajar peserta didik di dalam kelas.	
		11.00 – 12.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas X AP 1 dengan kegiatan Ulangan Harian dalam rangka mengevaluasi Hasil belajar peserta didik di dalam kelas.	
		13.30 – 15.00	Mendampingi Kegiatan Belajar Mengajar	Pendampingan Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan di kelas X AP 2, yaitu mengikuti	

42.	Jumat, 03 November 2017	06.30 – 06.45	Piket Salaman	<p>Teman sejurusan yang mengajar dengan kegiatan Ulangan Harian dalam rangka mengevaluasi Hasil belajar peserta didik di dalam kelas.</p> <p>Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi</p>	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di dalam kelas	<p>Mendampingi peserta didik dalam mengikuti kegiatan literasi yaitu menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.</p>	

		07.00 – 08.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan di kelas XI AP 2. Dengan Kegiatan Belajar Mengajar mengenai materi praktek dan perlindungan hukum di masyarakat.	
		10.15 – 11.30	Pendampingan Kegiatan Belajar Mengajar	Pendampingan dilakukan di kelas XI Tata Busana, dengan kegiatan yang sama yaitu dengan materi mengenai praktek dan perlindungan hukum di masyarakat.	
		12.00 – 12.30	Kegiatan ESQ	Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan keagamaan terhadap peserta didik perempuan, sedangkan untuk	

		13.00 – 14.00	Pendampingan Ekstrakurikuler Pramuka	peserta didik laki-laki yang beragama islam mengikuti sholat Jumat bersama. Kegiatan ini pendampingan ini dilakukan dalam rangka memberikan pembinaan kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka.	
43.	Sabtu, 04 November 2017	06.30 – 06.45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi.	
		09.00 -11.00	Input Nilai	Kegiatan menginput nilai peserta didik pada pertemuan minggu ini, untuk kemudian dapat dievaluasi keberhasilan	

				kegiatan Belajar Mengajar pada pertemuan minggu ini.	
		13.00 – 15.00	Piket Harian	Diikuti oleh 2 Mahasiswa PLT untuk mengisi daftar hadir, menyapu ruangan, mematikan kipas angin dan membersihkan bascamp	
44.	Senin, 06 November 2017	06.30 – 06.45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi.	
		06.45 – 07.00	Persiapan Upacara atau Apel pagi	Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan Apel pembinaan atau	

		07.00 – 08.30	Upacara atau Apel Pagi	<p>Upacara.</p> <p>Kegiatan upacara berlangsung dengan khidmat dan lancar, diikuti oleh seluruh siswa, guru, karyawan, serta mahasiswa PLT UNY dan PPL UST, yang menjadi pembina upacara adalah salah satu guru. Pembina upacara memberikan amanat mengenai Peserta didik kelas X dan XI di himbau untuk tetap tenang di sekolah dan jangan membuat keributan karena kelas XII sedang mengikuti simulasi UNBK.</p>	
		10.00 – 11.30	Mencari Materi	Kegiatan ini bertujuan untuk	

45.	Selasa, 07 Oktober 2017	12.30 – 14.00	<p>Pembelajaran</p> <p>Menentukan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran</p> <p>Ijin Kuliah</p>	<p>memudahkan dalam membuat RPP. Kegiatan mencari materi pembelajaran dilakukan di perpustakaan baik menggunakan sumber buku paket maupun media internet.</p> <p>Dalam kegiatan ini mahasiswa menentukan indikator dan tujuan pembelajaran dari RPP yang akan dibuat. Hal ini dilakukan di awal agar dalam proses pembuatan RPP menjadi mudah</p>	
-----	----------------------------	---------------	---	---	--

46.	Rabu, 08 November 2017	06.45 – 07.00	Piket Salaman	Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		08.30 – 10.30	Membuat RPP	Kegiatan ini dilakukan untuk membuat RPP materi yang akan di ajarkan di kelas. RPP di buat per-pertemuan dengan materi untuk kelas X mengenai Pemerintahan Daerah.	
		12.30 – 14.30	Membuat Media Pembelajaran	Membuat media ini di maksudkan agar pada saat mengajar dapat lebih menarik perhatian peserta didik sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik	

47.	Kamis, 09 November 2017	06. 30 – 06. 45	Piket salaman	Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	
		06.45 – 07.00	Mendampingi Kegiatan Literasi di dalam kelas	Mendampingi peserta didik dalam mengikuti kegiatan literasi yaitu menuliskan sinopsis buku yang sudah mereka baca dan selanjutnya mengumpulkan hasil sinopsis untuk selanjutnya diberi penilaian.	
		07.00 – 08.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas X Tata Busana dengan materi mengenai Pemerintahan	

		11.00 – 12.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Daerah. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas X AP 1 dengan materi mengenai Pemerintahan Daerah .	
		13.30 – 15.00	Mendampingi Kegiatan Belajar Mengajar	Pendampingan Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan di kelas X AP 2, yaitu mengikuti Teman sejurusan yang mengajar dengan materi mengenai Pemerintahan Daerah.	
48.	Jumat, 10 November 2017	06.30 – 06.45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi	

		06.45 – 07.00	UPACARA memperingati HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER	Kegiatan upacara berlangsung dengan khidmat dan lancar, diikuti oleh seluruh siswa, guru, karyawan, serta mahasiswa PLT UNY dan PPL UST, yang menjadi pembina upacara adalah salah satu guru. Pembina upacara membacakan sambutan menteri sosial mengenai hari Pahlawan pada 10 November.	
		07.45 – 08.30	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan di kelas XI AP 2. Dengan Kegiatan Belajar Mengajar mengenai materi penegakan hukum di dalam masyarakat.	

		10.15 – 11.30	Pendampingan Kegiatan Belajar Mengajar	Pendampingan dilakukan di kelas XI Tata Busana, dengan kegiatan yang sama yaitu dengan materi mengenai penegakan hukum di masyarakat.	
		12.00 – 12.30	Kegiatan ESQ	Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan keagamaan terhadap peserta didik perempuan, sedangkan untuk peserta didik laki-laki yang beragama islam mengikuti sholat Jumat bersama.	
		13.00 – 14.00	Pendampingan Ekstrakurikuler Pramuka	Kegiatan ini pendampingan ini dilakukan dalam rangka memberikan pembinaan kegiatan Ekstrakurikuler	

49.	Sabtu, 11 November 2017	06.30 – 06.45	Piket Salaman	<p>Pramuka. Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi.</p>	
		09.00 -11.00	Input Nilai	<p>Kegiatan menginput nilai peserta didik pada pertemuan minggu ini, untuk kemudian dapat dievaluasi keberhasilan kegiatan Belajar Mengajar pada pertemuan minggu ini.</p>	
		13. 00 – 15. 00	Piket Harian	<p>Diikuti oleh 2 Mahasiswa PLT untuk mengisi daftar hadir, menyapu ruangan, mematikan kipas angin dan membersihkan bascamp.</p>	

50.	Senin, 13 November 2017	06.30 – 06.45	Piket Salaman	Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi.
		06.45 – 07.00	Persiapan Upacara atau Apel pagi	Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan Apel pembinaan atau Upacara.
		07.00 – 08.30	Upacara atau Apel Pagi	Kegiatan upacara berlangsung dengan khidmat dan lancar, diikuti oleh seluruh siswa, guru, karyawan, serta mahasiswa PLT UNY dan PPL UST, yang menjadi pembina upacara adalah salah

				<p>satu guru. Pembina upacara memberikan amanat mengenai kedisiplinan siswa SMK KARYA RINI.</p>	
		10.00 – 11.30	Mencari Materi Pembelajaran	<p>Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam membuat RPP. Kegiatan mencari materi pembelajaran dilakukan di perpustakaan baik menggunakan sumber buku paket maupun media internet.</p>	
		12.30 – 14.00	Menentukan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran	<p>Dalam kegiatan ini mahasiswa menentukan indikator dan tujuan pembelajaran dari RPP yang akan dibuat. Hal ini dilakukan di awal agar dalam</p>	

51.	Selasa, 14 November 2017	06.30 – 06.45	Piket Salaman	<p>proses pembuatan RPP menjadi mudah</p> <p>Mahasiswa PLT dan Guru Piket menyambut kedatangan para siswa dan Guru di depan pintu gerbang sekolah sampai bel sekolah berbunyi.</p>	
52.	Rabu, 15 November 2017	08.00 – 12.00	Menyusun Laporan	Menyiapkan Administrasi laporan terkait dnegan daftar hadis siswa, lembar pengesahan.	
53.	Kamis, 16 November 2017	08.00 – 12.00	Menyusun Laporan	Melanjutkan pembuatan Administrasi dalam penyusunan Laporan.	
54.	Jumat, 17 November		Menyusun Laporan	Melanjutkan penyusunan	

	2017	08.00 – 12.00		laporan yang belum selesai.	
		12.00 – 12.30	Kegiatan ESQ	Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan keagamaan terhadap peserta didik perempuan, sedangkan untuk peserta didik laki-laki yang beragama islam mengikuti sholat Jumat bersama.	
		13.00 – 14.00	Pendampingan Ekstrakurikuler Pramuka	Kegiatan ini pendampingan ini dilakukan dalam rangka memberikan pembinaan kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka.	

57	Kata. 18 November 2017	09.00 - 12.00	Penarikan PLT	Kegiatan Penarikan Mahasiswa PLT diikuti oleh satu orang DPL, Kepala Sekolah, kordinator PLT, Guru dan 12 Mahasiswa PLT.
----	------------------------	---------------	---------------	--

Sleman ,

November 2017

Mengetahui,

Koordinator PPL



Rahayu Indriyani, S. Pd
NIP.19590308 198602 2 004

Guru Mata Pelajaran PKN



Dartono, S.Pd
NIP.

Mahasiswa Praktek Lapangan
Terbimbing



Lina Nur Savangah
NIM: 14401244006

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**



DISUSUN OLEH :

NAMA MAHASISWA : LINA NUR SAVANGAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
MATERI : SISTEM PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA
KELAS/ SEMESTER : X / GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018

SMK KARYA RINI YHI KOWANI YOGYAKARTA
JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 86 DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA
2017

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMK Karyarini Depok
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : X/ 1
Alokasi Waktu : 1X pertemuan (2x45 menit)

A. Kompetensi Inti

- KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	No	Indikator Pencapaian Kompetensi
3.5	Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta	3.5.1	Menjelaskan pengertian mengenai sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia.
		3.5.2	Mengidentifikasi alat-alat pertahanan dan keamanan negara.
		3.5.3	Mengidentifikasi Sistem Pertahanan dan Keamanan yang berlaku di Indonesia.
		3.5.4	Menjelaskan pengertian Bela

	<p>menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.</p>	<p>3.5.5</p>	<p>negara. Mengidentifikasi bentuk-bentuk Kesadaran Bela Negara.</p>
--	---	---------------------	---

C. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi Alat-alat sistem pertahanan dan keamanan Negara republik Indonesia.
2. Siswa dapat Menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan yang berlaku di Indonesia.
3. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kesadaran Bela Negara.
4. Siswa dapat menyaji dan mengkomunikasikan hasil diskusi mereka mengenai sistem pertahanan keamanan dan kesadaran bela negara.

D. Materi Pembelajaran

Pertemuan I

Kata sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) atau bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan sebagai kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan serta mempunyai komponen-komponen penggerak, contohnya negara. sistem merupakan serangkaian atau gabungan dari perangkat atau komponen yang saling berhubungan atau berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu.

Kata pertahanan berasal dari kata dasar tahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tahan mempunyai arti keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal. Dengan pengertian tersebut, pertahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pertahanan negara adalah segala,usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan Negara merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya.

Kata keamanan berakar kata dari kata aman. Secara sederhana istilah keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar.

Jadi sistem pertahanan dan keamanan negara berarti suatu komponen atau elemen yang dibuat sebagai upaya dalam menciptakan kondisi yang stabil. Bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, rasa kecemasan, maupun ketakutan. Sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai dan aman.

Upaya mempertahankan kemerdekaan termaktub ke dalam Undang Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Kemerdekaan negara Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang menyatakan sebagai berikut :

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan diatur dengan undang-undang.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*Sishankamrata*). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut.

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

2. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana di atur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada pada negara dan bangsa.

Kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk untuk mewujudkannya, membela negara tidak harus dalam wujud perang atau angkat senjata, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara lain seperti ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok,

meningkatkan hasil pertanian, cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk belajar dengan tekun dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka dan lain sebagainya.

E. Model Pembelajaran

Pendekatan	: Saintifik
Model Pembelajaran	: Discoveri Learning
Metode Pembelajaran	: Diskusi

F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi kegiatan	Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> Guru mengucapkan salam, mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, dan mengawali proses pembelajaran dengan berdoa. Peserta didik menjawab salam, mengecek kerapian dan kebersihan ruang kelas, dan berdoa. Guru melakukan presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. Peserta didik menyiapkan alat tulis dan buku-buku yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Guru memberikan mengingatkan siswa mengenai pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Peserta didik memperhatikan guru dan ikut mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai serta menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan. 	15 Menit

<p>Inti</p>	<p>1. Mengamati</p> <p>Peserta didik diminta untuk mengamati gambar atau tayangan video yang berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia.</p> <p>Peserta didik memperhatikan penjelasan guru secara umum mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia.</p> <p>2. Menanya</p> <p>Peserta didik mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau tayangan video atau penjelasan guru secara umum terkait dengan materi sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia.</p> <p>3. Mengumpulkan Informasi</p> <p>Didalam proses mengumpulkan informasi ini, jika dimungkinkan didik dianjurkan untuk menggunakan sumber dari buku sumber lain, media lain seperti Koran maupun internet yang terkait dengan materi yang akan didiskusikan.</p> <p>Peserta didik dibagi kedalam 7 kelompok dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok 1 dan 2 mendiskusikan mengenai pengertian sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. • Kelompok 3 dan 4 mendiskusikan mengenai sistem pertahanan dan keamanan yang di terapkan di negara Indonesia. • Kelompok 5 dan 6 mendiskusikan mengenai pengertian Bela Negara. • Kelompok 7 mendiskusikan mengenai bentuk-bentuk kesadaran Bela Negara. <p>4. Mengasosiasi</p> <p>Peserta didik bekerja dikelompok masing-masing sesuai dengan tema yang sedang menjadi bahan diskusi yaitu tentang sistem pertahanan dan keamanan negara.</p> <p>5. Mengkomunikasikan</p>	<p>60</p> <p>Menit</p>
--------------------	---	--------------------------------------

	<p>Secara random peserta didik (diambil 1 atau 2 kelompok), dapat mengkomunikasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kelompok yang tidak maju menanggapi.</p> <p>Peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil diskusi mereka secara tertulis.</p>	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menanyakan pada peserta didik apakah sudah memahami materi tentang Peserta didik menanggapi pertanyaan dari guru, apabila ada sistem pertahanan dan keamanan negara indonesia. 2. Guru memberikan kesimpulan kepada peserta didik. 3. Guru menyampaikan motivasi untuk peserta didik agar terus belajar. 4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. <p>Peserta didik mengucapkan terima kasih kepada guru.</p>	15 Menit

G. Penilaian pembelajaran

1. Instrumen dan Teknik Penilaian

No	Aspek	Teknik	Bentuk Instrumen
1	Sikap Spiritual/Sikap Sosial	Observasi kelas kegiatan pengamatan dan diskusi	Lembar observasi
2	Pengetahuan	Tes tulis	Soal uraian
3	Ketrampilan	Penilaian hasil diskusi	Lembarpenilaian

a. Penilaian Sikap

Rubrik Penilaian Sikap kegiatan Pengamatan dan Diskusi

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		Kedisiplinan	Partisipasi	Kerjasama		

Keterangan :

Aspek Kedisiplinan

- Skor 3 Mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur dan tepat waktu
 2 Mengerjakan tugas sesuai prosedur/ tepat waktu
 1 Tidak mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tidak tepat waktu

Aspek Partisipasi

- Skor 3 Melakukan pengamatan/menyimak, pencatatan dan urun pendapatan atau solusi
 2 Melakukan pengamatan/menyimak/pencatatan/urun pendapat atau solusi
 1 Tidak melakukan pengamatan, pencatatan dan tidak urun pendapat/solusi

Aspek Kerjasama :

- Skor 3 Melakukan pengamatan, pencatatan dan penyelesaian tugas secara bersama
 2 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara bersama
 1 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara individual

Skor maksimum adalah $3 \times 3 = 9$

Nilai = jumlah skor

_____ **x 100**

Jumlah maksimum

b. Penilaian Pengetahuan

NO	NAMA	NILAI	
1			
2			
3			

Bentuk Soal

1. Jelaskan Pengertian sistem Pertahanan dan Kemanan negara?
2. Sebutkan alat-alat pertahanan negara?
3. Jelaskan sistem Pertahanan dan keamanan negara rakyat semesta?
4. Jelaskan pengertian Kesadaran Bela Negar?
5. Sebutkan bentuk-bentuk kesadaran bela negara?

Kunci Jawaban

1. sistem pertahanan dan keamanan negara berarti suatu komponen atau elemen yang dibuat sebagai upaya dalam menciptakan kondisi yang stabil. Bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, rasa kecemasan, maupun ketakutan. Sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai dan aman.
2. Kekuatan utama : Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian republic Indonesia
Kekuatan Pendukung : seluruh Rakyat Indonesia.
3. Sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut:
 - a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
 - b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
 - c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.
4. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian

kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara sudah sepatutnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada pada negara dan bangsa.

5. bentuk-bentuk kesadaran bela negara dapat dilihat dari contoh berikut:

- a. mengikuti dengan baik pelajaran PKN
- b. mengikuti pelatihan dasar kemiliteran
- c. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib.
- d. pengabdian sesuai dengan profesi (profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang bencana alam, atau bencana lainnya.

c. Penilaian Keterampilan

Rubrik Penilaian Keterampilan

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		A	B	C		

Keterangan :

A = Penguasaan materi saat mempresentasikan hasil diskusi

B = cara penyampaian hasil diskusi di depan kelas

C = Tanggapan atau jawaban yang diberikan

Petunjuk penilaian

Penguasaan materi

- Skor 3, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan menjawab pertanyaan dengan baik
- Skor 2, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.

Cara penyampaian

- Skor 3, untuk siswa yang lancar dan penyampaian dapat dimengerti
- Skor 2, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian dapat dimengerti.

- Skor 1, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian tidak dapat dimengerti
Tanggapan dalam Menjawab
- Skor 3, untuk peserta didik yang memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan
- Skor 2, untuk peserta didik yang sedikit memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.
- Skor 1, untuk peserta didik yang tidak memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.

3. Remedial

Remedial dilakukan untuk siswa yang belum menguasai materi atau yang belum dapat memahami materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75 %. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75 % maka kegiatan remedial dapat dilakukan antara lain :

1. Mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas
2. Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas
3. Memberikan kesempatan untuk tes perbaikan.

Perlu diperhatikan bahwa materi yang diulang atau dites kembali adalah materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan analisis belum dikuasai oleh peserta didik. Untuk program remedial peserta didik diberikan soal-soal untuk dikerjakan kembali agar peserta didik semakin memahami materi yang ada dikerjakan di kelas dan close book.

3. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi dan secara pribadi sudah mampu memahami mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Bentuk pengayaan dapat dilakukan dengan antara lain :

- 1 Guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis atau membacakan di depan kelas.

2. Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya.
3. Guru memberikan beberapa materi yang relevan dengan bab tersebut untuk dipelajari di rumah kembali. Selain itu guru menyarankan peserta didik untuk mencari materi maupun informasi dari sumber lain yang terkait dengan bab tersebut.

H. Media

1. Power Point
2. Buku sumber belajar

I. Alat dan Bahan

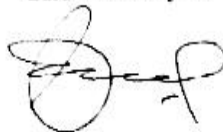
1. LCD
2. Proyektor
3. Speaker

J. Sumber belajar

- a. Buku Siswa SMA SMK MA/MAK kelas X, Tolib S.Pd. MM., Nuryadi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pusat kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- b. Buku Guru SMA SMK MA/MAK kelas X, Tolib S.Pd. MM., Nuryadi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pusat kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Sleman, 24 Oktober 2017

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran



Dartono, S.Pd
NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan
Terbimbing



Lina Nur Savangah
NIM 14401244006

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**



DISUSUN OLEH :

NAMA MAHASISWA : LINA NUR SAVANGAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
MATERI : SUPRASTRUKTUR DAN
INFRASTRUKTUR POLITIK
KELAS/ SEMESTER : X / GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018

SMK KARYA RINI YHI KOWANI YOGYAKARTA
JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 86 DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA
2017

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMK Karyarini Depok
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : X/ 1
Alokasi Waktu : 1X pertemuan (2x45 menit)

A. Kompetensi Inti

- KI1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

3.5	Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.5.1	Menjelaskan pengertian suprastruktur dan infrastruktur Politik serta menggambarkan skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan.
		3.5.2	Mengidentifikasi fungsi dan kewenangan Lembaga-Lembaga Negara
		3.5.3	Mengidentifikasi bentuk-bentuk

			partisipasi Politik
--	--	--	----------------------------

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 2

5. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik.
6. Peserta didik dapat menggambarkan skema Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan.
7. Peserta didik dapat menyaji dan mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik serta skema lembaga negara.

D. Materi Pembelajaran

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

1. Suprastruktur

Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik, terbentuk dari dua pengertian yaitu sistem dan politik. Menurut *Pamudji*, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut *Rusadi Kantaprawira*, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah *suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional*. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai *siyasah* yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan politik beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

- b. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.
- c. Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut.
- d. Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

Dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain, melalui sistem politik aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sistem politik berbeda dengan sistem sistem sosial yang lainnya. Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain :

- a. Daya jangkauannya *universal*, meliputi semua anggota masyarakat.
- b. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik.
- c. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah.
- d. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu

negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut.

Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Infrastruktur

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan sebagai berikut :

- a. Partai Politik**, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.

Gambar 1.1 Partai-partai Politik di Indonesia



- b. Kelompok Kepentingan (*interest group*)**, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.
- c. Kelompok Penekan (*pressure group*)**, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok dan sebagainya.
- d. Media komunikasi politik**, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya, sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan

sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.

E. Model Pembelajaran

Pendekatan	: Saintifik
Model Pembelajaran	: Discovery Learning
Metode Pembelajaran	: Diskusi. Mind Mapping

F. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 2

Kegiatan	Deskripsi kegiatan	Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> Guru mengucapkan salam, mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, dan mengawali proses pembelajaran dengan berdoa. Peserta didik menjawab salam, mengecek kerapian dan kebersihan ruang kelas, dan berdoa. Guru melakukan presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. Peserta didik menyiapkan alat tulis dan buku-buku yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Guru memberikan mengingatkan siswa mengenai pembelajaran pada pertemuan sebelumnya mengenai sistem Pertahanan dan keamanan Negara. Peserta didik memperhatikan guru dan ikut mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai serta menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan. 	15 Menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> Mengamati Guru menayangkan gambar atau video yang berkaitan dengan materi suprastruktur dan infrastruktur politik. Peserta didik diminta untuk mengamati gambar atau tayangan video yang berkaitan dengan materi suprastruktur dna infrastruktur politik. 	60 Menit

7. Menanya

Guru memotivasi peserta didik untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi suprastruktur dan infrastruktur politik.

Peserta didik mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau tanyangan video atau penjelasan guru secara umum terkait dengan materi suprastruktur dan infrastruktur politik.

3. Mengumpulkan Informasi

Guru mempersilakan peserta didik untuk mencari informasi terkait dengan materi, baik dari sumber buku maupun dari internet.

Peserta didik secara berkelompok mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan materi suprastruktur dan Infrastruktur politik.

Peserta didik di bagi menjadi 7 kelompok dengan rincian sebagai berikut :

- Kelompok 1,2 dan 3 mendiskusikan mengenai suprastruktur politik
- Kelompok 4 dan 5 mendiskusikan mengenai infrastruktur politik
- Kelompok 6 dan 7 mendiskusikan mengenai skema lembaga-lembaga negara.

Masing-masing kelompok mendiskusikan bagiannya masing-masing. Baik pengertian, tugas dan wewenangnya maupun menggambarkan skema.

4. Mengasosiasi

Peserta didik bekerja dikelompok masing-masing sesuai dengan tema yang sedang menjadi bahan diskusi yaitu tentang suprastruktur dan Infrastruktur politik.

5. Mengkomunikasikan

Secara random peserta didik (diambil 1 atau 2 kelompok), dapat mengkomunikasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kelompok yang tidak maju

	menanggapi. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil diskusi mereka secara tertulis.	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menanyakan pada peserta didik apakah sudah memahami materi tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. 2. Guru memberikan kesimpulan kepada peserta didik. 3. Guru menyampaikan motivasi untuk peserta didik agar terus belajar. 4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. <p>Peserta didik mengucapkan terima kasih kepada guru.</p>	15 Menit

G. Penilaian pembelajaran

1. Instrumen dan Teknik Penilaian

No	Aspek	Teknik	Bentuk Instrumen
1	Sikap Spiritual/Sikap Sosial	Observasi kelas kegiatan pengamatan dan diskusi	Lembar observasi
2	Pengetahuan	Tes tulis	Soal uraian
3	Ketrampilan	Penilaian hasil diskusi	Lembarpenilaian

d. Penilaian Sikap

Rubrik Penilaian Sikap kegiatan Pengamatan dan Diskusi

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		Kedisiplinan	Partisipasi	Kerjasama		

Keterangan :

Aspek Kedisiplinan

- 3 Mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur dan tepat waktu
- Skor 2 Mengerjakan tugas sesuai prosedur/ tepat waktu
- 1 Tidak mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tidak tepat waktu

Aspek Partisipasi

- 3 Melakukan pengamatan/menyimak, pencatatan dan urun pendapat atau solusi
- Skor 2 Melakukan pengamatan/menyimak/pencatatan/urun pendapat atau solusi
- 1 Tidak melakukan pengamatan, pencatatan dan tidak urun pendapat/solusi

Aspek Kerjasama :

- 3 Melakukan pengamatan, pencatatan dan penyelesaian tugas secara bersama
- Skor 2 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara bersama
- 1 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara individual

Skor maksimum adalah 3x3 = 9

Nilai = $\frac{\text{jumlah skor}}{\text{Jumlah maksimum}} \times 100$

Jumlah maksimum

e. Penilaian Pengetahuan

NO	NAMA	NILAI	
1			
2			
3			

Pertemuan pertama

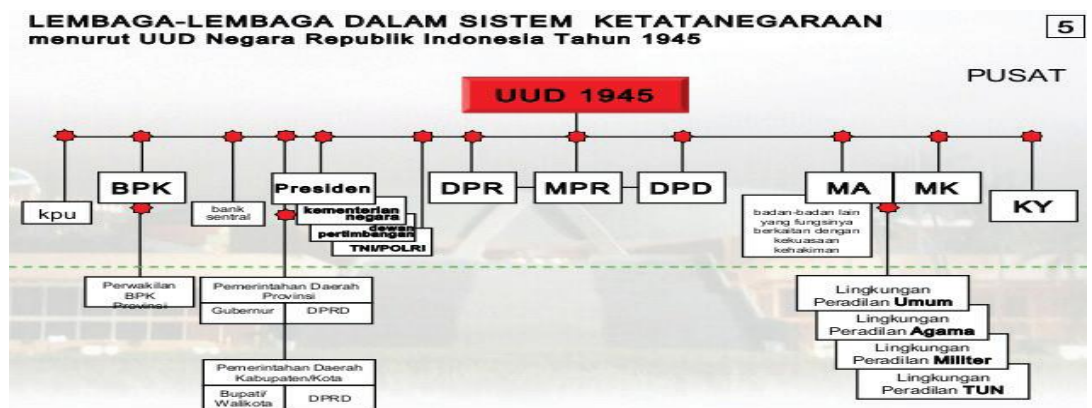
Bentuk Soal

1. Jelaskan pengertian sistem politik?
2. Jelaskan pengertian suprastruktur politik?
3. Jelaskan pengertian infrastruktur politik?
4. Jelaskan yang dimaksud dengan partai politik?

- Gambarkan skema lembaga-lembaga negara di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia?

Kunci Jawaban

- Sistem politika adalah keseluruhan kegiatan politik didalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional diantara kegiatan politik-politik tersebut.
- Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Bahkan kelompokkelompok tersebut tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara.
- Partai politik yaitu lembaga yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
-



f. Penilaian Keterampilan

Rubrik Penilaian Keterampilan

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		A	B	C		

Keterangan :

A = Penguasaan materi saat mempresentasikan hasil diskusi

B = cara penyampaian hasil diskusi di depan kelas

C = Tanggapan atau jawaban yang diberikan

Petunjuk penilaian

Penguasaan materi

- Skor 3, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan menjawab pertanyaan dengan baik
- Skor 2, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.

Cara penyampaian

- Skor 3, untuk siswa yang lancar dan penyampaian dapat dimengerti
- Skor 2, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian dapat dimengerti.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian tidak dapat dimengerti

Tanggapan dalam Menjawab

- Skor 3, untuk peserta didik yang memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan
- Skor 2, untuk peserta didik yang sedikit memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.
- Skor 1, untuk peserta didik yang tidak memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.

2. Remedial

Remedial dilakukan untuk siswa yang belum menguasai materi atau yang belum dapat memahami materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75 %. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75 % maka kegiatan remedial dapat dilakukan antara lain :

4. Mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas
5. Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas
6. Memberikan kesempatan untuk tes perbaikan.

Perlu diperhatikan bahwa materi yang diulang atau dites kembali adalah materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan analisis belum dikuasai oleh peserta didik. Untuk program remedial peserta didik diberikan soal-soal untuk dikerjakan kembali agar peserta didik semakin memahami materi yang ada dikerjakan di kelas dan close book.

3. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi dan secara pribadi sudah mampu memahami mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Bentuk pengayaan dapat dilakukan dengan antara lain :

- 2 Guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis atau membacakan di depan kelas.
- 3 Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya.
- 4 Guru memberikan beberapa materi yang relevan dengan bab tersebut untuk dipelajari di rumah kembali. Selain itu guru menyarankan peserta didik untuk mencari materi maupun informasi dari sumber lain yang terkait dengan bab tersebut.

H. Media

1. Power Point
2. Buku sumber belajar

I. Alat dan Bahan

1. LCD
2. Proyektor

3. Speaker

J. Sumber belajar

- a. Buku Siswa SMA/SMK/MA/MAK kelas X, Tolib S.Pd. MM., Nuryadi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pusat kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- b. Buku Guru SMA/SMK/MA/MAK kelas X, Tolib S.Pd. MM., Nuryadi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pusat kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Sleman, 10 Oktober 2017

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran



Dartono. S.Pd

NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan

Terbimbing



Lina Nur Savangah

NIM 14401244006

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**



DISUSUN OLEH :

NAMA MAHASISWA : LINA NUR SAVANGAH

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

MATERI : LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA

KELAS/ SEMESTER : X / GANJIL

TAHUN PELAJARAN : 2017/2018

SMK KARYA RINI YHI KOWANI YOGYAKARTA
JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 86 DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA
2017

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMK Karyarini Depok
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : X/ 1
Alokasi Waktu : 1X pertemuan (2x45 menit)

A. Kompetensi Inti

- KI1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

3.5	Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.5.1	Menjelaskan pengertian suprastruktur dan infrastruktur Politik serta menggambarkan skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan.
		3.5.2	Mengidentifikasi fungsi dan kewenangan Lembaga-Lembaga Negara
		3.5.3	Mengidentifikasi bentuk-bentuk

			partisipasi Politik
--	--	--	----------------------------

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 3

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi lembaga-lembaga negara menurut undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan kewenangan lembaga negara.
3. Peserta didik dapat menyaji dan mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai fungsi dan kewenangan lembaga negara.

D. Materi Pembelajaran

Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK, Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut :

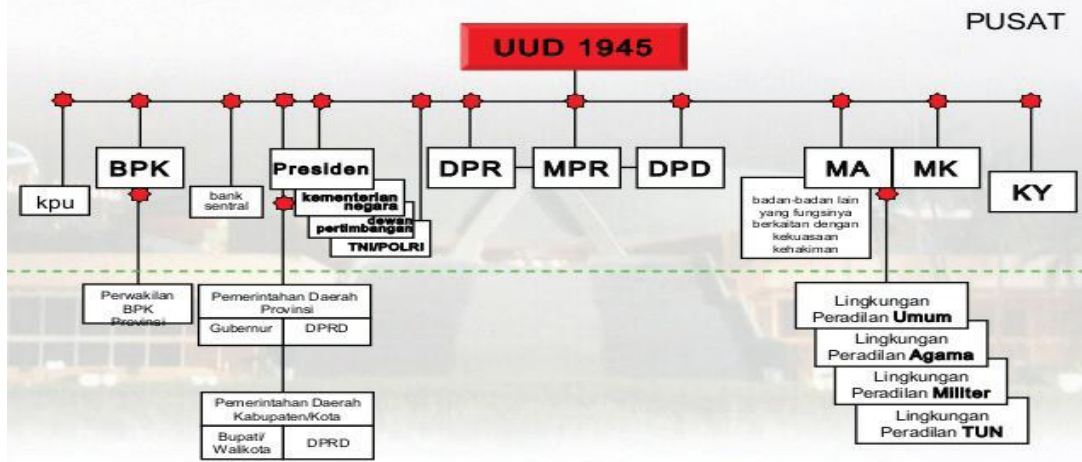
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden/Wakil Presiden
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Komisi Yudisial
8. Badan Pemeriksa Keuangan

Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra-struktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia

**LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

5



Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945).
- Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003).
- MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara.
- Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2. Presiden

- Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.
 - Membuat Undang-Undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
 - Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))
 - Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (Pasal 10)
 - Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)

- 5) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
- 6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
- 7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1))
- 8) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2))
- 9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
- 10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden (Pasal 16)
- 11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)
- 12) Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- d. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/ pendapat dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

Gambar 1.2 Badan Pemeriksa Keuangan



5. Mahkamah Agung (MA)

- a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

6. Mahkamah Konstitusi

- a. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :
 - 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik.
 - 4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
 - 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

7. Komisi Yudisial (KY)

- a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

- b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- a. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi.
- b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi.
- c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003).
- d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

E. Model Pembelajaran

Pendekatan	: Saintifik
Model Pembelajaran	: Discovery Learning
Metode Pembelajaran	: Diskusi. Mind Mapping

F. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 3

Kegiatan	Deskripsi kegiatan	Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> Guru mengucapkan salam, mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, dan mengawali proses pembelajaran dengan berdoa. Peserta didik menjawab salam, mengecek kerapian dan kebersihan ruang kelas, dan berdoa. Guru melakukan presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. Peserta didik menyiapkan alat tulis dan buku-buku yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Guru memberikan mengingatkan siswa mengenai pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Peserta didik memperhatikan guru dan ikut mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan 	15 Menit

	dicapai serta menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan.	
Inti	<p>1. Mengamati</p> <p>Guru menayangkan gambar atau video yang berkaitan dengan materi fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara.</p> <p>Peserta didik diminta untuk mengamati gambar atau tayangan video yang berkaitan dengan materi fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara.</p> <p>2. Menanya</p> <p>Guru memotivasi peserta didik untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara.</p> <p>Peserta didik mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau tayangan video atau penjelasan guru secara umum terkait dengan materi fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara.</p> <p>3. Mengumpulkan Informasi</p> <p>Guru mempersilakan peserta didik untuk mencari informasi terkait dengan materi, baik dari sumber buku maupun dari internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik secara berkelompok mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan materi fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. • Peserta didik diminta untuk bergabung dengan kelompoknya yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu guru membagikan kertas berisi pernyataan mengenai materi lembaga-lembaga negara, selanjutnya peserta didik secara berkelompok membuat mind mapping dengan menempelkan potongan kertas yang berisi pernyataan, kemudian peserta didik memberikan keterangan di sebelah 	60 Menit

	<p>potongan kertas tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seperti pengertian, tugas dan wewenangnya dan sebagainya. <p>4.Mengasosiasi</p> <p>Peserta didik bekerja dikelompok masing-masing sesuai dengan tema yang sedang menjadi bahan diskusi yaitu tentang lembaga-lembaga negara.</p> <p>5. Mengkomunikasikan</p> <p>Secara random peserta didik (diambil 1 atau 2 kelompok), dapat mengkomunikasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kelompok yang tidak maju menanggapi.</p> <p>Peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil diskusi mereka secara tertulis.</p>	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menanyakan pada peserta didik apakah sudah memahami materi tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. 2. Guru memberikan kesimpulan kepada peserta didik. 3. Guru menyampaikan motivasi untuk peserta didik agar terus belajar. 4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. <p>Peserta didik mengucapkan terima kasih kepada guru.</p>	15 Menit

G. Penilaian pembelajaran

1. Instrumen dan Teknik Penilaian

No	Aspek	Teknik	Bentuk Instrumen
1	Sikap Spiritual/Sikap Sosial	Observasi kelas kegiatan pengamatan dan diskusi	Lembar observasi
2	Pengetahuan	Tes tulis	Soal uraian

3	Ketrampilan	Penilaian hasil diskusi	Lembarpenilaian
---	-------------	-------------------------	-----------------

g. Penilaian Sikap

Rubrik Penilaian Sikap
kegiatan Pengamatan dan Diskusi

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		Kedisiplinan	Partisipasi	Kerjasama		

Keterangan :

Aspek Kedisiplinan

- Skor 3 Mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur dan tepat waktu
 2 Mengerjakan tugas sesuai prosedur/ tepat waktu
 1 Tidak mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tidak tepat waktu

Aspek Partisipasi

- Skor 3 Melakukan pengamatan/menyimak, pencatatan dan urun pendapat atau solusi
 2 Melakukan pengamatan/menyimak/pencatatan/urun pendapat atau solusi
 1 Tidak melakukan pengamatan, pencatatan dan tidak urun pendapat/solusi

Aspek Kerjasama :

- Skor 3 Melakukan pengamatan, pencatatan dan penyelesaian tugas secara bersama
 2 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara bersama
 1 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara individual

Skor maksimum adalah $3 \times 3 = 9$

Nilai = $\frac{\text{jumlah skor}}{\text{Jumlah maksimum}} \times 100$

Jumlah maksimum

h. Penilaian Pengetahuan

NO	NAMA	NILAI	
1			
2			
3			

Pertemuan pertama

Bentuk Soal

1. Sebutkan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia! 4 saja!
2. Sebutkan 3 saja kewenangan MPR?
3. Sebutkan 3 fungsi DPR?
4. Jelaskan kewenangan Komisi Yudisial (KY)?
5. Sebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi ?

Kunci Jawaban

1. MPR (majelis permusyawaratan rakyat), DPR (dewan Perwakilan Rakyat), MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi)
2. – mengubah dan menetapkan UUD
 - Melantik presiden dan/atau wakil presiden
 - Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
4. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.
5. – mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI tahun 1945
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945
 - Memutus pembubaran partai politik
 - Memutus perselisihan hasil pemilu
 - Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

i. Penilaian Keterampilan

Rubrik Penilaian Keterampilan

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		A	B	C		

Keterangan :

A = Penguasaan materi saat mempresentasikan hasil diskusi

B = cara penyampaian hasil diskusi di depan kelas

C = Tanggapan atau jawaban yang diberikan

Petunjuk penilaian

Penguasaan materi

- Skor 3, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan menjawab pertanyaan dengan baik
- Skor 2, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.

Cara penyampaian

- Skor 3, untuk siswa yang lancar dan penyampaian dapat dimengerti
- Skor 2, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian dapat dimengerti.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian tidak dapat dimengerti

Tanggapan dalam Menjawab

- Skor 3 , untuk peserta didik yang memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan
- Skor 2, untuk peserta didik yang sedikit memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.
- Skor 1, untuk peserta didik yang tidak memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.

2. Remedial

Remedial dilakukan untuk siswa yang belum menguasai materi atau yang belum dapat memahami materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila

peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75 %. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75 % maka kegiatan remedial dapat dilakukan antara lain :

7. Mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas
8. Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas
9. Memberikan kesempatan untuk tes perbaikan.

Perlu diperhatikan bahwa materi yang diulang atau dites kembali adalah materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan analisis belum dikuasai oleh peserta didik. Untuk program remedial peserta didik diberikan soal-soal untuk dikerjakan kembali agar peserta didik semakin memahami materi yang ada dikerjakan di kelas dan close book.

3. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi dan secara pribadi sudah mampu memahami mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Bentuk pengayaan dapat dilakukan dengan antara lain :

- 5 Guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis atau membacakan di depan kelas.
- 6 Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya.
- 7 Guru memberikan beberapa materi yang relevan dengan bab tersebut untuk dipelajari di rumah kembali. Selain itu guru menyarankan peserta didik untuk mencari materi maupun informasi dari sumber lain yang terkait dengan bab tersebut.

H. Media

1. Power Point
2. Buku sumber belajar

I. Alat dan Bahan

4. LCD
5. Proyektor
6. Speaker

J. Sumber belajar

- a. Buku Siswa SMA/SMK/MA/MAK kelas X, Tolib S.Pd. MM., Nuryadi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pusat kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- b. Buku Guru SMA/SMK/MA/MAK kelas X, Tolib S.Pd. MM., Nuryadi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pusat kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Sleman, 17 Oktober 2017

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran



Dartono, S.Pd
NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan

Terbimbing



Lina Nur Savangah
NIM 14401244006

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**



DISUSUN OLEH :

NAMA MAHASISWA : LINA NUR SAVANGAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
MATERI : PARTISIPASI POLITIK WARGA
NEGARA
KELAS/ SEMESTER : X / GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018

SMK KARYA RINI YHI KOWANI YOGYAKARTA
JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 86 DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA
2017

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMK Karyarini Depok
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : X/ 1
Alokasi Waktu : 1X pertemuan (2x45 menit)

A. Kompetensi Inti

- KI1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

3.5	Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.5.1	Menjelaskan pengertian suprastruktur dan infrastruktur Politik serta menggambarkan skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan.
		3.5.2	Mengidentifikasi fungsi dan kewenangan Lembaga-Lembaga Negara
		3.5.3	Mengidentifikasi bentuk-bentuk

			partisipasi Politik
--	--	--	----------------------------

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 4

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian partisipasi warga negara dalam sistem politik.
2. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam sistem politik
3. Peserta didik dapat menyaji dan mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik.

D. Materi Pembelajaran

Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh **Verba**, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik.

Gambar 1.1 Pemilihan Umum



Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.
2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.
4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.
5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.
6. Dapat menerima perbedaan pendapat.
7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.
8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya.
9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara.
11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum.
12. Membangun budaya politik yang demokratis.

13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan.
14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik.
15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air.

Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal (DPR) ataupun informal (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan). Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

a. Di Lingkungan Sekolah

Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
- 2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.
- 3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.

Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya. Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila.
- 2) Undang-Undang Dasar RI 1945.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 4) Tata tertib siswa, dan sebagainya.

b. Di Lingkungan Masyarakat

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

- 1) Forum warga.
- 2) Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.
- 3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.

Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut :

- 1) Pancasila dan UUD RI 1945.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang parpai politik dan sebagainya.
- 3) Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-RW, Peraturan Desa dan sebagainya.
- 4) Norma-norma sosial yang berlaku.

c. Di Lingkungan Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
- 2) Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).
- 3) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.

Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila.
- 2) UUD NRI 1945.
- 3) Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang- Undang RI Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya.

4) Peraturan Pemerintah.

5) Keputusan Presiden.

6) Peraturan daerah.

Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

E. Model Pembelajaran

Pendekatan	: Saintifik
Model Pembelajaran	: Discovery Learning
Metode Pembelajaran	: Diskusi. Mind Mapping

F. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 4

Kegiatan	Deskripsi kegiatan	Waktu
Pendahuluan	<p>5. Guru mengucapkan salam, mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, dan mengawali proses pembelajaran dengan berdoa.</p> <p>Peserta didik menjawab salam, mengecek kerapian dan kebersihan ruang kelas, dan berdoa.</p> <p>6. Guru melakukan presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan.</p> <p>Peserta didik menyiapkan alat tulis dan buku-buku yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran.</p> <p>7. Guru memberikan mengingatkan siswa mengenai pembelajaran pada pertemuan sebelumnya.</p> <p>Peserta didik memperhatikan guru dan ikut mengingat materi pada pertemuan sebelumnya.</p>	15 Menit

	8. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai serta menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan.	
Inti	<p>1. Mengamati</p> <p>Guru menayangkan gambar atau video yang berkaitan dengan materi partisipasi warga negara di dalam sistem politik.</p> <p>Peserta didik diminta untuk mengamati gambar atau tayangan video yang berkaitan dengan materi partisipasi warga negara di dalam sistem politik.</p> <p>2. Menanya</p> <p>Guru memotivasi peserta didik untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi partisipasi warga negara dalam sistem politik.</p> <p>Peserta didik mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau tayangan video atau penjelasan guru secara umum terkait dengan materi partisipasi warga negara didalam sistem politik.</p> <p>3. Mengumpulkan Informasi</p> <p>Guru mempersilakan peserta didik untuk mencari informasi terkait dengan materi, baik dari sumber buku maupun dari internet.</p> <p>Peserta didik secara berkelompok mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan materi partisipasi warga negara didalam sistem politik.</p> <p>Kelas dibagi menjadi 5 atau 7 kelompok, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok 1 dan 2 membuat pertanyaan mengenai pengertian partisipasi politik warga negara. • Kelompok 3 dan 4 membuat pertanyaan mengenai partisipasi warga negara di lingkungan sekolah • Kelompok 5 dan 6 membuat pertanyaan 	60 Menit

	<p>mengenai partisipasi warga negara di lingkungan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok 7 membuat pertanyaan mengenai partisipasi warga negara di lingkungan negara. <p>4.Mengasosiasi</p> <p>Peserta didik bekerja dikelompok masing-masing sesuai dengan tema yang sedang menjadi bahan diskusi yaitu tentang partisipasi warga negara di dalam sistem politik.</p> <p>3. Mengkomunikasikan</p> <p>Peserta didik secara bersama-sama melakukan koreksi pada pekerjaan mereka.</p> <p>Peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil diskusi mereka secara tertulis.</p>	
Penutup	<p>5. Guru menanyakan pada peserta didik apakah sudah memahami materi tentang partisipasi warga negara didalam sistem politik.</p> <p>Peserta didik menanggapi pertanyaan dari guru, apabila ada materi yang belum jelas ditanyakan kepada guru.</p> <p>6. Guru memberikan kesimpulan kepada peserta didik.</p> <p>7. Guru menyampaikan motivasi untuk peserta didik agar terus belajar.</p> <p>8. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p> <p>Peserta didik mengucapkan terima kasih kepada guru.</p>	15 Menit

G. Penilaian pembelajaran

1. Instrumen dan Teknik Penilaian

No	Aspek	Teknik	Bentuk Instrumen
1	Sikap Spiritual/Sikap Sosial	Observasi kelas kegiatan pengamatan dan diskusi	Lembar observasi

2	Pengetahuan	Tes tulis	Soal uraian
3	Ketrampilan	Penilaian hasil diskusi	Lembarpenilaian

a. Penilaian Sikap

Rubrik Penilaian Sikap
kegiatan Pengamatan dan Diskusi

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		Kedisiplinan	Partisipasi	Kerjasama		

Keterangan :

Aspek Kedisiplinan

- Skor 3 Mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur dan tepat waktu
 2 Mengerjakan tugas sesuai prosedur/ tepat waktu
 1 Tidak mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tidak tepat waktu

Aspek Partisipasi

- Skor 3 Melakukan pengamatan/menyimak, pencatatan dan urun pendapat atau solusi
 2 Melakukan pengamatan/menyimak/pencatatan/urun pendapat atau solusi
 1 Tidak melakukan pengamatan, pencatatan dan tidak urun pendapat/solusi

Aspek Kerjasama :

- Skor 3 Melakukan pengamatan, pencatatan dan penyelesaian tugas secara bersama
 2 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara bersama
 1 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara individual

Skor maksimum adalah $3 \times 3 = 9$

Nilai = $\frac{\text{jumlah skor}}{\text{skor maksimum}} \times 100$

Jumlah maksimum

j. Penilaian Pengetahuan

NO	NAMA	NILAI	
1			
2			
3			

Bentuk Soal

1. Jelaskan pengertian dari partisipasi politik?
2. Sebutkan cirri-ciri masyarakat politik? 3 saja!
3. Sebutkan perilaku yang mencerminkan partisipasi politik di lingkungan sekolah? 3 saja!
4. Sebutkan perilaku yang mencerminkan partisipasi politik di lingkungan masyarakat? 3 saja!
5. Sebutkan perilaku yang mencerminkan partisipasi politik di lingkungan negara? 3 saja!

Kunci Jawaban

1. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya
2. selalu ada kelompok yang diperintah dan memerintah
 - Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan
 - Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat
3. – pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua lembaga ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
 - Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti
 - Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan disekolah
4. – forum warga
 - Pemilhan ketua RT, RW, kepala desa, dan sebagainya
 - Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi lembaga masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.
5. – pemilihan umum untuk memilih anggota legislative dan presiden

- Pemilihan kepala daerah secara langsung (PILKADA)
- Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.

k. Penilaian Keterampilan

Rubrik Penilaian Keterampilan

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		A	B	C		

Keterangan :

A = Penguasaan materi saat mempresentasikan hasil diskusi

B = cara penyampaian hasil diskusi di depan kelas

C = Tanggapan atau jawaban yang diberikan

Petunjuk penilaian

Penguasaan materi

- Skor 3, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan menjawab pertanyaan dengan baik
- Skor 2, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.

Cara penyampaian

- Skor 3, untuk siswa yang lancar dan penyampaian dapat dimengerti
- Skor 2, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian dapat dimengerti.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian tidak dapat dimengerti

Tanggapan dalam Menjawab

- Skor 3, untuk peserta didik yang memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan
- Skor 2, untuk peserta didik yang sedikit memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.

- Skor 1, untuk peserta didik yang tidak memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.

2. Remedial

Remedial dilakukan untuk siswa yang belum menguasai materi atau yang belum dapat memahami materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75 %. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75 % maka kegiatan remedial dapat dilakukan antara lain :

10. Mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas
11. Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas
12. Memberikan kesempatan untuk tes perbaikan.

Perlu diperhatikan bahwa materi yang diulang atau dites kembali adalah materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan analisis belum dikuasai oleh peserta didik. Untuk program remedial peserta didik diberikan soal-soal untuk dikerjakan kembali agar peserta didik semakin memahami materi yang ada dikerjakan di kelas dan close book.

3. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi dan secara pribadi sudah mampu memahami mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Bentuk pengayaan dapat dilakukan dengan antara lain :

2. Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya.
3. Guru memberikan beberapa materi yang relevan dengan bab tersebut untuk dipelajari di rumah kembali. Selain itu guru menyarankan peserta didik untuk mencari materi maupun informasi dari sumber lain yang terkait dengan bab tersebut.

H. Media

1. Power Point
2. Buku sumber belajar

I. Alat dan Bahan


1. LCD
2. Proyektor
3. Speaker

J. Sumber belajar

- a. Buku Siswa SMA SMK MA/MAK kelas X, Tolib S.Pd. MM., Nuryadi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pusat kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- b. Buku Guru SMA SMK MA/MAK kelas X, Tolib S.Pd. MM., Nuryadi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pusat kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Sleman, 24 Oktober 2017

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran



Dartono, S.Pd
NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan

Terbimbing



Lina Nur Savangah
NIM 14401244006

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**



DISUSUN OLEH :

NAMA MAHASISWA : LINA NUR SAVANGAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
MATERI : PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
KELAS/ SEMESTER : X / GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018

SMK KARYA RINI YHI KOWANI YOGYAKARTA
JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 86 DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA
2017

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMK Karyarini Depok
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : X/ 1
Alokasi Waktu : 1X pertemuan (2x45 menit)

A. Kompetensi Inti

- KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	No	Indikator Pencapaian Kompetensi
3.5	Menganalisis hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	3.5.1	Menjelaskan mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik
		3.5.2	Indonesia
		3.5.3	Mengidentifikasi Kedudukan dan Peran dari Pemerintah Pusat
		3.5.4	Mengidentifikasi Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

			Menjelaskan Hubungan Fungsional dan Struktural pemerintah Pusat dan Daerah.
--	--	--	---

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 5

1. Peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian Otonomi daerah
2. Peserta didik dapat menjelaskan mengenai Sentralisasi dan Desentralisasi
3. Peserta didik dapat menunjukkan landasan hukum penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
4. Peserta didik dapat menyajikan dan mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah di depan kelas.

D. Materi Pembelajaran

A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *de* yang berarti lepas, dan *centerum* yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok *Anglo Saxon* dan *Kontinental*. Kelompok **Anglo Saxon** mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan *dekonsentrasi* maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut *devolusi*. *Devolusi* berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Adapun Kelompok **Kontinental** membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

Menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.

Gambar 1.1 Contoh Rapat Dewan Perwakilan Daerah



Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

Menurut Amran Muslimin (2009:120, desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian :

1. Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
3. Desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari

urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat.
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien.
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut

- a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat.
- b. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
- d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
- e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.
- g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
- h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
- i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi.

- j. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu.
- k. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.

Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Besarnya badan-badan structural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
- b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
- c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
- d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
- e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

2. Otonomi Daerah

Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi daerah di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. C. J. Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusanurusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.
- b. J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.
- c. Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
- d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari Desentralisasi.

3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.

4. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- j. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia..

- a. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (*Eenheidstaat*), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.

- b. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Berkaitan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

- 1) *Dimensi Politik*, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.
- 2) *Dimensi Administratif*, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
- 3) Kabupaten/kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

- a. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah.
- b. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
- c. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Selain itu terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Prinsip Kesatuan

Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

3. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab

Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.

3. Prinsip Penyebaran

Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya.

4. Prinsip Keserasian

Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian.

5. Prinsip Pemberdayaan

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunann dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

E. Model Pembelajaran

Pendekatan	: Saintifik
Model Pembelajaran	: Discovery Learning
Metode Pembelajaran	: Diskusi, Presentasi

F. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 5

Kegiatan	Deskripsi kegiatan	Waktu
Pendahuluan	<p>6. Guru mengucapkan salam, mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, dan mengawali proses pembelajaran dengan berdoa.</p> <p>Peserta didik menjawab salam, mengecek kerapian dan kebersihan ruang kelas, dan berdoa.</p> <p>7. Guru melakukan presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan.</p> <p>Peserta didik menyiapkan alat tulis dan buku-buku yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran.</p> <p>8. Guru memberikan mengingatkan siswa mengenai</p>	15 Menit

	<p>pembelajaran pada pertemuan sebelumnya mengenai sistem Pertahanan dan keamanan Negara.</p> <p>Peserta didik memperhatikan guru dan ikut mengingat materi pada pertemuan sebelumnya.</p> <p>9. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai serta menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan.</p>	
Inti	<p>8. Mengamati</p> <p>Guru menayangkan gambar atau video yang berkaitan dengan materi Desentralisasi atau Otonomi Daerah.</p> <p>Peserta didik diminta untuk mengamati gambar atau tayangan video yang berkaitan dengan materi Desentralisasi atau Otonomi Daerah.</p> <p>9. Menanya</p> <p>Guru memotivasi peserta didik untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi Desentralisasi atau otonomi Daerah.</p> <p>Peserta didik mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau tayangan video atau penjelasan guru secara umum terkait dengan materi Desentralisasi atau Otonomi Daerah.</p> <p>3.Mengumpulkan Informasi</p> <p>Guru mempersilakan peserta didik untuk mencari informasi terkait dengan materi, baik dari sumber buku maupun dari internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik secara berkelompok mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan materi Desentralisasi atau Otonomi Daerah. • Peserta didik bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setiap kelompok di bagikan amplop yang berisi soal-soal mengenai materi Desentralisasi atau Otonomi daerah. 	60 Menit

	<p>Selanjutnya peserta didik mengerjakan soal-soal tersebut pada lembar jawab yang telah disediakan.</p> <p>4.Mengasosiasi</p> <p>Peserta didik bekerja dikelompok masing-masing sesuai dengan tema yang sedang menjadi bahan diskusi yaitu tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah.</p> <p>10. Mengkomunikasikan</p> <p>Setiap kelompok menunjuk perwakilannya untuk mau ke depan dan menuliskannya di papan tulis. Selanjutnya hasil pekerjaan peserta didik di koreksi secara bersama-sama.</p> <p>Peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil diskusi mereka secara tertulis.</p>	
Penutup	<p>5. Guru menanyakan pada peserta didik apakah sudah memahami materi tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah.</p> <p>6. Guru memberikan kesimpulan kepada peserta didik.</p> <p>7. Guru menyampaikan motivasi untuk peserta didik agar terus belajar.</p> <p>8. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>	15 Menit

G. Penilaian pembelajaran

1. Instrumen dan Teknik Penilaian

No	Aspek	Teknik	Bentuk Instrumen
1	Sikap Spiritual/Sikap Sosial	Observasi kelas kegiatan pengamatan dan diskusi	Lembar observasi
2	Pengetahuan	Tes tulis	Soal uraian
3	Ketrampilan	Penilaian hasil diskusi	Lembarpenilaian

1. Penilaian Sikap

Rubrik Penilaian Sikap
kegiatan Pengamatan dan Diskusi

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		Kedisiplinan	Partisipasi	Kerjasama		

Keterangan :

Aspek Kedisiplinan

- Skor 3 Mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur dan tepat waktu
 2 Mengerjakan tugas sesuai prosedur/ tepat waktu
 1 Tidak mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tidak tepat waktu

Aspek Partisipasi

- Skor 3 Melakukan pengamatan/menyimak, pencatatan dan urun pendapat atau solusi
 2 Melakukan pengamatan/menyimak/pencatatan/urun pendapat atau solusi
 1 Tidak melakukan pengamatan, pencatatan dan tidak urun pendapat/solusi

Aspek Kerjasama :

- Skor 3 Melakukan pengamatan, pencatatan dan penyelesaian tugas secara bersama
 2 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara bersama
 1 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara individual

Skor maksimum adalah $3 \times 3 = 9$

Nilai = jumlah skor

$$\frac{\text{Jumlah skor}}{\text{Jumlah maksimum}} \times 100$$

Jumlah maksimum

m. Penilaian Pengetahuan

NO	NAMA	NILAI	
1			
2			
3			

Pertemuan pertama

Soal :

n. Penilaian Keterampilan

Rubrik Penilaian Keterampilan

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		A	B	C		

Keterangan :

A = Penguasaan materi saat mempresentasikan hasil diskusi

B = cara penyampaian hasil diskusi di depan kelas

C = Tanggapan atau jawaban yang diberikan

Petunjuk penilaian

Penguasaan materi

- Skor 3, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan menjawab pertanyaan dengan baik
- Skor 2, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.

Cara penyampaian

- Skor 3, untuk siswa yang lancar dan penyampaian dapat dimengerti

- Skor 2, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian dapat dimengerti.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian tidak dapat dimengerti
Tanggapan dalam Menjawab
- Skor 3, untuk peserta didik yang memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan
- Skor 2, untuk peserta didik yang sedikit memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.
- Skor 1, untuk peserta didik yang tidak memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.

2. Remedial

Remedial dilakukan untuk siswa yang belum menguasai materi atau yang belum dapat memahami materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75 %. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75 % maka kegiatan remedial dapat dilakukan antara lain :

1. Mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas
2. Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas
3. Memberikan kesempatan untuk tes perbaikan.

Perlu diperhatikan bahwa materi yang diulang atau dites kembali adalah materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan analisis belum dikuasai oleh peserta didik. Untuk program remedial peserta didik diberikan soal-soal untuk dikerjakan kembali agar peserta didik semakin memahami materi yang ada dikerjakan di kelas dan close book.

3. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi dan secara pribadi sudah mampu memahami mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Bentuk pengayaan dapat dilakukan dengan antara lain :

- 8 Guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis atau membacakan di depan kelas.
- 9 Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya.
- 10 Guru memberikan beberapa materi yang relevan dengan bab tersebut untuk dipelajari di rumah kembali. Selain itu guru menyarankan peserta didik untuk mencari materi maupun informasi dari sumber lain yang terkait dengan bab tersebut.

H. Media

1. Power Point
2. Buku sumber belajar

I. Alat dan Bahan


7. LCD
8. Proyektor
9. Speaker

J. Sumber belajar

- a. Buku Siswa SMA/SMK/MA/MAK kelas X, Tolib S.Pd. MM., Nuryadi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pusat kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- b. Buku Guru SMA/SMK/MA/MAK kelas X, Tolib S.Pd. MM., Nuryadi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pusat kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

Sleman, 08 November 2017

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran



Dartono, S.Pd
NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan
Terbimbing



Lina Nur Savangah
NIM 14401244006

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**



DISUSUN OLEH :

NAMA MAHASISWA : LINA NUR SAVANGAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
MATERI : KEMENTERIAN REPUBLIK
INDONESIA
KELAS/ SEMESTER : XI / GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018

SMK KARYA RINI YHI KOWANI YOGYAKARTA
JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 86 DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA
2017

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

BAB 4

Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintah Negara, Kementerian Negara, dan Pemerintahan Daerah

Satuan Pendidikan : SMK KARYA RINI

Kelas / Semester : XI/1

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PEMBELAJARAN
1.1 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	1. Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI 2. Menganalisis kedudukan dan fungsi kementerian negara pada NKRI 3. Menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI
1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal	4. Menganalisis penyelenggaraan

<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (Ipoleksosbudhankam dan hukum)</p> <p>1.3 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>1.4 Menyaji hasil analisis tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>pemerintah daerah di Indonesia</p>
--	---------------------------------------

PERTEMUAN KEDUA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui kegiatan mengamati buku teks PPKn K13, menanya, mengumpulkan informasi dari media cetak maupun internet, mengasosiasi dan mengkomunikasikan diharapkan peserta Didik dapat :

1. Menganalisis Tugas dan Wewenang Kementrian Indonesia
2. Menganalisis kedudukan dan fungsi kementerian Negara RI
3. Menganalisis kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan non kementerian.
4. Menyaji hasil analisis terkait kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian .

B. MATERI PEMBELAJARAN

II. Kementerian Negara Indonesia

Fakta:



Sumber: foto WWF/Jurgen Freud, indonesia.com

Gambar 4.10 Indonesia kaya hasil perikanan dan kelautan yang menunjang sektor perekonomian masyarakat. Kegiatan perikanan dan kelautan harus memiliki tata kelola yang baik agar kegiatan ini menjadi kegiatan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan peran dari pemerintahan khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Konsep:

Menganalisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut UUD 1945

Prinsip:

Menjelaskan tugas kementerian Negara Republik Indonesia

Prosedur:

Ketentuan mengenai menteri diatur pada Pasal 17 UUD 1945 Bab V tentang Kementerian Negara, yang berbunyi sebagai berikut.

- a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
- b. Menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- d. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

C. METODE PEMBELAJARAN

Pendekatan : scientific

Model Pembelajaran : Problem based Learning

Metode : Diskusi, Presentasi dan Tanya

Jawab

D. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN

1. Media :
 - a. Kardiman, Yuyus dkk. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga
 - b. Power point tentang Kementerian Negara Indonesia
 - c. Video tentang kementerian negara Indonesia
 2. Alat :
 - a. LCD
 - b. Proyektor
 - c. Spidol
 - d. Whiteboard
 - e. Penghapus
-
1. Sumber Pembelajaran
 - a. *Buku Teks Facil: Advanced Learning Pancasila and Civic Education II*, Tim Penulis Grafindo Media Pratama, 2013. Buku yang diunduh dari bse. Kemendikbud.go.id. Pancasila Paripurna Pengarang M. Latif serta Majalah Suara Muhammadiyah, Majalah MATAN, dan Buku yang RELEVAN (CIVIC EDUCATION) PP Muhammadiyah Yogyakarta, dan PPKn dari Mahkamah Konstitusi, Amandemen UUD 1945
 - b. Kardiman, Yuyus dkk. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdo'a untuk memulai pelajaran 2. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). 3. Memotivasi siswa agar semangat dan 	`10 menit

	<p>mengungkapkan rasa syukur karena Indonesia menerapkan system demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>4. Guru menyampaikan topik tentang “Kementerian Negara Indonesia”</p> <p>5. Apresepsi</p> <p>a.Guru mengingatkan kembali tentang materi yang telah dipelajari minggu lalu.</p> <p>b.Guru menyampaikan berita aktual terkait materi yang akan diajarkan</p>	
Inti	<p><i>Mengamati (Observing)</i></p> <p>Peserta didik diminta untuk mengamati video tentang kementerian negara Indonesia</p> <p><i>Menanya (Questioning)</i></p> <p>Peserta didik dapat diberi motivasi mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dari video yang ditampilkan</p> <p><i>Mengumpulkan Informasi</i></p> <p>Peserta didik dianjurkan untuk menggunakan sumber dari Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI terbitan Erlangga buku sumber lainnya yang relevan, internet, media lainnya dalam mempelajari</p> <p><i>Mengasosiasi (Associating)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru menyampaikan kompetensi dan memberikan penjelasan singkat mengenai materi pembelajaran. 	70 menit

	<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa. • Membagi siswa dalam beberapa kelompok dengan topik diskusi tentang Tugas dan wewenang dari kementerian negara <p>Mengkomunikasikan (<i>Communicating</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok secara bergantian dan peserta didik lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawabannya • Hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru 	
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik diberi ulasan singkat tentang materi yang baru saja didiskusikan • Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut. • Peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini . • Guru menyampaikan rencana pembelajaran dan memberikan penanaman kesadaran berkonstitusi dan menutup kegiatan dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME karena telah berjalan baik dan lancar. 	10 enit

F. Penilaian pembelajaran

1. Instrumen dan Teknik Penilaian

No	Aspek	Teknik	Bentuk Instrumen
----	-------	--------	------------------

1	Sikap Spiritual/Sikap Sosial	Observasi kelas kegiatan pengamatan dan diskusi	Lembar observasi
2	Pengetahuan	Tes tulis	Soal uraian
3	Ketrampilan	Penilaian hasil diskusi	Lembarpenilaian

o. Penilaian Sikap

Rubrik Penilaian Sikap
kegiatan Pengamatan dan Diskusi

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		Ked	Par	Ker		

Keterangan :

Aspek Kedisiplinan

- Skor 3 Mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur dan tepat waktu
 2 Mengerjakan tugas sesuai prosedur/ tepat waktu
 1 Tidak mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tidak tepat waktu

Aspek Partisipasi

- Skor 3 Melakukan pengamatan/menyimak, pencatatan dan urun pendapat
atau solusi
 2 Melakukan pengamatan/menyimak/pencatatan/urun pendapat atau
solusi
 1 Tidak melakukan pengamatan, pencatatan dan tidak urun
pendapat/solusi

Aspek Kerjasama :

- Skor 3 Melakukan pengamatan, pencatatan dan penyelesaian tugas secara
bersama
 2 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara bersama

- Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara individual

Skor maksimum adalah $3 \times 3 = 9$

Nilai = $\frac{\text{jumlah skor}}{\text{Jumlah maksimum}} \times 100$

Jumlah maksimum

p. Penilaian Pengetahuan

NO	NAMA	NILAI	
1			
2			

Pertemuan pertama

Bentuk Soal

- Jelaskan perbedaan antara lembaga kementrian Indonesia dengan Lembaga Pemerintah Nonkementerian!
- Sebutkan Dasar hukum yang mengatur tentang kementerian di Indonesia!
- Tuliskan isi ketentuan mengenai menteri yang diatur pada Bab V tentang Kementerian Negara dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945!
- Jelaskan Tugas dan Wewenang dari Kementerian Indonesia!
- Sebutkan salah satu kementerian di Indonesia dan tuliskan satu permasalahan yang dihadapi kementerian tersebut!

q. Penilaian Keterampilan

Rubrik Penilaian Keterampilan

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		A	B	C		

Keterangan :

A = Penguasaan materi saat mempresentasikan hasil diskusi

B = cara penyampaian hasil diskusi di depan kelas

C = Tanggapan atau jawaban yang diberikan

Petunjuk penilaian

Penguasaan materi

- Skor 3, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan menjawab pertanyaan dengan baik
- Skor 2, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.

Cara penyampaian

- Skor 3, untuk siswa yang lancar dan penyampaian dapat dimengerti
- Skor 2, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian dapat dimengerti.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian tidak dapat dimengerti

- Skor 3 , untuk peserta didik yang memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan
- Skor 2, untuk peserta didik yang sedikit memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.
- Skor 1, untuk peserta didik yang tidak memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.

Sleman, 10 Oktober 2017

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran



Dartono, S.Pd
NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan
Terbimbing



Lina Nur Savangah
NIM 14401244006

LAMPIRAN

A. Kementerian Negara Indonesia

1. Tugas dan Wewenang Kementerian Indonesia

Kementerian negara atau yang biasa disebut kementerian adalah lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta dan berbeda di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Ketentuan mengenai menteri di atur pada Pasal 17 UUD 1945 Bab V tentang Kementerian Negara, yaitu berbunyi sebagai berikut.

- a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- b. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
- d. Pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Klasifikasi Kementerian di Indonesia

Setiap kementerian membidangi UU No. 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara menyebutkan bahwa kementerian maksimal berjumlah 34. Berdasarkan Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, kementerian-kementerian tersebut sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintah yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri sebagai berikut.
 - 1) Kementerian Luar Negeri
 - 2) Kementerian Dalam Negeri
 - 3) Kementerian Pertahanan
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.
 - 1) Kementerian Agama
 - 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 3) Kementerian Keuangan
 - 4) Kementerian Perhubungan
 - 5) Kementerian pendidikan dan kebudayaan
 - 6) Kementerian Kesehatan

- 7) Kemeterian Sosial
 - 8) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 9) Kementerian Perindustrian
 - 10) Kementerian Perdagangan
 - 11) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 12) Kementerian Pekerjaan Umum
 - 13) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 14) Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - 15) Kementerian Pertanian
 - 16) Kementerian Kelautan dan Perikanan
- c. Urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri sebagai berikut.
- 1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - 3) Kementerian Sekretariat Negara
 - 4) Kementerian Badan usaha milik negara
 - 5) Kementerian Lingkungan Hidup
 - 6) Kementerian Riset dan Teknologi
 - 7) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah
 - 8) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 9) Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - 10) Kementerian Perumahan Rakyat
 - 11) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan diatas, terdapat kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya Kementerian koordinator, terdiri atas:

- 1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- 2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 3) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

2. Lembaga Pemerintahan NonKementerian

Lembaga pemerintahan nonkementerian (LPNK) adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut daftar LPNK beserta kementerian yang mengkoordinasikannya.

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bagi BPS, Bapenas, BKPM, Bulog dan Baranti
- b. Menteri Koordinator Bidang Politik, sosial dan Keamanan bagi lemsaneg
- c. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi BPN
- d. Menteri Kesehatan dan kesejahteraan Sosial bagi BPOM
- e. Menteri pendidikan Nasional bagi Perpusnas.

Terdapat pengecualian: BIN(Badan Intelijen Negara) dan BPKP (Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan) tidak dikoordinasikan oleh menteri.

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**



DISUSUN OLEH :

NAMA MAHASISWA : LINA NUR SAVANGAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
MATERI : PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
KELAS/ SEMESTER : XI / GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018

SMK KARYA RINI YHI KOWANI YOGYAKARTA
JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 86 DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA
2017

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

BAB 4

Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintah Negara, Kementerian Negara, dan Pemerintahan Daerah

Satuan Pendidikan : SMK KARYA RINI
Kelas / Semester : XI/1
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

KOMPETENSI INTI

5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
6. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
7. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
8. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PEMBELAJARAN
1.5 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	5. Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI 6. Menganalisis kedudukan dan fungsi kementerian negara pada NKRI 7. Menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI
1.6 Mengamalkan nilai-nilai yang	

<p>terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (Ipoleksosbudhankam dan hukum)</p> <p>1.7 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>1.8 Menyaji hasil analisis tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>8. Menganalisis penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia</p>
---	---

PERTEMUAN KETIGA

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui kegiatan mengamati buku teks PPKn K13, menanya, mengumpulkan informasi dari media cetak maupun internet, mengasosiasi dan mengkomunikasikan diharapkan peserta Didik dapat :

1. Menganalisis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia
2. Menjelaskan Kewenangan Pemerintah
3. Menganalisis Hubungan Pemerintah Daerah dengan Kementerian
4. Menyajikan hasil analisis tentang kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka NKRI

C. MATERI PEMBELAJARAN

III. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia

Fakta:



Sumber: humaswajo.com

Bupati beserta perangkat daerah adalah urusan penyelenggara pemerintah di daerah.

Konsep:

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Prinsip:

Dalam pasal 26 UU No 39 Tahun 2008, hubungan antara kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Prosedur:

Pemerintah daerah harus membantu melancarkan program pemerintah pusat dan mempunyai wewenang tersendiri dalam mengatur daerahnya.

D. METODE PEMBELAJARAN

Pendekatan : scientific
Model Pembelajaran : Problem based learning
Metode : Diskusi, Presentasi dan Tanya Jawab

E. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN

1. Media :

- a. Kardiman, Yuyus dkk. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga
 - b. Power point tentang Penyelenggaraan Pemerintah daerah di Indonesia
2. Alat :
- a. LCD
 - b. Proyektor
 - c. Spidol
 - d. Whiteboard
 - e. Penghapus
3. Sumber Pembelajaran
- a. *Buku Teks Facil: Advanced Learning Pancasila and Civic Education II*, Tim Penulis Grafindo Media Pratama, 2013. Buku yang diunduh dari bse. Kemendikbud.go.id. Pancasila Paripurna Pengarang M. Latif serta Majalah Suara Muhammadiyah, Majalah MATAN, dan Buku yang RELEVAN (CIVIC EDUCATION) PP Muhammadiyah Yogyakarta, dan PPKn dari Mahkamah Konstitusi, Amandemen UUD 1945
 - b. Kardiman, Yuyus dkk. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdo'a untuk memulai pelajaran 2. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). 3. Memotivasi siswa agar semangat dan mengungkapkan rasa syukur karena Indonesia menerapkan system demokrasi dalam kehidupan 	10 menit

	<p>bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>4. Guru menyampaikan topik tentang “ Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia” .</p> <p>5. Apresepsi</p> <p>a.Guru mengingatkan kembali tentang materi yang telah dipelajari minggu lalu.</p> <p>b. Guru menyampaikan berita aktual terkait materi yang akan diajarkan</p>	
Inti	<p><i>Mengamati (Observing)</i></p> <p>Peserta didik diminta untuk mengamati gambar tentang</p> <p><i>Menanya (Questioning)</i></p> <p>Peserta didik dapat diberi motivasi mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dari gambar yng ditampilkan</p> <p><i>Mengumpulkan Informasi</i></p> <p>Peserta didik dianjurkan untuk mwnggunakan sumber dari Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X1 terbitan Erlangga buku sumber lainnya yang relevan, internet, media lainnya dalam mempelajari</p> <p><i>Mengasosiasi (Associating)</i></p> <p>Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis sistem pembagian kekuasaan, hubungan dengan pemerintah pusat dan kementerian tentang daerah otonom di Indonesia dengan</p>	70 menit

	<p>menggunakan berbagai sumber, media cetak dan media elektronik.</p> <p>Mengkomunikasikan (<i>Communicating</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok secara bergantian dan peserta didik lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawabannya • Hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru 	
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik diberi ulasan singkat tentang materi yang baru saja didiskusikan • Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut. • Peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini . • Guru menyampaikan rencana pembelajaran dan memberikan penanaman kesadaran berkonstitusi dan menutup kegiatan dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME karena telah berjalan baik dan lancar. 	10 menit

F. PENILAIAN

1. Instrumen dan Teknik Penilaian

No	Aspek	Teknik	Bentuk Instrumen
1	Sikap Spiritual/Sikap Sosial	Observasi kelas kegiatan pengamatan dan diskusi	Lembar observasi
2	Pengetahuan	Tes tulis	Soal uraian
3	Ketrampilan	Penilaian hasil diskusi	Lembarpenilaian

r. Penilaian Sikap

Rubrik Penilaian Sikap
kegiatan Pengamatan dan Diskusi

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		Ked	Par	Ker		

Keterangan :

Aspek Kedisiplinan

- Skor 3 Mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur dan tepat waktu
2 Mengerjakan tugas sesuai prosedur/ tepat waktu
1 Tidak mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tidak tepat waktu

Aspek Partisipasi

- Skor 3 Melakukan pengamatan/menyimak, pencatatan dan urun pendapat atau solusi
2 Melakukan pengamatan/menyimak/pencatatan/urun pendapat atau solusi
1 Tidak melakukan pengamatan, pencatatan dan tidak urun pendapat/solusi

Aspek Kerjasama :

- Skor 3 Melakukan pengamatan, pencatatan dan penyelesaian tugas secara bersama
2 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara bersama
1 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara individual

Skor maksimum adalah $3 \times 3 = 9$

Nilai = $\frac{\text{jumlah skor}}{\text{Jumlah maksimum}} \times 100$

Jumlah maksimum

s. Penilaian Pengetahuan

NO	NAMA	NILAI	
1			
2			

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat!

1. Di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari dasar hukum yang mengaturnya. Jelaskan pengertian pemerintah Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004!
2. Sebutkan dan jelaskan asas-asas yang mengatur tentang pemerintahan daerah!
3. Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari hak dan kewajiban . Jelaskan hak dan kewajiban dari otonomi daerah!
4. Carilah salah satu contoh daerah otonom. Analisislah daerah otonom tersebut berdasarkan sistem pembagian kekuasaanya, hubungan dengan pemerintah pusat dan kementerian!
5. Jelaskan hubungan antara Pemerintah daerah dengan keementerian!

t. Penilaian Keterampilan

Rubrik Penilaian Keterampilan

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		A	B	C		

Keterangan :

A = Penguasaan materi saat mempresentasikan hasil diskusi

B = cara penyampaian hasil diskusi di depan kelas

C = Tanggapan atau jawaban yang diberikan

Petunjuk penilaian

Penguasaan materi

- Skor 3, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan menjawab pertanyaan dengan baik
- Skor 2, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.

Cara penyampaian

- Skor 3, untuk siswa yang lancar dan penyampaian dapat dimengerti
- Skor 2, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian dapat dimengerti.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian tidak dapat dimengerti

Tanggapan dalam Menjawab

- Skor 3 , untuk peserta didik yang memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan
- Skor 2, untuk peserta didik yang sedikit memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.
- Skor 1, untuk peserta didik yang tidak memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan

Sleman, 17 Oktober 2017

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran



Dartono, S.Pd

NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan

Terbimbing



Lina Nur Savangah

NIM 14401244006

LAMPIRAN

C. Pemerintahan Daerah di Indonesia

1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai urusan penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretaris daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

UUD 1945 sendiri membahas pemerintahan daerah pada Pasal 18, 18A, dan 18B. di dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
- d. Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah secara vertikal disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 meliputi hal-hal berikut:

- a. Pemberian sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
- b. Pengalokasian dan perimbangan kepada pemerintah daerah
- c. Pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintahan

Adapun hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintah daerah secara horisontal meliputi;

- a. Bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota
- b. Pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama
- c. Pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah

d. Pinjaman dan atau hibah antar pemerintah daerah

1. Hubungan Pemerintahan Daerah dengan Kementerian

Menurut Pasal 26 UU 39 Tahun 2008, hubungan antara kementerian dan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**



DISUSUN OLEH :

NAMA MAHASISWA : LINA NUR SAVANGAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
MATERI : PRAKTEK PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM MASYARAKAT
KELAS/ SEMESTER : XI / GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018

SMK KARYA RINI YHI KOWANI YOGYAKARTA
JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 86 DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA
2017

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

BAB 5

Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat

Satuan Pendidikan : SMK KARYA RINI
Kelas / Semester : XI/1
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

KOMPETENSI INTI

9. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
10. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
11. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
12. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PEMBELAJARAN
1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya.	9. Memahami unsur-unsur dalam sistem penegakan hukum 10. Menganalisis sistem penegakan hukum yang Akuntabel
1.2 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	11. Menganalisis penegakan hukum dalam masyarakat

<p>1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>1.3 Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.</p> <p>1.4 Menyaji hasil analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>	
---	--

PERTEMUAN PERTAMA (2X 45 MENIT)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui kegiatan mengamati buku teks PPKn K13, menanya, mengumpulkan informasi dari media cetak maupun internet, mengasosiasi dan mengkomunikasikan diharapkan peserta Didik dapat :

- 1) Menjelaskan unsur-unsur dalam sistem penegakan hukum
- 2) Menganalisis langkah-langkah sistem penegakan hukum yang akuntabel
- 3) Menganalisis penegakan hukum dalam masyarakat
- 4) Menyajikan hasil analisis tentang penegakan hukum dalam masyarakat

B. MATERI PEMBELAJARAN

1. Penegakan Hukum dalam Masyarakat

Fakta:



Sumber: poltakbar.com

Gambar 5.5 Mematuhi rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu barometer yang dapat mengukur tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan untuk kebaikan bersama.

Konsep:

Dalam rangka menjalankan penegakan hukum, setidaknya terdapat empat unsur penting yaitu penegak hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat dan pelaksanaan (penegak) hukum.

Prinsip:

Setiap orang memiliki derajat yang sama dimata hukum (everybody are equal before the law). Penegak hukum mencakup bidang kepolisian, kehakiman, dan lembaga permasyarakatan. Penegak hukum dapat terlaksana dengan baik apabila penegak hukumnya memiliki moralitas dan integritas yang baik. Dalam menjalankan penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif.

Prosedur:

Sistem penegakan hukum yang akuntabel dalam pelaksanaan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Adapun langkah-langkah untuk membangun sistem penegak hukum yang akuntabel diantaranya:

- a. Memperbaharui dan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penegak hukum
- c. Pemberian Rewards and Punishment bagi penegak hukum
- d. Pemberdayaan lembaga-lembaga pendukung penegak hukum dan lembaga pengawasan profesi penegak hukum

- e. Pemberdayaan masyarakat dibidang hukum
- f. Pelaksanaan hukum (penegakan hukum yang konsisten)

C. METODE PEMBELAJARAN

Pendekatan : scientific
 Model Pembelajaran : Problem based learning
 Metode : Diskusi dan Presentasi

D. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN

- 2. Media :
 - d. Kardiman, Yuyus dkk. 2014.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraaan. Jakarta: Erlangga
 - e. Power point tentang Penegakan hukum dalam Masyarakat
- 3. Alat :
 - f. LCD
 - g. Proyektor
 - h. Spidol
 - i. Whiteboard
 - j. Penghapus
 - k. Kertas HVS
- 4. Sumber Pembelajaran
 - a. *Buku Teks Facil: Advanced Learning Pancasila and Civic Education II*, Tim Penulis Grafindo Media Pratama, 2013. Buku yang diunduh dari bse. Kemendikbud.go.id. Pancasila Paripurna Pengarang M. Latif serta Majalah Suara Muhammadiyah, Majalah MATAN, dan Buku yang RELEVAN (CIVIC EDUCATION) PP Muhammadiyah Yogyakarta, dan PPKn dari Mahkamah Konstitusi, Amandemen UUD 1945
 - b. Kardiman, Yuyus dkk. 2014.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraaan. Jakarta: Erlangga

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1. Siswa melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdo'a untuk memulai pelajaran 2. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar	10 menit

	<p>mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan).</p> <p>3. Memotivasi siswa agar semangat dan mengungkapkan rasa syukur karena Indonesia menerapkan system demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>4. Guru menyampaikan topik tentang “Penegakan hukum dalam masyarakat”.</p> <p>5. Apresepsi</p> <p>a. Guru mengingatkan kembali tentang materi yang telah dipelajari minggu lalu.</p> <p>b. Guru menyampaikan berita aktual yang terkait dengan materi pelajaran.</p>	
Inti	<p><i>Mengamati (Observing)</i></p> <p>Peserta didik diminta untuk mengamati gambar atau video tentang penegakan hukum dalam masyarakat yang ditampilkan pada proyektor.</p> <p><i>Menanya (Questioning)</i></p> <p>Peserta didik dapat diberi motivasi mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dari gambar atau video yang ditampilkan</p> <p><i>Mengumpulkan Informasi</i></p> <p>Peserta didik dianjurkan untuk menggunakan</p>	70 menit

	<p>sumber dari Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI terbitan Erlangga buku sumber lainnya yang relevan, internet, media lainnya dalam mempelajari Penegakan Hukum dalam Masyarakat.</p> <p>Mengasosiasi (Associating)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok • Siswa bekerja secara berkelompok untuk mendiskusikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok 1 dan 2 mendiskusikan tentang penegakan hukum di lingkungan sekolah. b. Kelompok 3 dan 4 mendiskusikan tentang penegakan hukum dilingkungan masyarakat. c. Kelompok 5 dan 6 mendiskusikan tentang penegakan hukum dilingkungan negara. <p>Mengkomunikasikan (Communicating)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok secara bergantian dan peserta didik lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawabannya • Hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru 	
<p>Penutup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik diberi ulasan singkat tentang materi yang baru saja didiskusikan • Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut. • Peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang telah di bahas 	<p>10 menit</p>

	<p>pada pertemuan ini .</p> <ul style="list-style-type: none"> Guru menyampaikan rencana pembelajaran dan memberikan penanaman kesadaran berkonstitusi dan menutup kegiatan dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME karena telah berjalan baik dan lancar. 	
--	--	--

F. Penilaian pembelajaran

1. Instrumen dan Teknik Penilaian

No	Aspek	Teknik	Bentuk Instrumen
1	Sikap Spiritual/Sikap Sosial	Observasi kelas kegiatan pengamatan dan diskusi	Lembar observasi
2	Pengetahuan	Tes tulis	Soal uraian
3	Ketrampilan	Penilaian hasil diskusi	Lembarpenilaian

u. Penilaian Sikap

Rubrik Penilaian Sikap kegiatan Pengamatan dan Diskusi

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		Ked	Par	Ker		

Keterangan :

Aspek Kedisiplinan

- Skor 3 Mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur dan tepat waktu
- Skor 2 Mengerjakan tugas sesuai prosedur/ tepat waktu

- 1 Tidak mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tidak tepat waktu

Aspek Partisipasi

- | | |
|------|---|
| Skor | 3 Melakukan pengamatan/menyimak, pencatatan dan urun pendapat atau solusi |
| | 2 Melakukan pengamatan/menyimak/pencatatan/urun pendapat atau solusi |
| | 1 Tidak melakukan pengamatan, pencatatan dan tidak urun pendapat/solusi |

Aspek Kerjasama :

- | | |
|------|--|
| Skor | 3 Melakukan pengamatan, pencatatan dan penyelesaian tugas secara bersama |
| | 2 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara bersama |
| | 1 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara individual |

Skor maksimum adalah $3 \times 3 = 9$

Nilai = $\frac{\text{jumlah skor}}{\text{Jumlah maksimum}} \times 100$

Jumlah maksimum

v. Penilaian Pengetahuan

NO	NAMA	NILAI	
1			
2			
3			

Pertemuan Ketiga

Bentuk Soal

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat!

1. Tuliskan apa yang anda ketahui tentang penegakan hukum!
2. Sebutkan dan Jelaskan unsur-unsur dalam sistem penegakan hukum!
3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam menciptakan sistem penegak hukum yang akuntabel!
4. Berilankah contoh peranan masyarakat yang mencerminkan kegiatan penegakan hukum!
5. Berikanlah contoh kasus penegakan hukum di Indonesia!

w. Penilaian Keterampilan

Rubrik Penilaian Keterampilan

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		A	B	C		

Keterangan :

A = Penguasaan materi saat mempresentasikan hasil diskusi

B = cara penyampaian hasil diskusi di depan kelas

C = Tanggapan atau jawaban yang diberikan

Petunjuk penilaian

Penguasaan materi

- Skor 3, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan menjawab pertanyaan dengan baik
- Skor 2, untuk siswa yang dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak dapat menyampaikan dan tidak menjawab pertanyaan dengan baik.

Cara penyampaian

- Skor 3, untuk siswa yang lancar dan penyampaian dapat dimengerti
- Skor 2, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian dapat dimengerti.

Cara penyampaian

- Skor 3, untuk siswa yang lancar dan penyampaian dapat dimengerti
- Skor 2, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian dapat dimengerti.
- Skor 1, untuk siswa yang tidak lancar dan penyampaian tidak dapat dimengerti

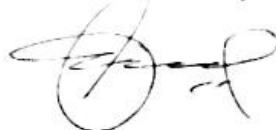
Tanggapan dalam Menjawab

- Skor 3, untuk peserta didik yang memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan
- Skor 2, untuk peserta didik yang sedikit memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.
- Skor 1, untuk peserta didik yang tidak memberikan tanggapan maupun menjawab pertanyaan.

Sleman, 31 Oktober 2017

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran



Dartono, S.Pd

NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan

Terbimbing



Lina Nur Savangah

NIM 14401244006

LAMPIRAN

C. Penegakan Hukum dalam Masyarakat

1. Unsur-unsur dalam sistem Penegakan Hukum

Dalam rangka menjalankan penegakan hukum, setidaknya terdapat empat unsur penting yaitu peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, masyarakat, dan pelaksanaan hukum. Setiap unsur dalam penegakan hukum tersebut memiliki fungsinya masing-masing dan saling bekerja sama untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Berikut ini penjelasan mengenai keempat unsur penegakan hukum tersebut.

a. Peraturan Perundang-undangan

Unsur ini merupakan unsur mendasar karena keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum pertama-tama ditentukan oleh benar atau tidaknya undang-undang yang telah dibuat. Undang-Undang yang mengandung banyak kekuarangan atau cacat dapat memicu kegagalan penegakan undang-undang yang lebih besar.

b. Penegak Hukum

Selain kualitas undang-undang, penegak hukum juga merupakan unsur yang sangat penting dalam menegakkan hukum demi mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Undang-undang berkualitas tetap tidak ada artinya di hadapan penegak hukum yang korup (misalnya sudah disuap) atau mudah diintervensi pihak luar.

Penegak hukum mencakup bidang kepolisian dan kehakiman (seperti jaksa dan hakim) namun dapat diperluas hingga mencakup lembaga permasyarakatan seperti sipir.

c. Masyarakat

Peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum dapat dilihat dari adanya kesadaran masyarakat atas hak dan kewajiban, budaya taat hukum, serta pengetahuan masyarakat mengenai hal-hal yang dilarang dan dianjurkan oleh hukum

d. Pelaksanaan (penegakan) hukum

Dalam proses penegakan hukum, ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif.

2. Sistem Penegakan Hukum yang Akuntabel

Sistem penegakan hukum yang akuntabel adalah suatu pelaksanaan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**



DISUSUN OLEH :

NAMA MAHASISWA : LINA NUR SAVANGAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
MATERI : PENEGAKAN HUKUM DALAM
MASYARAKAT
KELAS/ SEMESTER : XI / GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018

SMK KARYA RINI YHI KOWANI YOGYAKARTA
JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 86 DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA
2017

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

BAB 5

Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat

Satuan Pendidikan : SMK KARYA RINI
Kelas / Semester : XI/1
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

KOMPETENSI INTI

13. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
14. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
15. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
16. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PEMBELAJARAN
1.5 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya.	12. Memahami hakikat perlindungan dan penegakkan hukum 13. Mengidentifikasi dasar hukum perlindungan hukum
1.6 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	14. Menganalisis Perlindungan Hukum dalam Masyarakat

<p>1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>1.7 Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.</p> <p>1.8 Menyaji hasil analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>	
---	--

PERTEMUAN PERTAMA (2X 45 MENIT)

G. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui kegiatan mengamati buku teks PPKn K13, menanya, mengumpulkan informasi dari media cetak maupun internet, mengasosiasi dan mengkomunikasikan diharapkan peserta Didik dapat :

- 5) Menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum
- 6) Memahami ciri-ciri Negara Hukum
- 7) Mengidentifikasi jenis perlindungan Hukum
- 8) Menganalisis perlindungan hukum dalam masyarakat
- 9) Menyajikan hasil analisis perlindungan hukum dalam masyarakat

H. MATERI PEMBELAJARAN

2. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum

Fakta:



Sumber: gresnews.com

Gambar 5.2 LPSK dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. LPSK dibentuk dengan tujuan terakomodasinya hak-hak saksi dan korban.

Setiap negara didunia ini adalah negara hukum. Hal ini karena tidak ada satu negara yang tidak memiliki peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur kegiatan pemerintah dan masyarakat.

Konsep:

Menjelaskan bahwa hukum itu harus ditegakan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Penegakkan hukum harus menjamin agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan di UUD 1945, Pasal 28 D yang isinya, “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Prinsip:

Empat alasan sebuah negara meyelenggarakan dan menjalankan tugasnya sebagai negara hukum

- a. Demi kepastian hukum
- b. Tuntutan perlakuan yang sama
- c. Legitimasi Demokrasi
- d. Tuntutan akal budi

Prosedur:

KUHAP dengan KUHP merupakan dua kitab undang-undang yang berbeda. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berisi mengenai perbuatan yang

dilarang beserta sanksi-sanksi yang diterima seseorang apabila tersangkut kasus hukum pidana. Adapun KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berisi mengenai aturan tata cara atau pelaksanaan seseorang yang terkena kasus hukum pidana untuk mencari kebenaran, mengadili dan menetapkan seseorang disangka dan didakwa.

I. METODE PEMBELAJARAN

Pendekatan : scientific
Model Pembelajaran : Problem based learning
Metode : Diskusi dan Presentasi

J. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN

5. Media :
 - f. Kardiman, Yuyus dkk. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga
 - g. Power point tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan hukum dalam Masyarakat
6. Alat :
 - l. LCD
 - m. Proyektor
 - n. Spidol
 - o. Whiteboard
 - p. Penghapus
 - q. Kertas HVS
7. Sumber Pembelajaran
 - a. *Buku Teks Facil: Advanced Learning Pancasila and Civic Education II*, Tim Penulis Grafindo Media Pratama, 2013. Buku yang diunduh dari bse. Kemendikbud.go.id. Pancasila Paripurna Pengarang M. Latif serta Majalah Suara Muhammadiyah, Majalah MATAN, dan Buku yang RELEVAN (CIVIC EDUCATION) PP Muhammadiyah Yogyakarta, dan PPKn dari Mahkamah Konstitusi, Amandemen UUD 1945
 - b. Kardiman, Yuyus dkk. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga

K. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">6. Siswa melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdo'a untuk memulai pelajaran7. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan).8. Memotivasi siswa agar semangat dan mengungkapkan rasa syukur karena Indonesia menerapkan system demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.9. Guru menyampaikan topik tentang "Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Masyarakat".10. Apresepsi<ol style="list-style-type: none">a. Guru mengingatkan kembali tentang materi yang telah dipelajari minggu lalu.b. Guru menyampaikan berita aktual yang terkait dengan materi pelajaran.	10 menit
Inti	<p><i>Mengamati (Observing)</i></p> <p>Peserta didik diminta untuk mengamati gambar atau video tentang perlindungan hukum dalam masyarakat yang ditampilkan pada proyektor.</p>	70 menit

Menanya (Questioning)

Peserta didik dapat diberi motivasi mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dari gambar atau video yang ditampilkan

Mengumpulkan Informasi

Peserta didik dianjurkan untuk menggunakan sumber dari Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI terbitan Erlangga buku sumber lainnya yang relevan, internet, media lainnya dalam mempelajari Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Masyarakat.

Mengasosiasi (Associating)

- Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok
- Siswa bekerja secara berkelompok untuk mendiskusikan:
 - d. Kelompok 1 dan 2 mendiskusikan analisis kasus tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
 - e. Kelompok 3 dan 4 mendiskusikan analisis kasus tentang Perlindungan Konsumen.
 - f. Kelompok 5 dan 6 mendiskusikan analisis kasus tentang Perlindungan hak kekayaan intelektual.

Mengkomunikasikan (Communicating)

- Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok secara bergantian dan

	<p>peserta didik lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawabannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru 	
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik diberi ulasan singkat tentang materi yang baru saja didiskusikan • Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut. • Peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini . • Guru menyampaikan rencana pembelajaran dan memberikan penanaman kesadaran berkonstitusi dan menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME karena telah berjalan baik dan lancar. 	10 menit

L. Penilaian pembelajaran

1. Instrumen dan Teknik Penilaian

No	Aspek	Teknik	Bentuk Instrumen
1	Sikap Spiritual/Sikap Sosial	Observasi kelas kegiatan pengamatan dan diskusi	Lembar observasi
2	Pengetahuan	Tes tulis	Soal uraian
3	Ketrampilan	Penilaian hasil diskusi	Lembarpenilaian

a. Penilaian Sikap

Rubrik Penilaian Sikap
kegiatan Pengamatan dan Diskusi

No	Nama Peserta	Aspek yang dinilai	Jumlah	Nilai
----	--------------	--------------------	--------	-------

	Didik	Ked	Par	Ker	Skor	

Keterangan :

Aspek Kedisiplinan

- 3 Mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur dan tepat waktu
 Skor 2 Mengerjakan tugas sesuai prosedur/ tepat waktu
 1 Tidak mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tidak tepat waktu

Aspek Partisipasi

- 3 Melakukan pengamatan/menyimak, pencatatan dan urun pendapat
 Skor atau solusi
 2 Melakukan pengamatan/menyimak/pencatatan/urun pendapat atau
 solusi
 1 Tidak melakukan pengamatan, pencatatan dan tidak urun
 pendapat/solusi

Aspek Kerjasama :

- 3 Melakukan pengamatan, pencatatan dan penyelesaian tugas secara
 Skor bersama
 2 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara bersama
 1 Melakukan pengamatan/pencatatan/penyelesaian tugas secara
 individual

Skor maksimum adalah $3 \times 3 = 9$

Nilai = $\frac{\text{jumlah skor}}{\text{Jumlah maksimum}} \times 100$

Jumlah maksimum

x. Penilaian Pengetahuan

NO	NAMA	NILAI	
1			
2			
3			

Bentuk Soal

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat!

6. Jelaskan mengapa Indonesia disebut sebagai negara hukum!
7. Tuliskan apa yang anda ketahui tentang perlindungan Hukum!
8. Jelaskan mengapa sebuah negara harus menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya sebagai negara hukum!
9. Jelaskan bunyi pasal yang menyatakan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual!
10. Berikanlah contoh kegiatan yang merupakan perlindungan Hukum!

Sleman, 7 November 2017

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran



Dartono, S.Pd

NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan

Terbimbing



Lina Nur Savangah

NIM 14401244006

LAMPIRAN

A. Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintah Indonesia berpedoman pada hukum. Hal ini secara jelas disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum. Negara yang tergolong sebagai negara hukum memiliki tiga ciri penting sebagai berikut.

- a. Supermasi hukum, berarti suatu negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, melainkan harus berdasarkan hukum sehingga seorang hanya akan mendapatkan hukuman apabila melanggar hukum yang telah ditetapkan
- b. Adanya kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintahan
- c. Adanya jaminan bagi hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Julius Stahl mengatakan bahwa terdapat empat elemen dalam negara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Konsep tersebut memnadaan bahwa konsekwensi dari suatu negara berdasarkan hukum adalah timbulnya perlindungan hukum. Hal ini ditegaskan di UUD 1945, Pasal 28D yang isinya, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlindungan hukum dilandaskan pada Pancasila. Menunjukkan adanya suatu pengakuan dan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai Keutuhan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial.

Berikut ini beberapa definisi perlindungan hukum menurut para ahli.

- a. Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

c. CST Kansil

Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interasinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Berdasarkan pada prinsip negara hukum dan adanya pengakuan serta perlindungan hukum, terdapat dua jenis perlindungan hukum.

a. Perlindungan hukum preventif

Jenis perlindungan hukum ini berarti rakyat memiliki kesempatan untuk mengajukan pendapat atau keberatannya terhadap suatu keputusan pemerintah

b. Perlindungan hukum represif

Jenis perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa.

2. Penegakan Hukum

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih aman, sejahtera, adil dan demokratis, hal yang sangat penting untuk dilakukan yaitu penegakan hukum. Mengenai penegakan hukum, terdapat beberapa definisi menurut para pakar hukum.

a. Jimly Assiddiqie

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara.

b. Satjipto Rahardjo dalam Iksan (2012)

Penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

c. Soerjono Soekanto

Ada empat syarat dalam penegakan hukum (*law enforcement*), antara lain adanya aturan, adanya lembaga yang menjalankan peraturan tersebut, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan serta adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan tersebut.

B. Perlindungan Hukum dalam Masyarakat

1. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

KUHAP merupakan salah satu peraturan yang menjamin perlindungan hukum atas hak warga negara. Pada bagian pertimbangan KUHAP disebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu.

2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan yang menegaskan tentang perlindungan hukum juga dapat dilihat pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalamnya dinyatakan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
- 2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 3) Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

3. UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pada UU ini terdapat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) diantaranya:

- 1) Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri.
- 2) Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan uaya perlindungan TKI diluar negeri
- 3) Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:
 - a. Bekerja diluar negeri

- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI diluar negeri
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan diluar negeri.

4. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada Undang-Undang ini terdapat sejumlah pasal yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan
- 2) Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha
- 3) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.

5. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Secara eksplisit, UU ini memberikan perlindungan terhadap konsumen. Sebagian diantaranya sebagai berikut.

- 1) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan seiaian farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 3) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang;
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menuurt ukuran yang sebenarnya.

6. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

UU ini melindungi kekayaan intelektual berupa ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Perlindungan yang diberikan sebagian diantaranya sebagai berikut.

- a. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak pemegang hak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- c. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptaanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

**KISI-KISI PENULISAN SOAL ULANGAN HARIAN
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018
SMK KARYA RINI YHI KOWANI**

Nama Sekolah	: SMK KARYA RINI YHI KOWANI	Jumlah Soal	: 5
Tahun Pelajaran	: 2017/2018	Bentuk Soal	: 5 Uraian
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	Alokasi Waktu	: 80 menit
Kelas/Semester	: XI/I (satu)	Kurikulum	: Kurikulum 2013 (K-13)
Materi	: Kewenangan Lembaga-lembaga Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945	Penyusun	: Lina Nur Savangah

NO	KOMPETENSI INTI/KI	KOMPETENSI DASAR/ KD	KLS/ SEM	MATERI	INDIKATOR	TINGKAT KESUKARA N	RANAH	BENTUK SOAL	NO SOA L
----	--------------------	-------------------------	-------------	--------	-----------	--------------------------	-------	----------------	----------------

3.	<p>KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.</p>	<p>3.2 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	X/I	<p>Kewenangan Lembaga-lembaga Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian Suprastruktur dan Infrastruktur Politik 2. Mengambarkan skema lembaga-lembaga Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyebutkan Fungsi dan Kewenangan Lembaga-lembaga Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Menjelaskan pengertian partisipasi politik 5. Menyebutkan perilaku yang mencerminkan partisipasi politik di lingkungan sekolah, masyarakat dan Negara 	<p>Mudah</p> <p>Sulit</p> <p>Sedang</p> <p>Sulit</p> <p>Sedang</p>	<p>C2</p> <p>C5</p> <p>C1</p> <p>C2</p> <p>C1</p>	<p>Essay</p> <p>Essay</p> <p>Essay</p> <p>Essay</p> <p>Essay</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>
----	--	---	-----	--	---	--	---	--	--

Peyusun,

Lina Nur Savangah
NIM. 14401244006

**ULANGAN HARIAN SEMSETER GANJIL SMK KARYA RINI
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas : X (Sepuluh)
Hari/Tanggal :
Waktu :

ESSAY.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik? **(skor 20)**
2. Gambarkan Skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? **(skor 20)**
3. Sebutkan fungsi dan kewenangan MPR, DPR , dan MK? Masing-masing 3 saja! **(skor 20)**
4. Jelaskan pengertian partisipasi politik? **(skor 20)**
5. Sebutkan perilaku yang mencerminkan partisipasi politik di lingkungan sekolah, masyarakat dan Negara? Masing-masing 2 saja! **(skor 20)**

≈ Selamat Mengerjakan ≈

Semoga Sukses !!!! ☺

Lampiran-Lampiran :

Lampiran 1

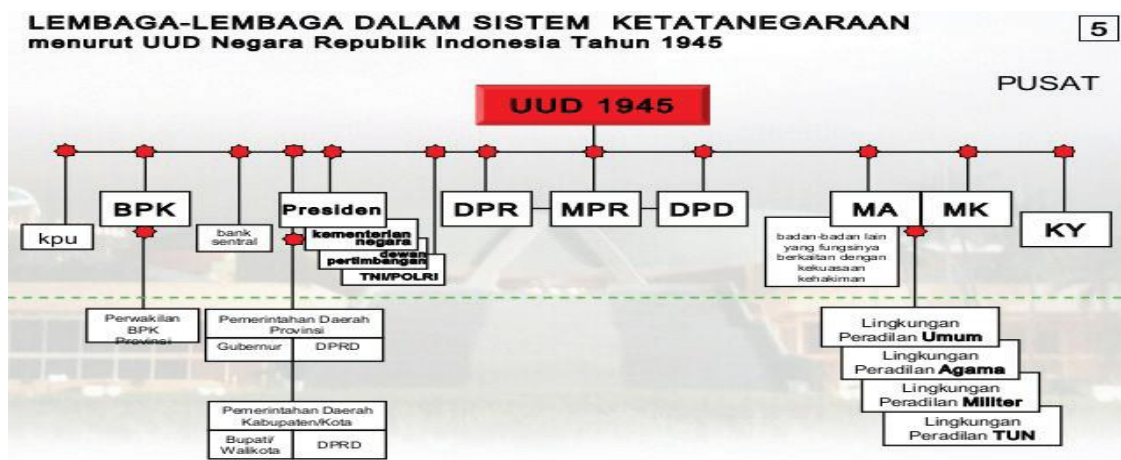
Kunci Jawaban :

ESSAY.

1. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Bahkan kelompok-kelompok tersebut tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara.

2.



3. Kewenangan MPR

- mengubah dan menetapkan UUD
- Melantik presiden dan/atau wakil presiden
- Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Fungsi DPR

Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

Kewenangan KY

- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI tahun 1945
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945
 - Memutus pembubaran partai politik
 - Memutus perselisihan hasil pemilu
 - Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
4. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya
5. Di lingkungan sekolah :
- pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua lembaga ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
 - Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti
 - Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan disekolah
- Di lingkungan masyarakat :
- forum warga
 - Pemilhan ketua RT, RW, kepala desa, dan sebagainya
 - Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi lembaga masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.
- Di lingkungan negara
- pemilihan umum untuk memilih anggota legislative dan presiden
 - Pemilihan kepala daerah secara langsung (PILKADA)
 - Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.

Lampiran 2

Pedoman Penskoran

ESSAY.

No Soal	Jawaban	Skor
1.	Menjawab secara lengkap	20
	Menjawab kurang lengkap	15
	Menjawab salah	5
	Tidak menjawab	0
2.	Menggambar dengan benar dan rapi	20
	Menggambar dengan benar dan tidak rapi	15
	Menggambar dengan salah dan rapi	10
	Menggambar dengan salah dan tidak rapi	5
	Tidak menjawab	0
3.	Menjawab dengan menyebutkan 9 benar	20
	Menjawab dengan menyebutkan 8 benar	18
	Menjawab dengan menyebutkan 7 benar	16
	Menjawab dengan menyebutkan 5 benar	14
	Menjawab dengan menyebutkan 4 benar	12
	Menjawab dengan menyebutkan 3 benar	10
	Menjawab dengan menyebutkan 2 benar	8
	Menjawab dengan menyebutkan 1 benar	6
	Menjawab salah dan Tidak menjawab	0
4.	Menjawab secara lengkap	20
	Menjawab kurang lengkap	15
	Menjawab salah	5

	Tidak menjawab	0
5.	Menjawab dengan menyebutkan 6 benar	20
	Menjawab dengan menyebutkan 5 benar	18
	Menjawab dengan menyebutkan 4 benar	16
	Menjawab dengan menyebutkan 3 benar	14
	Menjawab dengan menyebutkan 2 benar	12
	Menjawab dengan menyebutkan 1 benar	10
	Menjawab salah dan Tidak menjawab	0
	Jumlah skor maksimum	100

**KISI-KISI PENULISAN SOAL ULANGAN HARIAN
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018
SMP NEGERI 3 DEPOK YOGYAKARTA**

Nama Sekolah	: SMK Karya Rini	Jumlah Soal	: 20
Tahun Pelajaran	: 2017/2018	Bentuk Soal	: 15 PG . 5 Uraian
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	Alokasi Waktu	: 80 menit
Kelas/Semester	: XI/ 1(Satu)	Kurikulum	: Kurikulum 2013 (K-13)
Materi	: Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintah Negara, Kementerian Negara, dan Pemerintahan Daerah		

NO	KOMPETENSI INTI/KI	KOMPETENSI DASAR/ KD	KLS/ SEM	MATERI	INDIKATOR	TINGKAT KESUKARAN	RANAHA	BENTUK SOAL	NO SOAL
1.	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	1.9 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan	XI/1	Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintah Negara,	1. Menyebutkan bentuk-bentuk kekuasaan negara	Mudah	C1	PG	1
					2. Menjelaskan konsep pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan	Sedang	C2	Essay	U1
					3. Menjelaskan pengertian pembagian kekuasaan	Sedang	C2	PG	2
					4. Menjelaskan tugas dan fungsi	Sedang	C1	PG	3

		bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara			dari lembaga negara				
NO	KOMPETENSI INTI/KI	KOMPETENSI DASAR/ KD	KLS/ SEM	MATERI	INDIKATOR	TINGKAT KESUKARAN	RANAH	BENTUK SOAL	NO SOAL
2.	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	1.10 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (Ipoeksosbudhankam dan hukum)	XI/1	Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintah Negara,	5. Menganalisis sistem pemerintahan di Indonesia 6. Menjelaskan tugas dan wewenang lembaga negara 7. Menunjukkan wewenang dari salah satu lembaga negara 8. Menyebutkan tugas, kewajiban dan wewenang dari lembaga 9. Menjelaskan fungsi dan wewenang lembaga negara menurut UUD 1945 10. Menyebutkan dasar	Sulit Sulit Mudah Sedang Sedang Sedang	C4 C2 C3 C1 C2 C1 C4	Essay PG PG PG Essay PG Essay	U2 4 5 6 U3 7 U4

					<p>hukum yang mengatur tentang lembaga negara di Indonesia</p> <p>11. Menganalisis kementerian di Indonesia</p>				
NO	KOMPETENSI INTI/KI	KOMPETENSI DASAR/ KD	KLS/ SEM	MATERI	INDIKATOR	TINGKAT KESUKARAN	RANAH	BENTUK SOAL	NO SOAL
3.	Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang	1.11 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	XI/I	Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintah Negara,	<p>12. Menunjukkan ruang lingkup kementerian di Indonesia</p> <p>13. Menjelaskan pengertian lembaga Non Kementerian</p> <p>14. Menyebutkan lembaga pemerintahan non kementerian</p> <p>15. Menjelaskan kewenangan dari pemerintah daerah</p> <p>16. Menjelaskan dasar hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah di</p>	<p>Mudah</p> <p>Mudah</p> <p>Sedang</p> <p>Sulit</p> <p>Sulit</p>	<p>C3</p> <p>C2</p> <p>C1</p> <p>C2</p> <p>C2</p>	<p>PG</p> <p>PG</p> <p>PG</p> <p>Essay</p> <p>PG</p>	<p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>U5</p> <p>11</p>

	spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.				Indonesia				
NO	KOMPETENSI INTI/KI	KOMPETENSI DASAR/ KD	KLS/ SEM	MATERI	INDIKATOR	TINGKAT KESUKARAN	RANAH	BENTUK SOAL	NO SOAL
4.	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	1.4 Menyaji hasil analisis tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	XI/1	Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintah Negara,	17. Menunjukkan perangkat penyelenggaraan pemerintah Daerah di Indonesia 18. Menjelaskan asas-asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah 19. Menganalisis kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia 20. Menjelaskan tentang Otonomi Daerah	Sedang Sedang Sulit Sedang	C3 C2 C4 C2	PG PG PG PG	12 13 14 15

Peyusun,

Lina Nur Savangah

NIM. 14401244006

Lampiran-Lampiran :

Lampiran 1

Kunci Jawaban :

PILIHAN GANDA.

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. A | 6. C | 11. A |
| 2. E | 7. A | 12. E |
| 3. B | 8. B | 13. B |
| 4. E | 9. A | 14. D |
| 5. B | 10. C | 15. B |

ESSAY

1. Pembagian Kekuasaan (distribution of power) merupakan kekuasaan negara terbagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi saling berhubungan dan tidak dipisahkan. Sedangkan Pemisahan Kekuasaan adalah organ-organ negara terpisah-pisah dimana organ-organ negara berdiri sendiri tanpa ada tugas dan fungsi masing-masing tanpa harus menimbulkan peran mutlak di tiap organ negara.
2.
 - a. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
 - b. Presiden adalah pihak yang berwenang menyusun kabinet dan mengangkat menteri
 - c. Menteri adalah pembantu presiden dan tidak boleh menjadi anggota parlemen
 - d. Menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada parlemen sehingga ia tetap menjadi menteri selama masih dipercaya presiden
 - e. Masa jabatan menteri bergantung pada presiden. Jabatan presiden bersifat pasti yaitu 5 tahun
 - f. Parlemen sebagai legislatif dan presiden sebagai eksekutif berperan seimbang melalui sistem kontrol dan keseimbangan
3.
 - a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama

- b. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
 - c. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang
4. Kementerian pertanian
- Permasalahan yang dihadapi mencakup bidang produksi, distribusi dan keterjangkauan harga:
- a. Masalah produksi terkait kapasitas, produktivitas petani, insentif untuk petani, dan data yang tidak akurat sehingga menimbulkan masalah dalam kebijakan impor.
 - b. Permasalahan dalam distribusi antara lain panjangnya tata niaga dan adanya pelaku-pelaku yang dominan di pasar. Di samping itu, pembentukan harga juga dikuasai oleh beberapa pelaku pasar saja.
 - c. Permasalahan ketahanan pangan nasional. Pasalnya, apabila ketahanan pangan tidak berjalan baik, kerentanan pangan tidak hanya mengganggu perekonomian, namun juga kesejahteraan masyarakat.
5. kerjasama antardaerah; pembuatan saluran irigasi daerah; perbaikan jalan desa

Lampiran 2

Pedoman Penskoran

PILIHAN GANDA

No.Soal	Skor	No.Soal	Skor	No.Soal	Skor
1.	1	6.	1	11.	1
2.	1	7.	1	12.	1
3.	1	8.	1	13.	1
4.	1	9.	1	14.	1
5.	1	10.	1	15.	1
Total Skor					15

ESSAY.

No Soal	Jawaban	Skor
1.	Menjawab secara lengkap	5
	Menjawab kurang lengkap	3
	Menjawab salah	1
	Tidak menjawab	0
2.	Menjawab dengan menyebutkan 3 benar	5
	Menjawab dengan menyebutkan 2 benar	3
	Menjawab dengan menyebutkan 1 benar	1
	Menjawab salah dan Tidak menjawab	0
3.	Menjawab dengan menyebutkan 3 benar	5
	Menjawab dengan menyebutkan 2 benar	3
	Menjawab dengan menyebutkan 1 benar	1
	Menjawab salah dan Tidak menjawab	0
4.	Menjawab secara lengkap	5

	Menjawab kurang lengkap	3
	Menjawab salah	1
	Tidak menjawab	0
5.	Menjawab dengan menyebutkan 3 benar	5
	Menjawab dengan menyebutkan 2 benar	3
	Menjawab dengan menyebutkan 1 benar	1
	Menjawab salah dan Tidak menjawab	0
	Jumlah skor maksimum	25

Pedoman Penilaian :

Nilai = Jumlah Skor Perolehan

4

MEDIA PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 (kelas X)

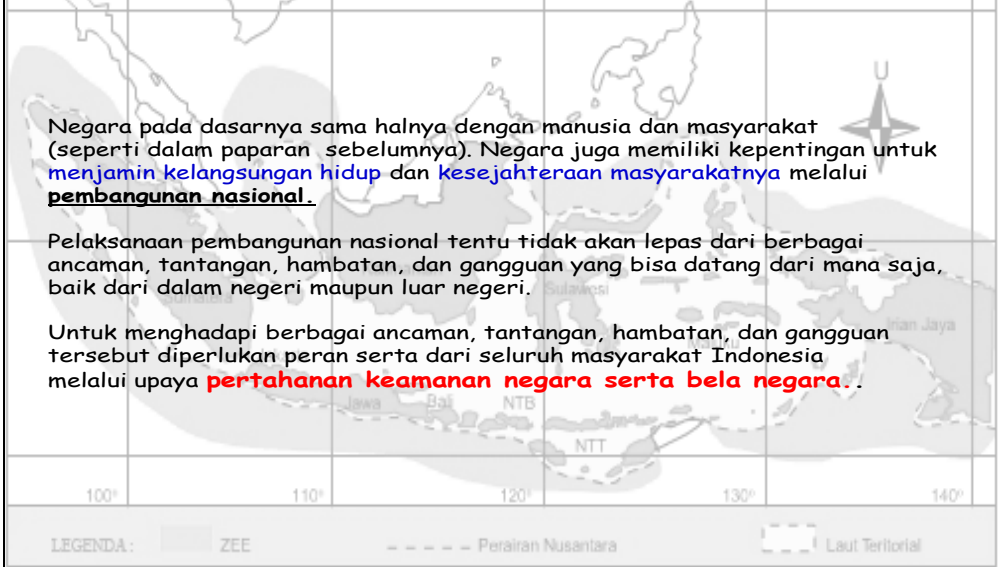
Slide 1



Slide 2



Slide 3



Negara pada dasarnya sama halnya dengan manusia dan masyarakat (seperti dalam paparan sebelumnya). Negara juga memiliki kepentingan untuk **menjamin kelangsungan hidup** dan **kesejahteraan masyarakatnya** melalui **pembangunan nasional**.

Pelaksanaan pembangunan nasional tentu tidak akan lepas dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang bisa datang dari mana saja, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut diperlukan peran serta dari seluruh masyarakat Indonesia melalui upaya **pertahanan keamanan negara serta bela negara**.

LEGENDA: ZEE - - - - Perairan Nusantara Laut Teritorial

Slide 4

Indikator

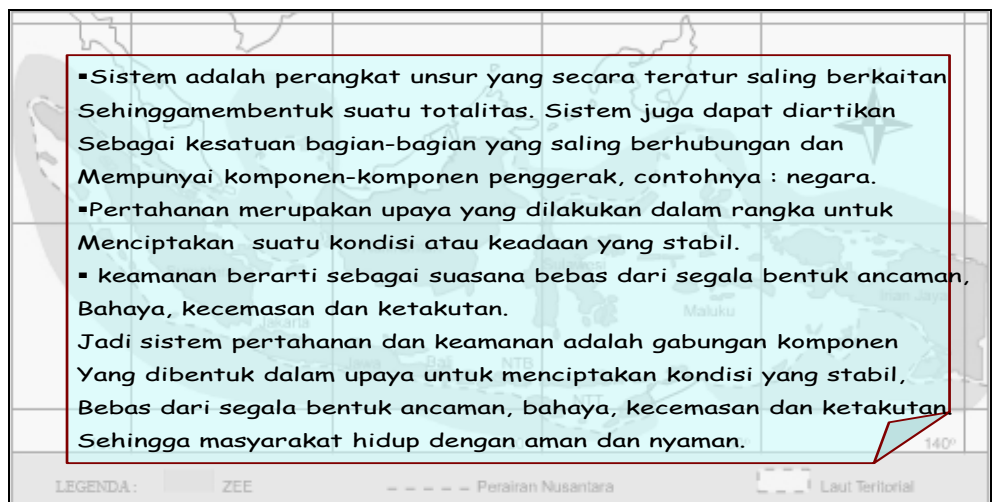
- Menjelaskan pengertian mengenai sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia.
- Mengidentifikasi alat-alat pertahanan dan keamanan negara.
- Mengidentifikasi Sistem Pertahanan dan Keamanan yang berlaku di Indonesia.
- Menjelaskan pengertian Bela negara.
- Mengidentifikasi bentuk-bentuk Kesadaran Bela Negara.

Slide 5

Tujuan Pembelajaran

- Siswa dapat menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi Alat-alat sistem pertahanan dan keamanan Negara republik Indonesia.
- Siswa dapat Menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan yang berlaku di Indonesia.
- Siswa dapat menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kesadaran Bela Negara.
- Siswa dapat menyaji dan mengkomunikasikan hasil diskusi mereka mengenai sistem pertahanan keamanan dan kesadaran bela negara.

Slide 6



▪ Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan Sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan Sebagai kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan Mempunyai komponen-komponen penggerak, contohnya : negara.

▪ Pertahanan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka untuk Menciptakan suatu kondisi atau keadaan yang stabil.

▪ keamanan berarti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman, Bahaya, kecemasan dan ketakutan.

Jadi sistem pertahanan dan keamanan adalah gabungan komponen Yang dibentuk dalam upaya untuk menciptakan kondisi yang stabil, Bebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan dan ketakutan Sehingga masyarakat hidup dengan aman dan nyaman.

LEGENDA: ZEE Perairan Nusantara Laut Teritorial

Slide 7

Alat-alat pertahanan dan keamanan negara

Komponen utama Alat pertahanan negara yaitu:

1. Tentara Nasional Indonesia
2. Kepolisian Republik Indonesia

Komponen Pendukung alat Pertahanan Negara yaitu:

1. Seluruh masyarakat Indonesia

Slide 8

Sistem pertahanan dan keamanan Negara di Indonesia

Sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata)

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut.

- a. Kerakyatan.
- b. Kesemestaan.
- c. Kewilayahan

Slide 9

KESADARAN BELA NEGARA DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA

LEGENDA : ZEE — — — — Perairan Nusantara Laut Teritorial

The slide features a map of Indonesia with a grid overlay. A red oval with a blue border is centered over the map, containing the title. The map includes labels for 'Jawa', 'Bali', 'NTB', and 'NTT'. A compass rose is located in the upper right corner. The legend at the bottom identifies 'ZEE' (Exclusive Economic Zone), 'Perairan Nusantara' (Nusantara Waters), and 'Laut Teritorial' (Territorial Waters).

Slide 10

Kesadaran bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Slide 11

PRINSIP PENYELENGGARAAN BELA NEGARA


1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela negara serta mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan.
2. Upaya pembelaan negara bagi pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.
3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya.
4. Bangsa Indonesia menentang berbagai macam penjajahan dalam berbagai bentuk dan penampilannya serta menganut politik bebas-aktif.
5. Perlawanan rakyat Indonesia adalah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang bersifat kerakyatan dan kesemestaan serta kewilayahan.

Slide 12

**PARTISIPASI WARGA NEGARA
DALAM UPAYA BELA NEGARA**

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

1. pendidikan kewarganegaraan,
2. pelatihan dasar kemilitiren secara wajib,
3. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib,
4. pengabdian sesuai dengan profesi (profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya).



Slide 13



 **Terimakasih** 

 **SELAMAT BELAJAR**

Pertemuan 2 (kelas X)

Slide 1

**KEWENANGAN LEMBAGA-
LEMBAGA NEGARA MENURUT
UU NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**OLEH:
LINANURSAVANGAH**

Slide 2

**SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR
POLITIK**



Slide 3

INDIKATOR PEMBELAJARAN

- **Menjelaskan pengertian suprastruktur dan infrastruktur Politik serta menggambarkan skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan.**
- **Mengidentifikasi fungsi dan kewenangan Lembaga-Lembaga Negara**
- **Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi Politik**

Slide 4

TUJUAN PEMBELAJARAN

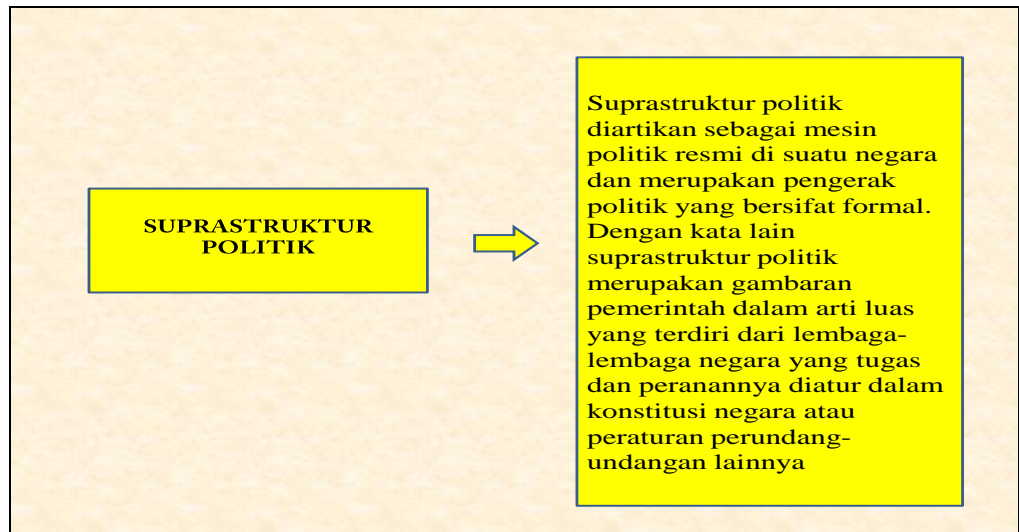
- Peserta didik dapat menjelaskan pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik.
- Peserta didik dapat menggambarkan skema Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan.
- Peserta didik dapat menyaji dan mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik serta skema lembaga negara.

Slide 5

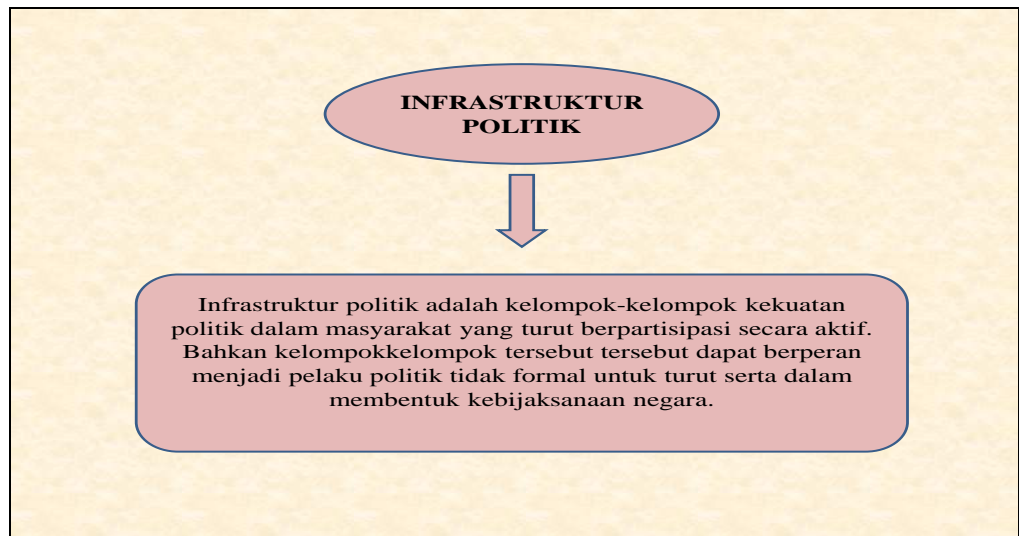
APA KEGIATAN HARI INI?

1. Buatlah kelompok dengan jumlah anggota 5-6 orang.
2. Setiap kelompok mendiskusikan materi yang telah di tentukan.
 - Kelompok 1,2 dan 3 mendiskusikan mengenai suprastruktur politik
 - Kelompok 4 dan 5 mendiskusikan mengenai infrastruktur politik
 - Kelompok 6 dan 7 mendiskusikan mengenai skema lembaga-lembaga negara.
3. Kerjakan di buku tugas. (Jangan lupa tulis nama kelompok di pojok kanan atas).
4. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas.
5. Kerjakan dengan tenang dan serius

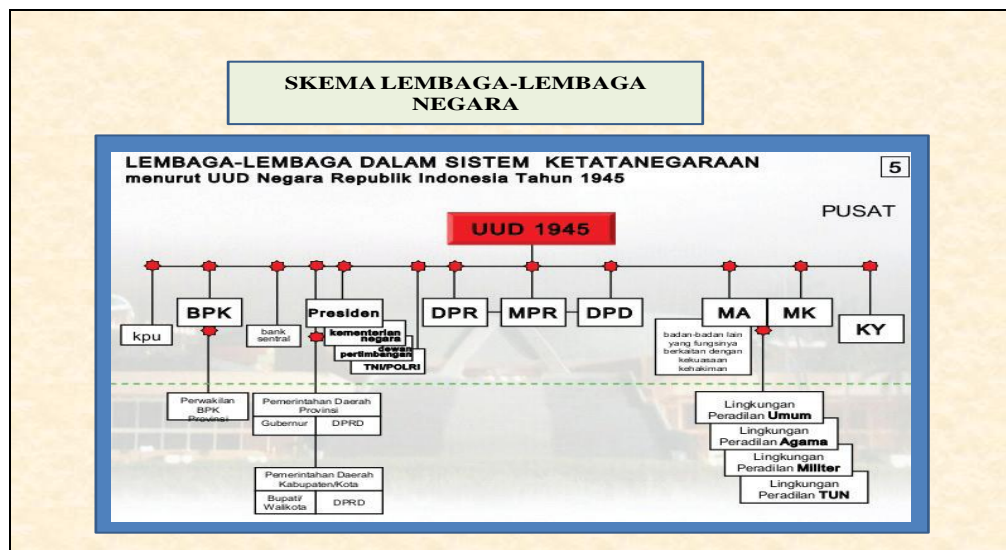
Slide 6



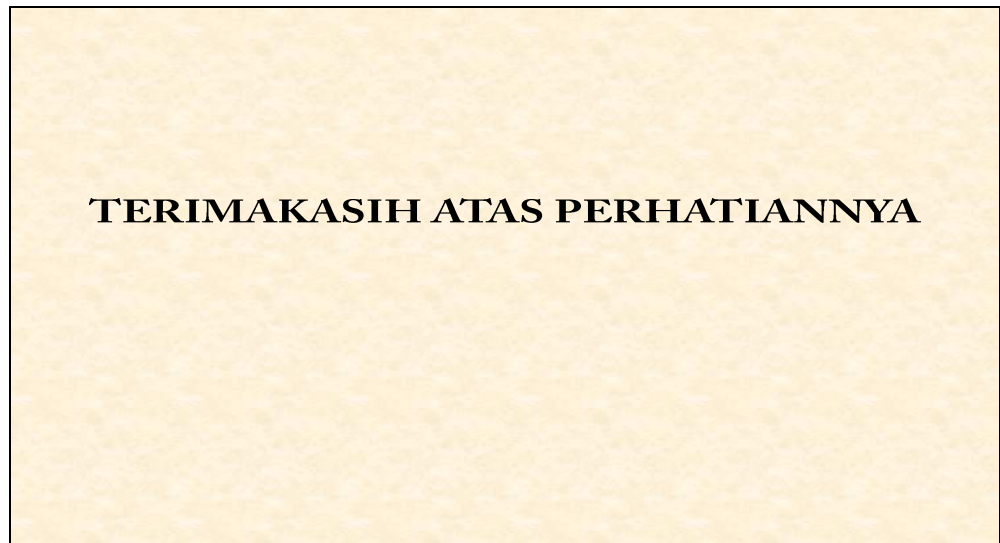
Slide 7



Slide 8

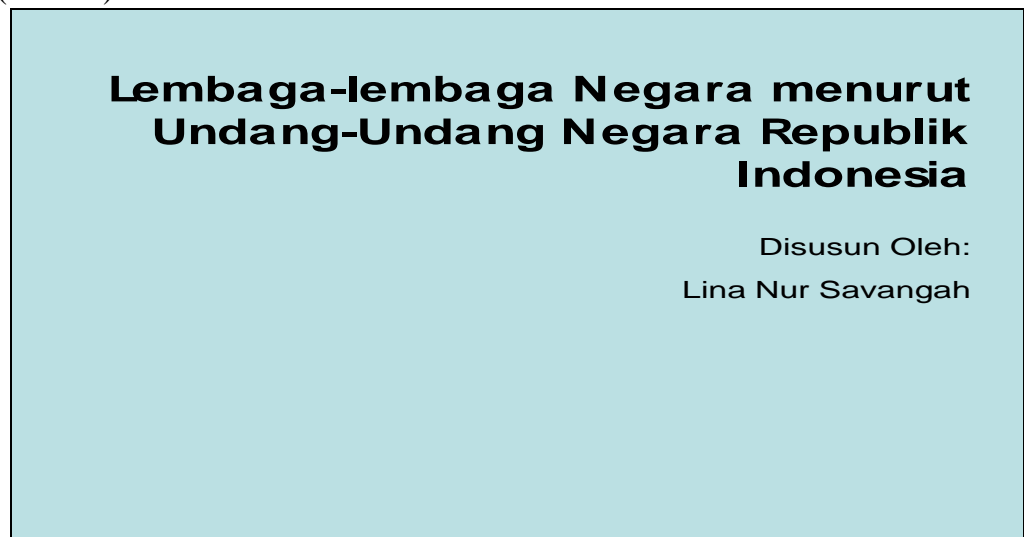


Slide 9



Pertemuan 3 (kelas X)

Slide 1



Slide 2

INDIKATOR PEMBELAJARAN

- **Menjelaskan pengertian suprastruktur dan infrastruktur Politik serta menggambarkan skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan.**
- **Mengidentifikasi fungsi dan kewenangan Lembaga-Lembaga Negara**
- **Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi Politik**

Slide 3

TUJUAN PEMBELAJARAN

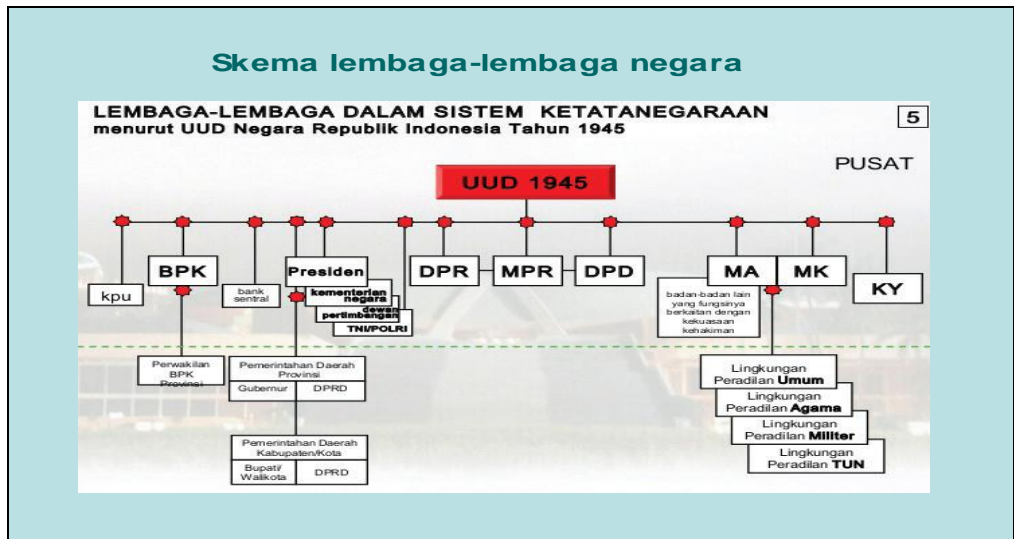
- Peserta didik dapat mengidentifikasi lembaga-lembaga negara menurut undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan kewenangan lembaga negara.
- Peserta didik dapat menyaji dan mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai fungsi dan kewenangan lembaga negara.

Slide 4

Kegiatan Pembelajaran

1. Bergabunglah dengan kelompok kalian yang sudah di bentuk pada pertemuan sebelumnya
2. Susunlah mind mapping pada lembar kerja yang telah di sediakan. (cocokan antara pengertian , tugas dan kewenangannya sesuai dengan pernyataan yang telah disediakan)
3. Jangan lupa tulis nama kelompok pada lembar kerja
4. Kerjakan dengan tenang dan serius.

Slide 5



Slide 6

HUBUNGAN KEKUASAAN

Hubungan yang bersifat horizontal:
Hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Contoh :
Indonesia :
MPR (DPR+DPD), Pres, MA, MK, BPK, KY
Hubungan horizontal antara pemegang kekuasaan negara dapat melahirkan berbagai sistem pemerintahan (Parlementer atau Presidensial)

Hubungan yang bersifat vertikal:
Hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, dalam arti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat semacam pembagian kerja antara pusat dan daerah.
Contoh:
Indonesia:

Presiden

↓

Menteri Gubernur Bupati

Slide 7

HORIZONTAL :

Pembagian Kekuasaan
berdasarkan
Fungsi Kekuasaan
yang berbeda-beda
yang menimbulkan berbagai macam
Lembaga Negara

Tujuannya:
Mencegah Kesewenang-wenangan

Slide 8

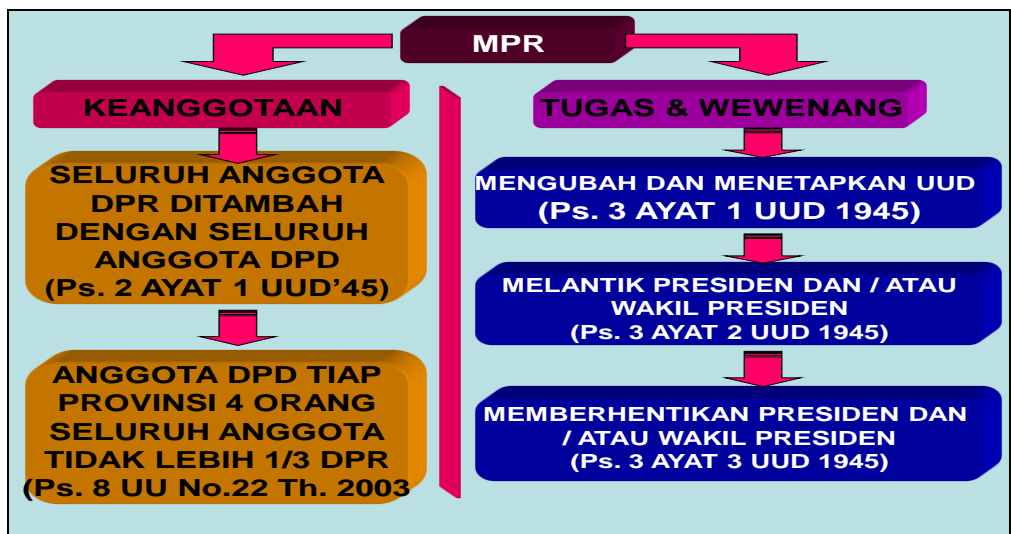
PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA VERTIKAL

- **Pembagian Kekuasaan menurut tingkatnya.**
- Dalam hal ini yang dimaksud adalah **Pembagian Kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan.**
- **Carl J. Friedrich** memakai istilah **Pembagian Kekuasaan secara Teritorial (*Territorial Division of Power*).**
- Pembagian Kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita **melakukan perbandingan** antara negara **KESATUAN**, negara **FEDERAL** serta **KONFEDERASI**.
- **Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem :**
 1. **Desentralisasi**
 2. **Dekonsentrasi**
 3. **Medebewind**

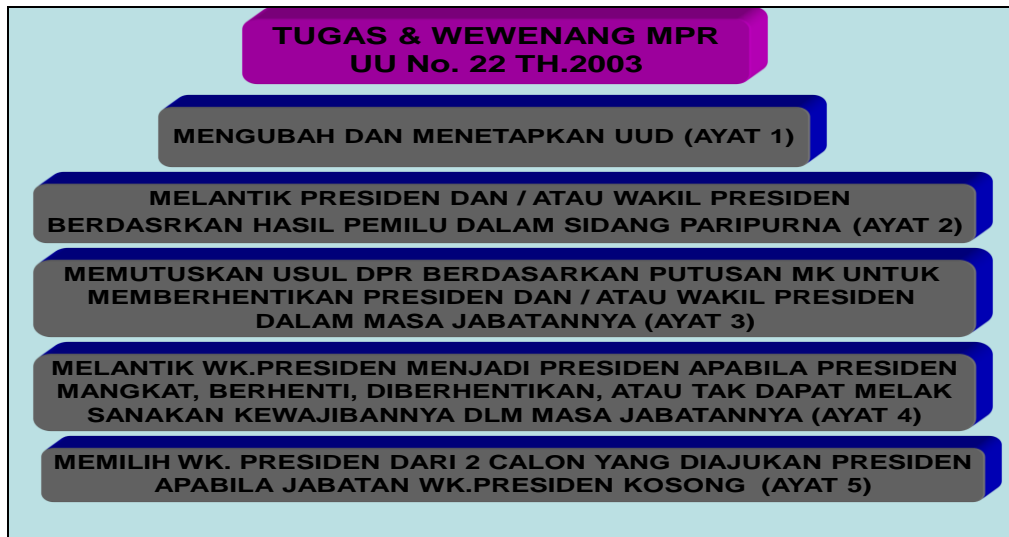
Slide 9



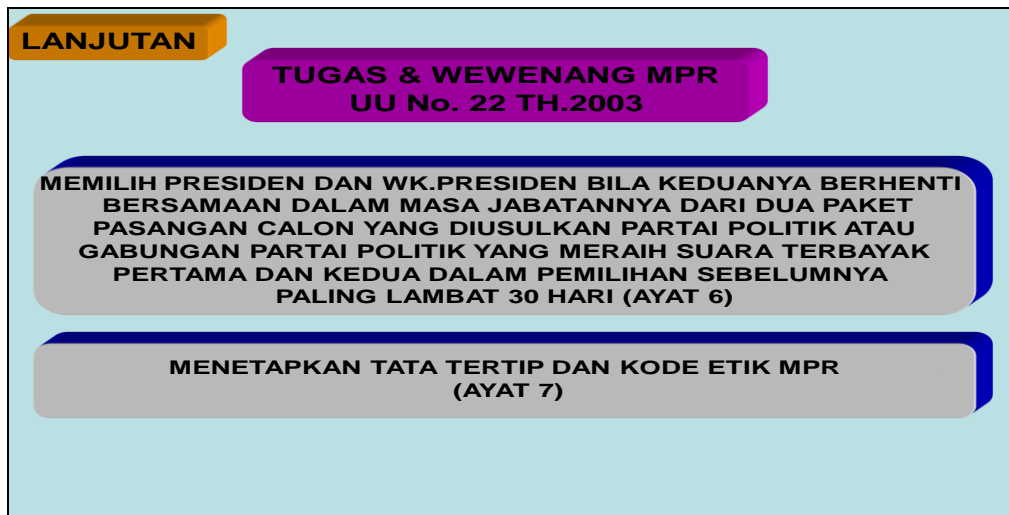
Slide 10



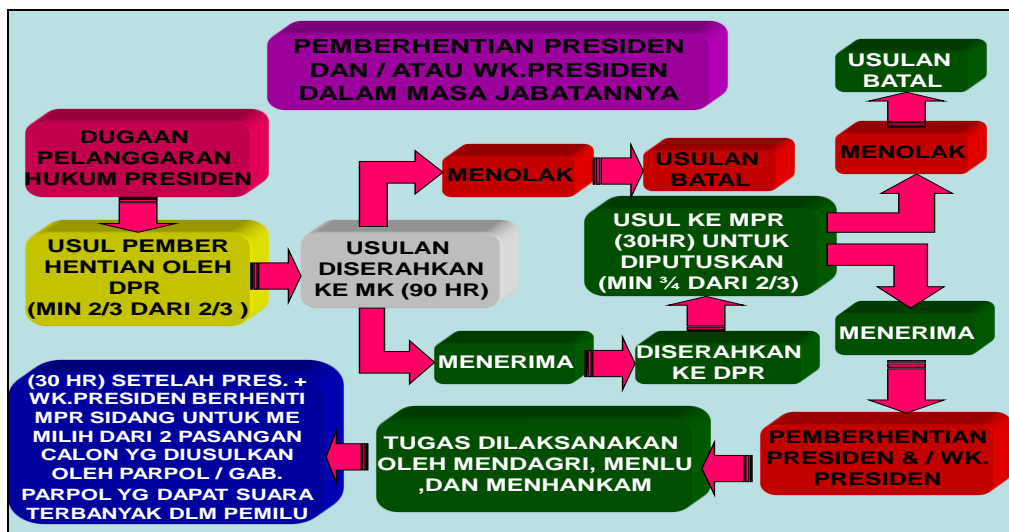
Slide 11



Slide 12



Slide 13



Slide 14



Slide 15



Slide 16



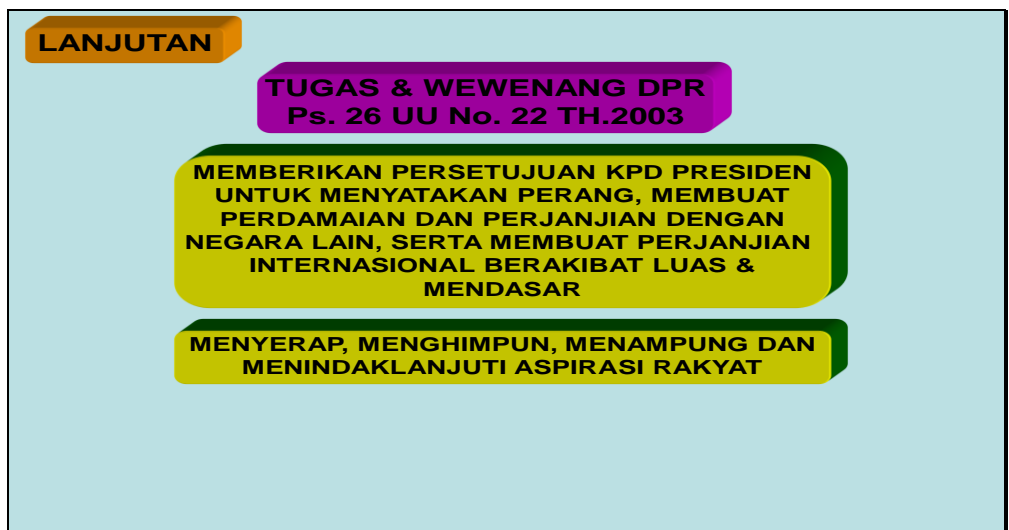
Slide 17



Slide 18



Slide 19



Slide 20



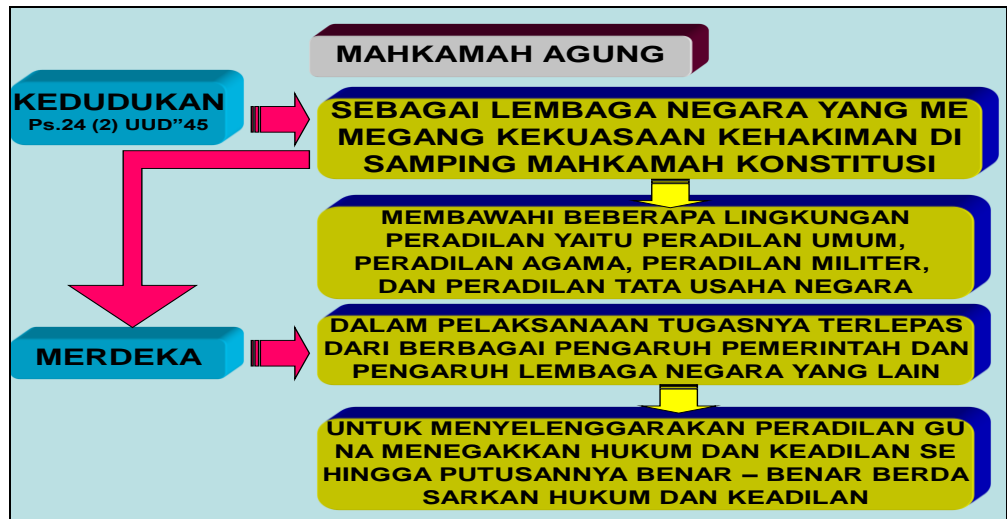
Slide 21



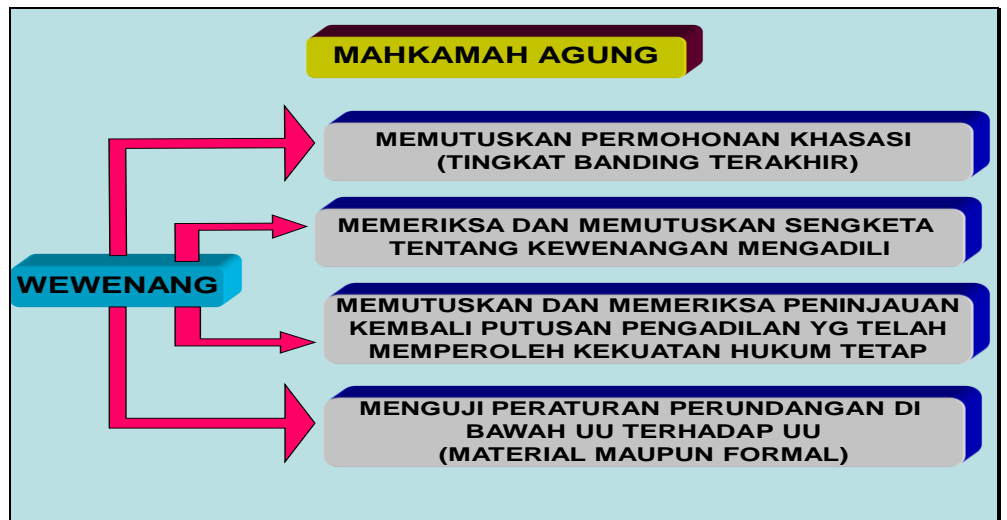
Slide 22



Slide 23



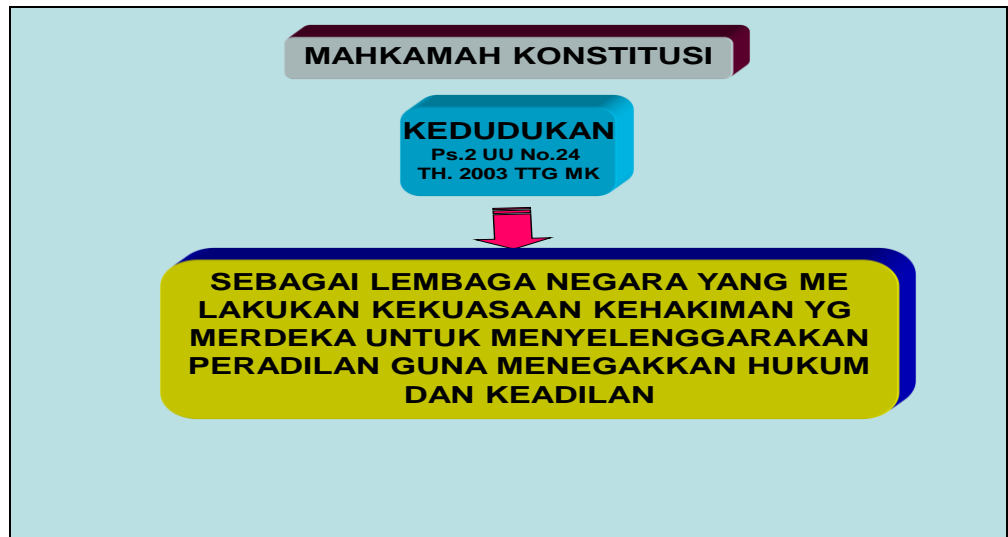
Slide 24



Slide 25



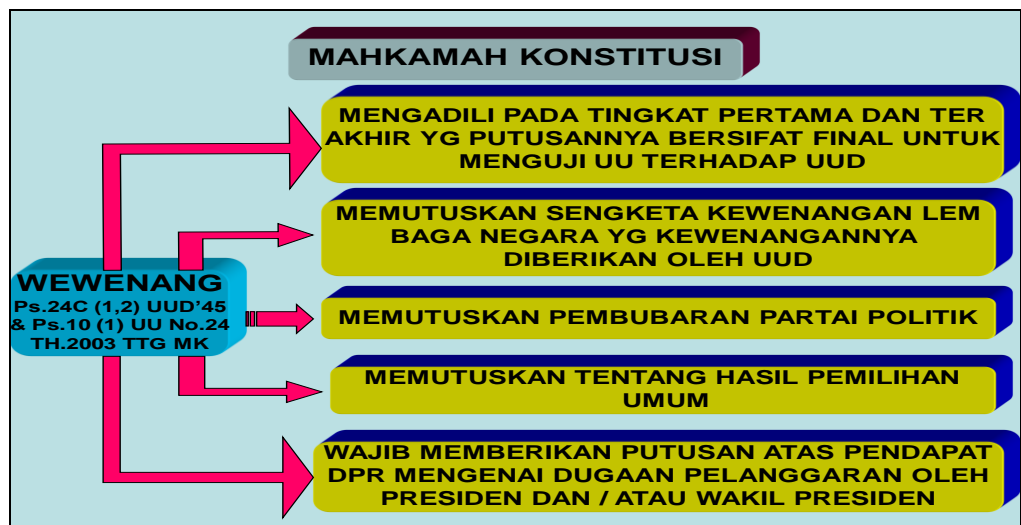
Slide 26



Slide 27



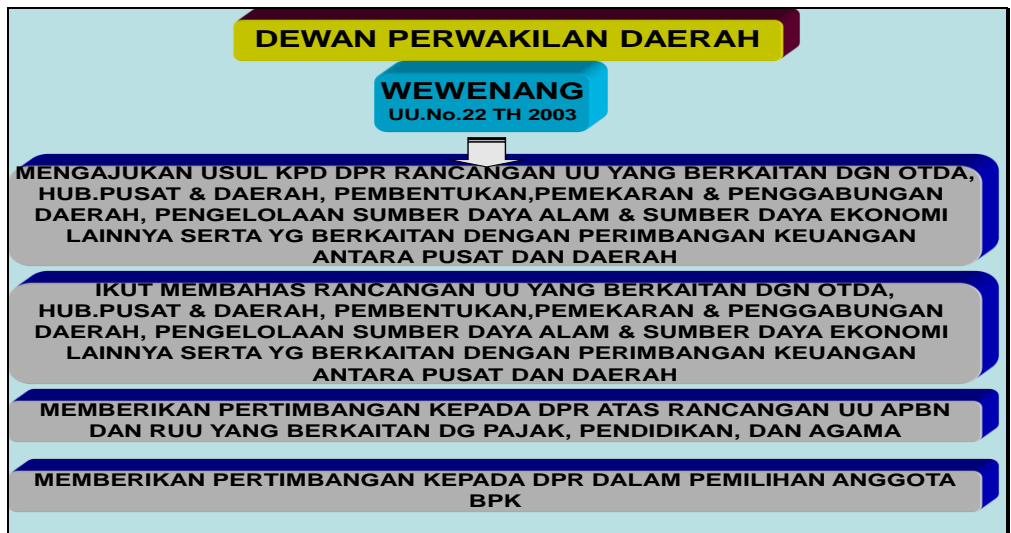
Slide 28



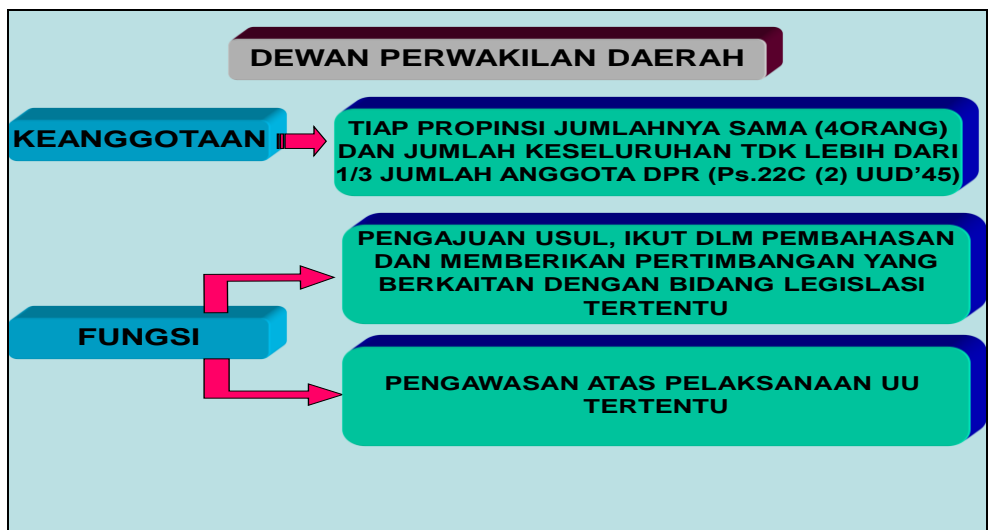
Slide 29



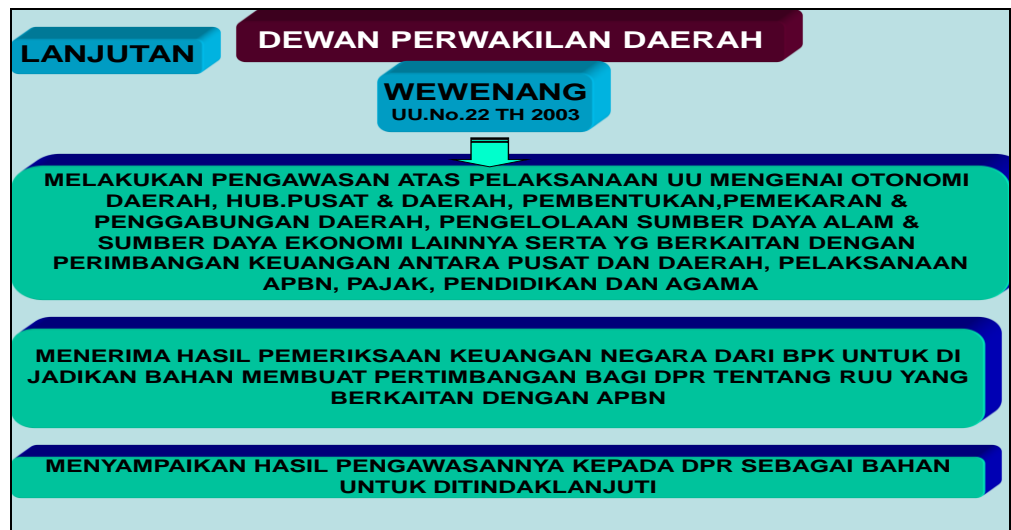
Slide 30



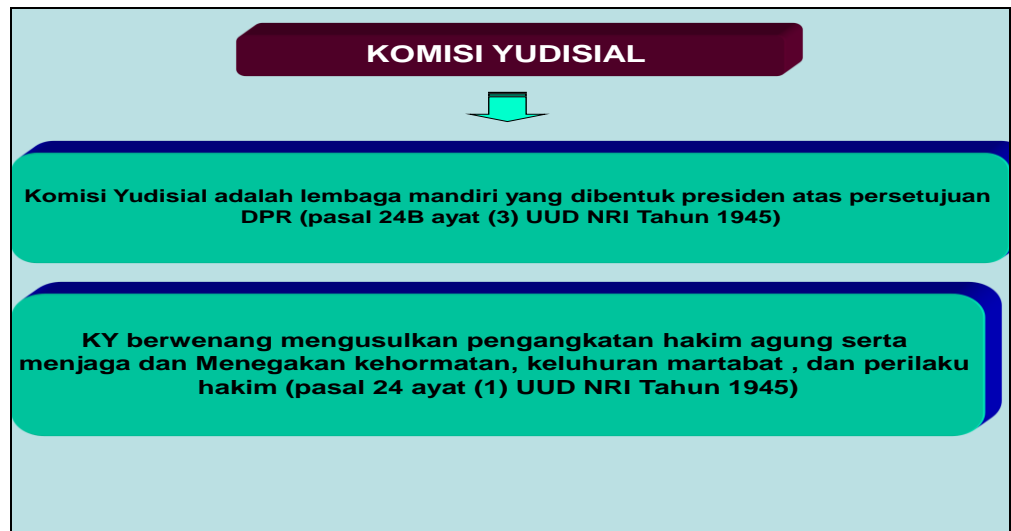
Slide 31



Slide 32



Slide 33



Slide 34

Thanks

Pertemuan 4 (kelas X)

Slide 1



Slide 2



Slide 3

INDIKATOR PEMBELAJARAN

- **Menjelaskan pengertian suprastruktur dan infrastruktur Politik serta menggambarkan skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan.**
- **Mengidentifikasi fungsi dan kewenangan Lembaga-Lembaga Negara**
- **Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi Politik**

Slide 4

TUJUAN PEMBELAJARAN

- **Peserta didik dapat menjelaskan pengertian partisipasi warga negara dalam sistem politik.**
- **Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam sistem politik**
- **Peserta didik dapat menyaji dan mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik.**

Slide 5

Mau apa hari ini ?

- Silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing!
Oke sudah?
- Diskusikan!
 - Kelompok 1 dan 2 membuat pertanyaan mengenai pengertian partisipasi politik warga negara.
 - Kelompok 3 dan 4 membuat pertanyaan mengenai partisipasi warga negara di lingkungan sekolah
 - Kelompok 5 dan 6 membuat pertanyaan mengenai partisipasi warga negara di lingkungan masyarakat
 - Kelompok 7 membuat pertanyaan mengenai partisipasi warga negara di lingkungan negara.

Slide 6

Lanjutan :

- Kumpulkan hasil pekerjaan kalian kepada guru.
- Guru akan membagikan soal yang sudah di buat kepada kelompok yang lain
- Kerjakan soal dengan benar dan serius

Slide 7

Partisipasi politik Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

definisi partisipasi politik sendiri yang salah satunya dikemukakan oleh Verba adalah bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Slide 8

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.

Slide 9

Partisipasi di Lingkungan Sekolah

Demokrasi secara Langsung

- Pemilihan ketua Osis, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR dan Modelling.
- Forum-forum diskusi yang dilakukan disekolah

Demokrasi secara tidak langsung

- Menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan
- membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya

Slide 10

Partisipasi di Lingkungan Masyarakat

Demokrasi secara Langsung

- Forum warga.
- Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.

Demokrasi secara tidak Langsung

- Penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga
- perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya.

Slide 11

Partisipasi di Lingkungan Negara

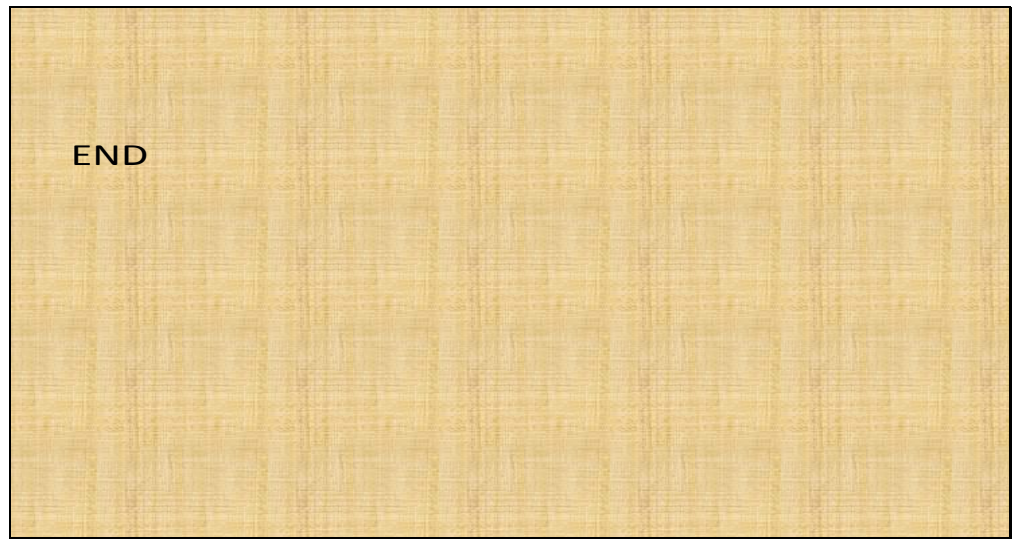
Demokrasi secara Langsung

- Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
- Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).
- Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.

Demokrasi secara tidak Langsung

- penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa

Slide 12



Pertemuan 5 (kelas X)

Slide 1

PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh :
Lina Nur Savangah

Slide 2

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menganalisis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia
- Menjelaskan Kewenangan Pemerintah Daerah di Indonesia
- Menganalisis Hubungan Pemerintah Daerah dengan Kementerian
- Menyajikan hasil analisis tentang kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka NKRI

Slide 3


APA Kegiatan hari ini???

Buatlah Kelompok yang beranggotakan 5-6 orang!
Diskusi kita hari ini adalah "Tebak soal"

Aturan Permainan

1. Kerjakan dengan kelompok anda masing-masing!
2. Jawablah semua soal yang telah disediakan!
3. Kerjakan pada lembar jawab!
4. Kerjakan soal secara urut!
5. Jika sudah selesai, tulis jawaban kalian dipapan tulis!
6. Kelompok yang pointnya paling tinggi adalah pemenangnya!

GOOD LUCK



Slide 4

SOAL INTI

- 1. Dasar hukum Penyelenggaraan Pemerintah daerah di Indonesia!**
- 2. Siapa yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah!**
- 3. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah!**
- 4. Hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah!**
- 5. Tujuan otonomi daerah!**

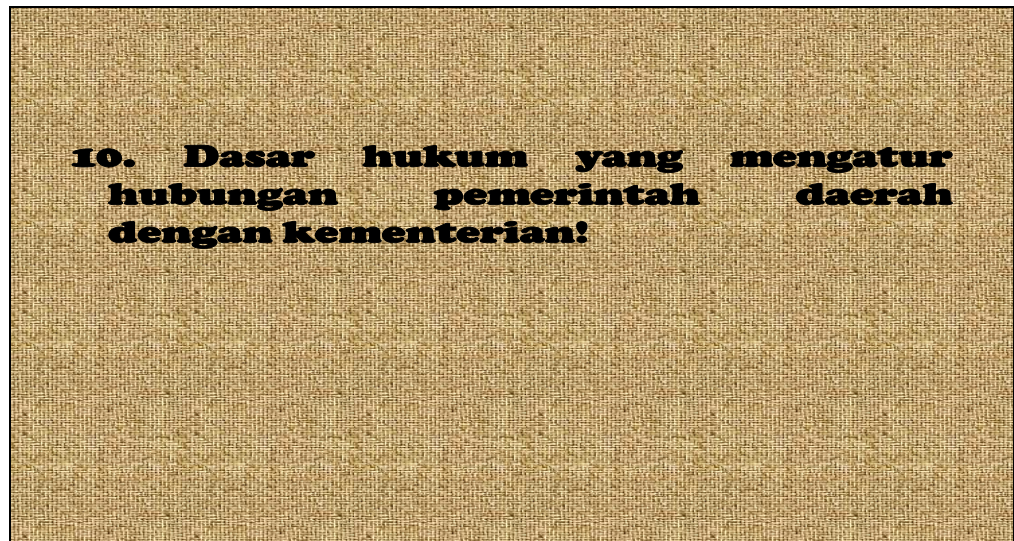
Slide 5

- 6. Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangganya sendiri!**
- 7. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan!**

Slide 6

- 8. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/ instansi vertikal di wilayah tertentu!**
- 9. Penugasan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dan/ atau provinsi dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa!**

Slide 7



Slide 8



Pertemuan 2 (kelas XI)

Slide 1



Slide 2

Tujuan Pembelajaran

- Menganalisis Tugas dan Wewenang Kementerian Indonesia
- Menganalisis kedudukan dan fungsi kementerian Negara RI
- Menyaji hasil analisis terkait kedudukan dan fungsi kementerian

Slide 3

APA KEGIATAN HARI INI?

1. Buatlah kelompok dengan jumlah anggota 5-6 orang.
2. Setiap kelompok mendiskusikan materi yang telah di tentukan.
 - Kelompok 1 dan 2 mendiskusikan mengenai kementerian pertahanan
 - Kelompok 3 dan 4 mendiskusikan mengenai kementerian pertanian
 - Kelompok 5 dan 6 mendiskusikan mengenai kementerian Hukum dan HAM
 - Kelompok 7 dan 8 mendiskusikan mengenai kementerian negara dan lingkungan hidup
3. Kerjakan di buku tugas. (Jangan lupa tulis nama kelompok di pojok kanan atas).
4. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas.
5. Kerjakan dengan tenang dan serius

Slide 4

Kementerian Pertahanan



Kementerian pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Kemhan menyelenggarakan fungsi :


- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan;
- pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Slide 5

Permasalahan keamanan di Papua. persoalan Papua adalah ancaman internal sehingga akan diatasi oleh pihak Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. "Masalah separatis ini ditangani Kementerian Pertahanan. Jadi di Papua ditangani Kodam (Komando Daerah Militer) sebagai perwakilan di Papua.

Slide 6

Kementerian Pertanian



Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Slide 7



Slide 8


- Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
- Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
- Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
- Pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan

Slide 9

- Permasalahan yang dihadapi mencakup bidang produksi, distribusi dan keterjangkauan harga.
1. Masalah produksi terkait kapasitas, produktivitas petani, insentif untuk petani, dan data yang tidak akurat sehingga menimbulkan masalah dalam kebijakan impor.
 2. Permasalahan dalam distribusi antara lain panjangnya tata niaga dan adanya pelaku-pelaku yang dominan di pasar. Di samping itu, pembentukan harga juga dikuasai oleh beberapa pelaku pasar saja.
 3. Permasalahan ketahanan pangan nasional. Pasalnya, apabila ketahanan pangan tidak berjalan baik, kerentanan pangan tidak hanya mengganggu perekonomian, namun juga kesejahteraan masyarakat.

Slide 10

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Tugas Pokok
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fungsi

- perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
- penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Slide 11

- **Kemenkumham** memberi remisi kepada pelaku tindak kejahatan terorisme dan narkoba.
- **Peningkatan pelayanan keimigrasian** serta pengawasan dan restrukturisasi keimigrasian.

Slide 12

Kementerian Negara Lingkungan Hidup



Kementerian Negara Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan;
- koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
- pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.


Slide 13

Kepulan asap hitam keluar di salah satu pabrik PT. Semen Padang (27/08/2014), yang berdampak buruk bagi masyarakat di sekitar pabrik. Foto: Riko Coubut



Slide 14

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal



Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan nasional di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
- pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Slide 15

Untuk fokus program pembangunan daerah tertinggal, adalah untuk pembangunan listrik pedesaan, pembangunan jalan desa, dan pengadaan air bersih. Program pemberian air bersih ditekankan untuk dilakukan di Bima. Selain itu, pembangunan jalan desa dan listrik pedesaan juga dilakukan.

Dalam program pengadaan air bersih, contoh proyeknya adalah di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Bima. Penduduk yang sebanyak 13.400 KK di kecamatan itu sebelumnya harus berjalan beberapa kilometer (lima kilometer dari Desa Maria Utara) untuk mendapatkan air bersih dari Sungai Surinae.

Slide 16

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) merupakan lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, maupun tugas lainnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
- pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Slide 17

Kementerian PP dan PA terus membangun komitmen dan memperkuat jejaring koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 33 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di 510 Polres dan Polda, Pusat Krisis Terpadu/PKT di 132 Rumah Sakit Umum/RSUD/RS Swasta, Pusat Pelayanan Terpadu di RS Polri, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Pusat Krisis Pengaduan untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh BNP2TK, Unit Pengaduan Masyarakat di Kementerian PP dan PA dan gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di 30 provinsi dan 166 kabupaten/kota.

Seluruh unit layanan inilah yang diharapkan mampu melakukan pendampingan/penanganan dalam setiap penyelesaian kasus kekerasan.

Slide 18

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



TUGAS

- Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

FUNGSI

- Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen
- Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden.

Slide 19

- Pembinaan tata kelola minyak dan gas bumi (migas). Caranya dengan meningkatkan kehandalan dan membangun kilang minyak baru.
- Pada sektor mineral dan batu bara, diminta mengganti Sistem Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan sistem Kontrak antara perusahaan negara untuk pengelolaan dan cadangan mineral harus dijadikan sebagai cadangan milik negara.
- Di sektor ketenagalistrikan, segera meningkatkan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Slide 20



Pertemuan 3 (kelas XI)

Slide 1

PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh :

Lina Nur Savangah

Slide 2

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menganalisis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia
- Menjelaskan Kewenangan Pemerintah Daerah di Indonesia
- Menganalisis Hubungan Pemerintah Daerah dengan Kementerian
- Menyajikan hasil analisis tentang kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka NKRI

Slide 3


APA Kegiatan hari ini???

Buatlah Kelompok yang beranggotakan 5-6 orang!
Diskusi kita hari ini adalah “Tebak soal”

Aturan Permainan

- 1. Kerjakan dengan kelompok anda masing-masing!**
- 2. Jawablah semua soal yang telah disediakan!**
- 3. Kerjakan pada lembar jawab!**
- 4. Kerjakan soal secara urut!**
- 5. Jika sudah selesai, tulis jawaban kalian dipapan tulis!**
- 6. Kelompok yang pointnya paling tinggi adalah pemenangnya!**

GOOD LUCK



Slide 4

SOAL INTI

- 1. Dasar hukum Penyelenggaraan Pemerintah daerah di Indonesia!**
- 2. Siapa yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah!**
- 3. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah!**
- 4. Hak dan kewajiba penyelenggaraan otonomi daerah!**
- 5. Tujuan otonomi daerah!**

Slide 5

- 6. Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangganya sendiri!**
- 7. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan!**

Slide 6

- 8. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/ instansi vertikal di wilayah tertentu!**
- 9. Penugasan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dan/ atau provinsi dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa!**

Slide 7

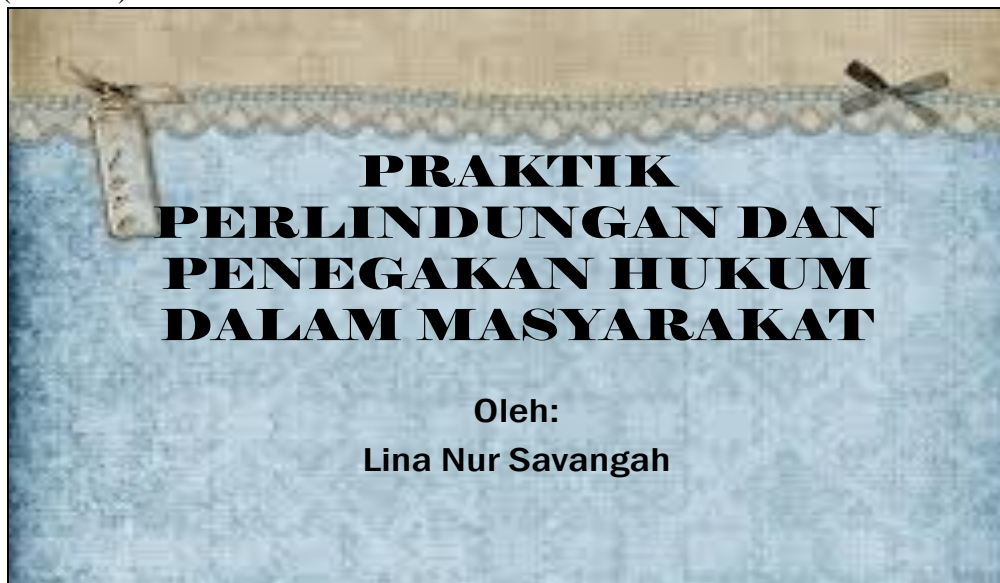
- 10. Dasar hukum yang mengatur hubungan pemerintah daerah dengan kementerian!**

Slide 8

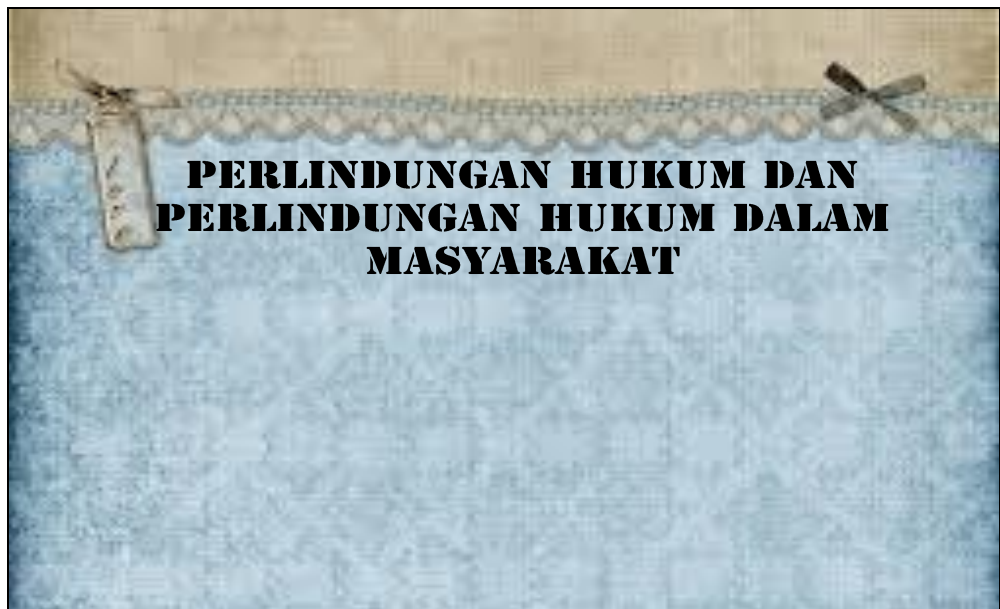


Pertemuan 5 (kelas XI)

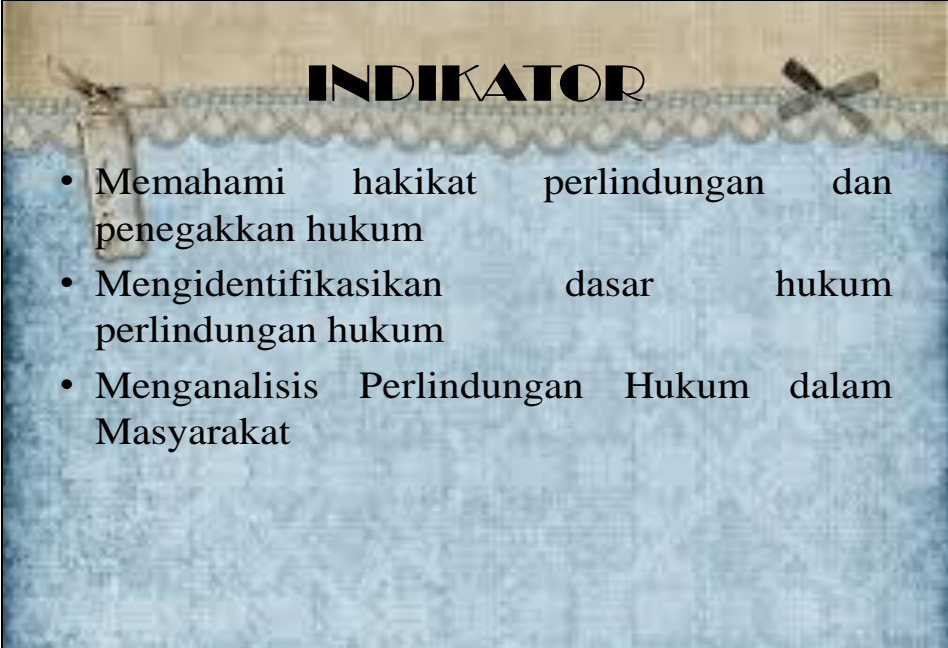
Slide 1



Slide 2



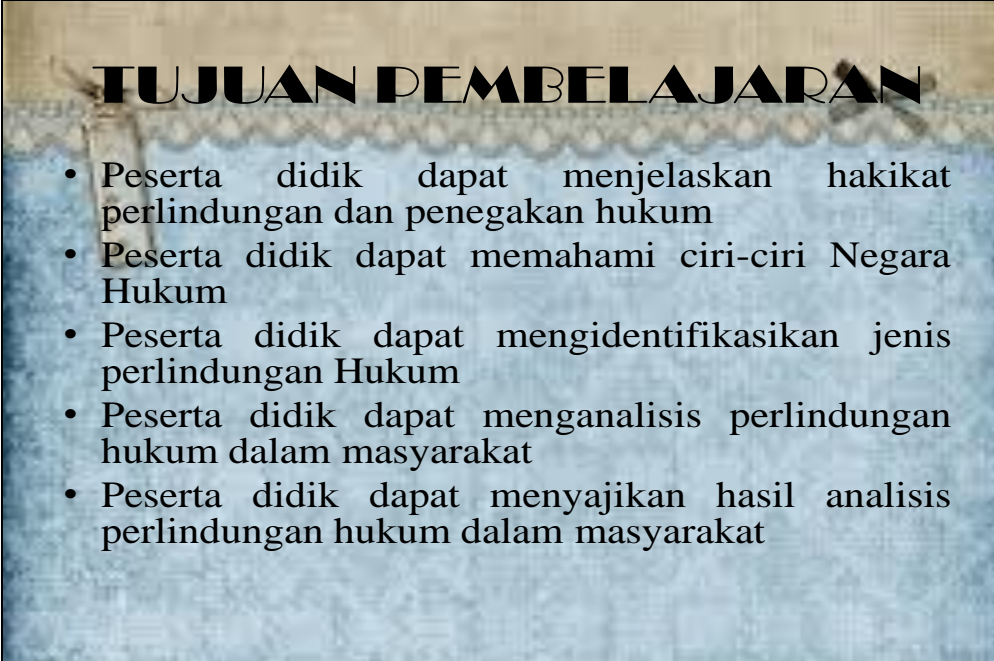
Slide 3



INDIKATOR

- Memahami hakikat perlindungan dan penegakkan hukum
- Mengidentifikasi dasar hukum perlindungan hukum
- Menganalisis Perlindungan Hukum dalam Masyarakat

Slide 4



TUJUAN PEMBELAJARAN

- Peserta didik dapat menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum
- Peserta didik dapat memahami ciri-ciri Negara Hukum
- Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis perlindungan Hukum
- Peserta didik dapat menganalisis perlindungan hukum dalam masyarakat
- Peserta didik dapat menyajikan hasil analisis perlindungan hukum dalam masyarakat

Slide 5

KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Buatlah kelompok dengan jumlah anggota 5-6 orang.
2. Setiap kelompok mendiskusikan materi yang telah di tentukan.
 - Kelompok 1 dan 2 mendiskusikan mengenai Perlindungan Konsumen
 - Kelompok 3 dan 4 mendiskusikan mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri
 - Kelompok 5 dan 6 mendiskusikan mengenai Hak Cipta
 - Kelompok 7 dan 8 mendiskusikan mengenai perlindungan ketenagakerjaan
3. Kerjakan di buku tugas. (Jangan lupa tulis nama kelompok di pojok kanan atas).
4. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas.
5. Kerjakan dengan tenang dan serius

Slide 6



Slide 7



Slide 8



Slide 9

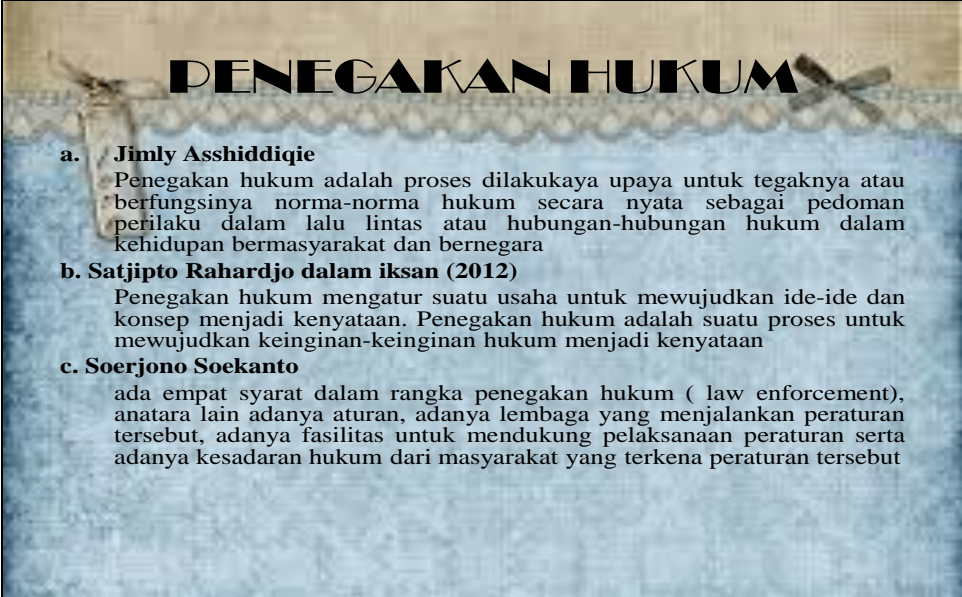


Slide 10

PERLINDUNGAN HUKUM

- a. **Satjipto Raharjo**
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum
- b. **Philipus M. Hadjon**
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan
- c. **CST Kansil**
Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam interaksinya dengan sesama manusia.

Slide 11



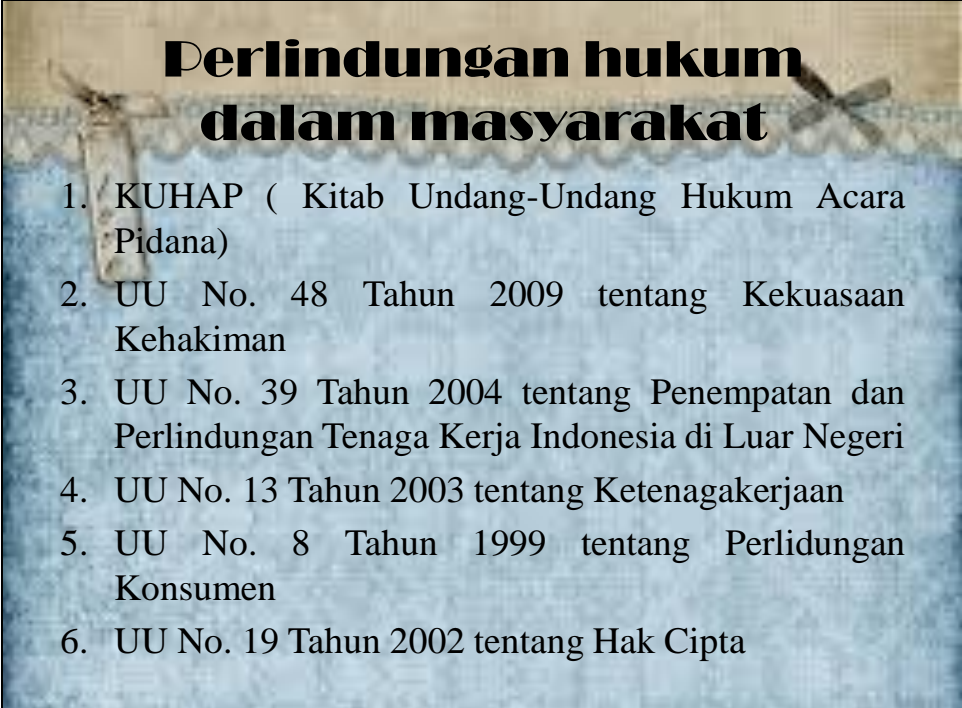
PENEGAKAN HUKUM

a. **Jimly Asshiddiqie**
Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

b. **Satjipto Rahardjo dalam iksan (2012)**
Penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan

c. **Soerjono Soekanto**
ada empat syarat dalam rangka penegakan hukum (law enforcement), antara lain adanya aturan, adanya lembaga yang menjalankan peraturan tersebut, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan serta adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan tersebut

Slide 12



Perlindungan hukum dalam masyarakat

1. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
4. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pertemuan 6 (kelas XI)

Slide 1

PENEGAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT

oleh:

Lina Nur Savangah

Slide 2

INDIKATOR

- Memahami unsur-unsur dalam sistem penegakan hukum
- Menganalisis sistem penegakan hukum yang Akuntabel
- Menganalisis penegakan hukum dalam masyarakat

Slide 3

Unsur-unsur Penegakan Hukum

1. Peraturan perundang-undangan
2. Penegak hukum
3. Masyarakat
4. Pelaksanaan (penegakan) hukum

Slide 4

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan unsur-unsur dalam sistem penegakan hukum
- Menganalisis langkah-langkah sistem penegakan hukum yang akuntabel
- Menganalisis penegakan hukum dalam masyarakat
- Menyajikan hasil analisis tentang penegakan hukum dalam masyarakat
-

Slide 5



Slide 6

Penegakan Hukum diLingkungan Sekolah



Slide 7

Penegakan Hukum di Lingkungan Masyarakat



Slide 8

Penegakan hukum di Lingkungan Bangsa dan Negara



Slide 9

Penegakan Hukum di Lingkungan Bangsa dan Negara



Slide 10

Sistem Penegakan Hukum yang Akuntabel

Langkah-langkah untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel antara lain:

1. Memperbarui dan menyempurnaan berbagai perundang-undangan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penegak hukum
3. Pemberian Rewards and Punishment bagi penegak hukum
4. Pemberdayaan lembaga-lembaga pendukung penegak hukum dan lembaga pengawasan profesi penegak hukum
5. Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum
6. Pelaksanaan hukum (penegakan hukum) yang konsisten

**DAFTAR HADIR
KELAS XI
PERHOTELAN 2**

Wali Kelas : : Fitri Dwi Kusumawati, SE, MM.

NO	NAMA SISWA	TANGGAL				
		13/10	20/10	27/10	3/11	10/11
1	Kristiningrum	✓	✓	✓	✓	✓
2	Mahlia Putri Dewi	✓	✓	✓	✓	✓
3	Marningsih Wulandari	✓	S	✓	✓	✓
4	Meda Soliha Wati	✓	✓	✓	✓	S
5	Melani Istria Setyawati	✓	✓	✓	✓	S
6	Meydria Kurniana	✓	✓	✓	✓	✓
7	Mila Rosa	✓	✓	✓	✓	✓
8	Muhammad Nur Al Amin	✓	✓	A	✓	✓
9	Muhammad Rifai Saputra	✓	✓	A	✓	✓
10	Muhammad Riski herdiawan	✓	✓	A	✓	A
11	Muhammad Yusuf Giffary	✓	✓	✓	✓	✓
12	Nanda Ogi Nurcahyo S	✓	✓	✓	✓	A
13	Nastiti Niken Tifani	✓	✓	✓	✓	✓
14	Nathaniel Adeli Chrisdianto	✓	✓	✓	✓	✓
15	Novita Devi Rahayuningtyas	✓	✓	✓	✓	✓
16	Nugi Ardiyanto	✓	✓	A	✓	✓
17	Oki Ardiyanto	✓	✓	A	✓	A
18	Pita Yani Panca Astuti	✓	✓	✓	✓	✓
19	Radeka Abdullah	✓	✓	✓	S	✓
20	Ranella Anesti Dheya	✓	✓	✓	✓	✓
21	Rizka Maulina Saputri	✓	✓	✓	✓	✓
22	Sekar Safitriningsih	✓	✓	✓	✓	✓
23	Shafa Stofonia Azzahra G	✓	✓	✓	S	✓
24	Shella Natasya Prisha Maulia	✓	✓	A	✓	A
25	Shendy Nur Auriyana	✓	✓	✓	✓	✓
26	Sherinandika Putri Dewani	✓	✓	✓	✓	✓
27	Sukma Amalia Sari	✓	✓	✓	✓	✓
28	Tisya Aprilia	✓	✓	✓	✓	✓
29	Yohana Disti Lingga Hapsari	✓	✓	A	✓	✓
30	Yohanes Arya Wasistha P	✓	✓	✓	✓	✓
31	Yuwanti Feraningsih	✓	✓	✓	✓	✓


32	Zakiya Ali Ardi Addarajat	✓	✓	A	✓	✓
33	Zodia Serika Pasha	✓	✓	✓	✓	✓
34	Zalsa Sephiananda Ginting S	✓	✓	✓	✓	A

Sleman ,

2017

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran

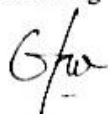


Dartono, S.Pd

NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan

Terbimbing



Lina Nur Savangah

NIM 14401244006

DAFTAR HADIR

KELAS X

TATA BUSANA

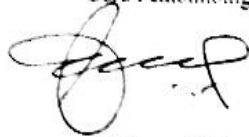
Wali Kelas: Sri Sungkawaningati, S.Pd

NO	NAMA SISWA	TANGGAL					
		28/9	12/10	19/10	26/10	2/11	9/11
1	Ananda Cahya Budiman	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Andreina Ayu Febrianti						
3	Athien Putri Fitriana	✓	✓	✓	✓	✓	S
4	Azzizah Farha Aisha	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Cesar Irma Della	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Dea Tri Piantesella	A	✓	✓	✓	✓	✓
7	Dies Lukita Alfancha	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Dmita Sholihatul Alfanea	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Dwi Safitri Ningsih	✓	✓	✓	✓	S	✓
10	Epifania Puspita Ugahari	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Erma Widyawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Fany Alfina Damayanti	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Fauzilah	✓	✓	✓	I	✓	✓
14	Ferra Sukma Febiana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Intan Nuraini	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Kumita Dwi Fitriani	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Masrurotul Fadilah	✓	S	✓	✓	✓	✓
18	Maya Yuni Puspitasari	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Nadha Ayesha Mahadewi						
20	Nadha Kartika Santi	✓	✓	✓	S	✓	✓
21	Rosa Alfina Damayanti	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Sabilla Seviardani	✓	✓	✓	I	✓	✓
23	Sagita Indah Parawansa	✓	✓	✓	I	✓	✓
24	Sintia Agustina Kusuma	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Vira Asri Maylam	A	✓	✓	S	✓	✓
26	Afani Dina Fadillah	✓	✓	✓	✓	A	✓

Sleman, November 2017

Mengetahui,

Guru Pembimbing



Dartono, S.Pd
NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan
Terbimbing



Lina Nur Savangah
NIM: 14401244006

**DAFTAR HADIR
KELAS X
PERHOTELAN 1**

Wali Kelas : T. Atik Binanturetno, S.Pd

NO	NAMA SISWA	TANGGAL					
		28/9	12/10	19/10	26/10	2/11	9/11
1	Ade Dian Fitriani	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Ade Ella Isna Putri Nuruddin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Adistya Puteri Lestari	✓	✓	✓	✓	✓	A
4	Agnes Febriana Triwidyastuti	✓	✓	✓	S	✓	✓
5	Albert Agung Gunawan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Albertus Agung Jossy Permana	✓	✓	✓	S	✓	✓
7	Alif Adnan Prasetyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Alya Alfiani	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Ananda Alfian Cucu Pratama	✓	✓	A	✓	✓	✓
10	Andrean Wendy Tarigan S	✓	✓	✓	S	✓	S
11	Anggun Widiastuti	A	A	✓	A	✓	A
12	Aninda Ryan oktaviana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Annisa Alwi Syahidah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Aqmailia Dian Aryudani	✓	S	✓	✓	✓	✓
15	Arya Fathah Aziz Hafidz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Arya Galih Pratama	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Aulia Agrianti Nurdiasari	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Avina Maharani	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Bagus Joko Wiratama	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Bahrul Ulum Ardiarto	A	✓	✓	A	✓	A
21	Bambang Ahmad Rifai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Bayu Adji Pamungkas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Catur Anggi Kiswari	✓	✓	✓	✓	✓	✓

24	Danis Rahayuningsih	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Deandra Agriana Candra N	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Devita Ramadhani	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Dinda Amelia Dewi						
28	Erlina Auramara	✓	A	A	✓	✓	S
29	Farisatus Saidha	✓	✓	✓	✓	✓	S
30	Gabriella Ratna Puspamega	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	Hanna Dwi Sephiasih	✓	✓	✓	A	✓	✓
32	Ida Nur Hidayati	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	Iga Naila	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	Khairul Ikhwan	✓	✓	A	✓	✓	✓
35	Krisna Murti	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	Maria Esperanza	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	Stefani Febbysta Seritama	A	✓	✓	✓	✓	✓
38	Vincentia Angelina Eta Keban	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sleman ,

2017

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran



Dartono, S.Pd

NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan

Terbimbing



Lina Nur Savangah

NIM 14401244006

DAFTAR NILAI

Kelas : XI Perhotelan 2
 Wali kelas : Fitri Dwi Kusumawati, SE, MM.
 Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan
 KKM Kewarganegaraan
 : 75

No	Nama	Penilaian			Rata-rata	Keterangan
		Afektif	Kognitif	Psikomotorik		
1	Kristiningrum	91	93	91	91	TUNTAS
2	Mahlia Putri Dewi	91	82	83	85	TUNTAS
3	Marningsih Wulandari	75	89	75	79	TUNTAS
4	Meda Soliha Wati	75	85	75	78	TUNTAS
5	Melani Istria Setyawati	75	88	75	79	TUNTAS
6	Meydria Kurniana	88	89	91	89	TUNTAS
7	Mila Rosa	91	88	91	90	TUNTAS
8	Muhammad Nur Al Amin	86	79	86	83	TUNTAS
9	Muhammad Rifai Saputra	97	79	88	88	TUNTAS
10	Muhammad Riski herdiawan	75	76	75	75	TUNTAS
11	Muhammad Yusuf Giffary	83	81	83	82	TUNTAS
12	Nanda Ogi Nurcahyo Santoso	75	86	97	86	TUNTAS
13	Nastiti Niken Tifani	88	77	83	83	TUNTAS
14	Nathaniel Adeli Chrisdianto	83	83	86	84	TUNTAS
15	Novita Devi Rahayuningtyas	75	84	75	78	TUNTAS
16	Nugi Ardiyanto	83	79	75	75	TUNTAS
17	Oki Ardiyanto	58	76	75	69	TUNTAS
18	Pita Yani Panca Astuti	83	86	83	84	TUNTAS
19	Radeka Abdullah	75	80	75	76	TUNTAS
20	Ranella Anesti Dheya	91	90	86	89	TUNTAS
21	Rizka Maulina Saputri	91	93	86	90	TUNTAS
22	Sekar Safitriningsih	91	89	86	88	TUNTAS
23	Shafa Stofonia Azzahra G	75	88	75	79	TUNTAS
24	Shella Natasya Prisha Maulia	66	78	75	75	TUNTAS
25	Shendy Nur Auriyana	83	86	75	81	TUNTAS

26	Sherinandika Putri Dewani	94	89	91	91	TUNTAS
27	Sukma Amalia Sari	88	87	86	87	TUNTAS
28	Tisya Aprilia	88	85	88	87	TUNTAS
29	Yohana Disti Lingga Hapsari	88	77	80	81	TUNTAS
30	Yohanes Arya Wasistha P	83	82	75	80	TUNTAS
31	Yuwanti Feraningsih	88	89	86	87	TUNTAS
32	Zakiya Ali Ardi Addarajat	83	84	83	83	TUNTAS
33	Zodia Serika Pasha	91	86	88	88	TUNTAS
34	Zalsa Sephiananda Ginting S	75	85	75	78	TUNTAS

Sleman ,

2017

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran

Dartono, S.Pd
NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan
Terbimbing

Lina Nur Savangah
NIM 14401244006

DAFTAR NILAI

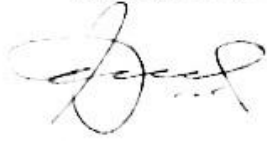
Kelas : X TATA BUSANA
 Wali kelas : Sri Sungkawaningati, S. Pd
 Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 KKM : 75

No	Nama	Penilaian			Rata-rata	Keterangan
		Afektif	Kognitif	Psikomotorik		
1	Ananda Cahya Budiman	93	85	93	90	TUNTAS
2	Andreina Ayu Febrianti	-	-	-	-	-
3	Arlie Putri Fitriana	80	75	93	82	TUNTAS
4	Azzizah Farha Aisha	91	72	93	85	TUNTAS
5	Cesar Irma Della	91	87	93	90	TUNTAS
6	Dea Tri Pramesella	75	68	75	72	BELUM TUNTAS
7	Dies Lukita Alfancha	86	82	86	84	TUNTAS
8	Diinta Sholihatul Alfanca	91	80	93	88	TUNTAS
9	Dwi Safitri Ningsih	91	68	93	84	TUNTAS
10	Epifania Puspita Ugahari	84	82	84	83	TUNTAS
11	Erma Widyawati	91	83	93	89	TUNTAS
12	Fany Alfina Damayanti	93	84	93	90	TUNTAS
13	Faunilah	80	72	80	77	TUNTAS
14	Ferra Sukma Febiana	93	81	93	89	TUNTAS
15	Intan Nuraini	91	84	93	89	TUNTAS
16	Kurnia Dwi Fitriani	91	85	93	90	TUNTAS
17	Masrurotul fadilah	91	85	93	90	TUNTAS
18	Maya Yuni Puspitasari	93	81	93	89	TUNTAS
19	Nadia Ayesha Mahadewi	-	-	-	-	-
20	Nadia Kartika Santi	80	70	80	77	TUNTAS
21	Rosa Alfina Damayanti	93	85	93	90	TUNTAS
22	Sabilla Seviardani	77	83	75	78	TUNTAS
23	Sagita Indah Parawansa	75	68	75	73	BELUM TUNTAS
24	Sintia Agustina Kusuma	91	68	93	84	TUNTAS
25	Vira Asri Maylani	60	68	53	60	BELUM TUNTAS
26	Afani Dina Fadillah	93	82	93	89	TUNTAS

Slleman ,

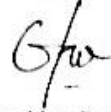
2017

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran



Dartono, S.Pd
NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan
Terbimbing



Lina Nur Savangah
NIM 14401244006

DAFTAR NILAI

Kelas : X Perhotelan 1
 Wali kelas : T. Atik Binanturetno, S.Pd
 Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 KKM : 75

No	Nama	Penilaian			Rata-rata	Keterangan
		Afektif	Kognitif	Psikomotorik		
1	Ade Dian Fitriani	91	79	91	87	TUNTAS
2	Ade Ella Isna Putri Nuruddin	91	74	91	85	TUNTAS
3	Adistya Puteri Lestari	75	52	75	67	BELUM TUNTAS
4	Agnes Febriana Triwidyastuti	75	64	75	71	BELUM TUNTAS
5	Albert Agung Gunawan	82	73	82	79	TUNTAS
6	Albertus Agung Jossy Permana	75	54	75	68	BELUM TUNTAS
7	Alif Adnan Prasetyo	77	71	77	75	TUNTAS
8	Alya Alfiani	91	75	91	85	TUNTAS
9	Ananda Alfian Cucu Pratama	75	47	75	65	BELUM TUNTAS
10	Andrean Wendy Tarigan S	60	50	40	50	BELUM TUNTAS
11	Anggun Widiastuti	20	31	17	22	BELUM TUNTAS
12	Aninda Ryan oktaviana	91	73	91	85	TUNTAS
13	Annisa Alwi Syahidah	91	77	91	86	TUNTAS
14	Aqmailia Dian Aryudani	75	61	75	70	BELUM TUNTAS
15	Arya Fathah Aziz Hafidz	88	75	88	83	TUNTAS
16	Arya Galih Pratama	80	61	80	73	BELUM TUNTAS
17	Aulia Agrianti Nurdiasari	91	76	91	86	TUNTAS
18	Avina Maharani	91	78	91	86	TUNTAS
19	Bagus Joko Wiratama	80	77	80	79	TUNTAS
20	Bahrul Ulum Ardiarto	40	32	26	32	BELUM TUNTAS
21	Bambang Ahmad Rifai	77	73	77	75	TUNTAS
22	Bayu Adji Pamungkas	88	63	88	79	TUNTAS

23	Catur Anggi Kiswari	86	75	86	82	TUNTAS
24	Danis Rahayuningsih	91	75	91	85	TUNTAS
25	Deandra Agriana Candra N	86	72	86	81	TUNTAS
26	Devita Ramadhani	91	81	91	87	TUNTAS
27	Dinda Amelia Dewi	17	-	-	-	-
28	Erlina Auramara	40	36	31	35	BELUM TUNTAS
29	Farisatus Saidha	75	60	66	67	BELUM TUNTAS
30	Gabriella Ratna Puspamega	91	76	91	86	TUNTAS
31	Hanna Dwi Sephiasih	75	71	75	73	BELUM TUNTAS
32	Ida Nur Hidayati	91	77	91	86	TUNTAS
33	Iga Naila	91	74	91	85	TUNTAS
34	Khairul Ikhwan	75	47	75	65	BELUM TUNTAS
35	Krisna Murti	93	81	93	89	TUNTAS
36	Maria Esperanza	91	78	91	86	TUNTAS
37	Stefani Febbysta Seritama	75	52	75	67	BELUM TUNTAS
38	Vincentia Angelina Eta Keban	91	76	91	86	TUNTAS

Sleman ,

2017

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran

Dartono, S.Pd
NIP

Mahasiswa Praktek Lapangan
Terbimbing

Lina Nur Savangah
NIM 14401244006

Dokumentasi

1. Kegiatan Menyambut Siswa



2. Kegiatan Literasi



3. Kegiatan Belajar Mengajar



4. Pendampingan Mengajar



5. Upacara Bendera





LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LAPORAN DANA PELAKSANAAN PLT/MAGANG III
TAHUN:2017

NAMA MAHASISWA: Lina Nur Savangah
NO MAHASISWA : 14401244006
FAK/JUR/PR.STUDI : FIS/PKNH/PKN

NAMA SEKOLAH : SMK Karya Rini
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Laksda Adisucipto No. 86 Sleman,
DIY

No	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/Kuantitatif	Swadaya/Sekolah	Serapan Dana (Dalam Rupiah) Mahasiswa	Pem Kam	Sponsor/Lbg Lain	Jumlah
1.	Penggandaan	RPP, daftar nilai, daftar hadir siswa dan soal ulangan	-	Rp 100.000,00	-	-	Rp 100.000,00
	Total						Rp 100.000,00

Kepala Sekolah

Dosen Pembimbing Lapangan

Sleman, November 2017
Mahasiswa



Anang Priyanto, S.H., M.Hum
NIP. 195809401985031003

Lina Nur Savangah
NIM. 14401241065

